KABUPATEN
SIGI

PERATURAN BUPATI SIGI

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RKPD 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2025



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
7. Bupati adalah Bupati Sigi.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025 – 2029.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
   a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Derah Tahun 2026;

b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Derah; dan
c. pedoman penyusunan Rancangan kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sitematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
g. Penutup.
(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijadikan sebagai:
a. pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan program / kegiatan / sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
b. pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 serta bahan arahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 demi mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran Tahun 2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. keadaan darurat seperti bencana alam dapat memerlukan perubahan RKPD untuk alokasi anggaran dan program yang lebih mendesak.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

DAFTAR ISI

- **DAFTAR ISI** ..... **i**
- **DAFTAR TABEL** ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen 7
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD 8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **1**
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 47
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 61
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 90
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. 101
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 102
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 102
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 130

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH **1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional dan Regional 1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Sigi 4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 10

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 11
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 15
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 21
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah 3
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1
BAB VII PENUTUP 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Jarak ke ibukota Kecamatan	2
Tabel 2.2	Kondisi Topografi/Kelas Ketinggian Lahan Wilayah	4
Tabel 2.3	Kondisi Kemiringan Lereng	5
Tabel 2.4	Kondisi Formasi Geologi	10
Tabel 2.5	Daerah Aliran Sungai	13
Tabel 2.6	Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara Palu	14
Tabel 2.7	Industri Prioritas Kabupaten Sigi	26
Tabel 2.8	Luas dan Jenis Peruntukkan Ruang Diatas Kawasan Rawan Bencana	38
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 2.10	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi	44
Tabel 2.11	Penduduk menurut kelompok umur dan jenis Kelamin	46
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021	48
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurtu Lapangan Usaha di Kabupaten Sigi (persen), ...	50
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar harga Konstan Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Sigi (miliar rupiah)	52
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Sigi (miliar rupiah), 17 - 2021.....	53
Tabel 2.16	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Sigi, ...	54
Tabel 2.17	PDRB Perkapita ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2010 Periode ..	55
Tabel 2.18	Laju Inflasi Rata-Rata	56

Tabel 2.19	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	57
Tabel 2.20	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	58
Tabel 2.21	Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah	59
Tabel 2.22	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	60
Tabel 2.23	Angka kemiskinan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	60
Tabel 2.24	Jumlah Sekolah, Murid, Dan Guru Di Kabupaten Sigi Menurut Jenjang Pandidikan	63
Tabel 2.25	Perkembangan APK, APM menurut Jenjang Pendidikan	64
Tabel 2.26	Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Sigi	65
Tabel 2.27	Tenaga Kesehatan Kabupaten Sigi	65
Tabel 2.28	Desa Lokasi Fokus 25 Desa Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi	67
Tabel 2.29	Realisasi Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sigi Tahun	68
Tabel 2.30	Realisasi Indikator urusan sosial Kabupaten Sigi Tahun	70
Tabel 2.31	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi	72
Tabel 2.32	Rasio KDRT Kabupaten Sigi Tahun	73
Tabel 2.33	Realisasi indikator urusan lingkungan hidup	74
Tabel 2.34	Realisasi indikator Koperasi dan UMKM	79
Tabel 2.35	Realisasi Indikator Urusan Kebudayaan	80
Tabel 2.36	Realisasi Indikator Urusan Perpustakaan	81
Tabel 2.37	Produksi Perikanan Budidaya	82

Tabel 2.38	Realisasi indikator urusan pariwisata	83
Tabel 2.39	Indikator urusan pertanian	86
Tabel 2.40	Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Sigi	87
Tabel 2.40	Populasi Ternak di Kab.Sigi	87
Tabel 2.42	Pengeluaran per Kapita Tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Sigi	91
Tabel 2.43	NTP Kabupaten Sigi	92
Tabel 2.44	Golongan Pengeluaran Non Pangan Kabupaten Sigi.....	93
Tabel 2.45	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Sigi	95
Tabel 2.46	Luas Wilayah Produktif Tahun 2018-2021	96
Tabel 2.47	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan	97
Tabel 2.48	Rasio Ketergantungan Kabupaten Sigi	98
Tabel 2.49	Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi RKPD Terhadap RPJMD	99
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Kabupaten Sigi Tahun 2026	9
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Tahun 2023 s.d Tahun 2026.....	12
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 s.d Tahun 2026.....	19
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023 s.d Tahun 2026.....	22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2026 yang terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2026-2029.....	2
Tabel 4.2	Prioritas Nasional.....	5
Tabel 4.3	Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 1 : "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia" Tahun 2026.....	6
Tabel 4.4	Tujuan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,	9

	Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Tahun 2026	
Tabel 4.5	Tujuan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi; Tahun 2026.....	10
Tabel 4.6	Tujuan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Tahun 2026	12
Tabel 4.7	Tujuan Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; Tahun 2026	14
Tabel 4.8	Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; Tahun 2026	16
Tabel 4.9	Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Tahun 2026	17
Tabel 4.10	Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Tahun 2026....	19
Tabel 4.11	Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Arahan Utama Presiden), Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026	20
Tabel 4.12	Sinkronisasi Antara Misi, Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD	27
Tabel 4.13	Alokasi Pagu Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026	28

Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sigi Tahun 2026	1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi Tahun 2026	2
Tabel 6.3	Target Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sigi Tahun 2026	10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kabupaten Sigi disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2026 berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun kegiatan yang diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sigi yang menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai. selanjutnya untuk mengetahui kondisi secara umum program dan kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun yang lalu yang memuat kemajuan yang sudah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi untuk masing-masing bidang pembangunan yang dilaksanakan. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran dan prioritas pembangunan yang hendak dicapai, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD dan memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;

3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA PPAS dan untuk menyusun RAPBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sigi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsii Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014

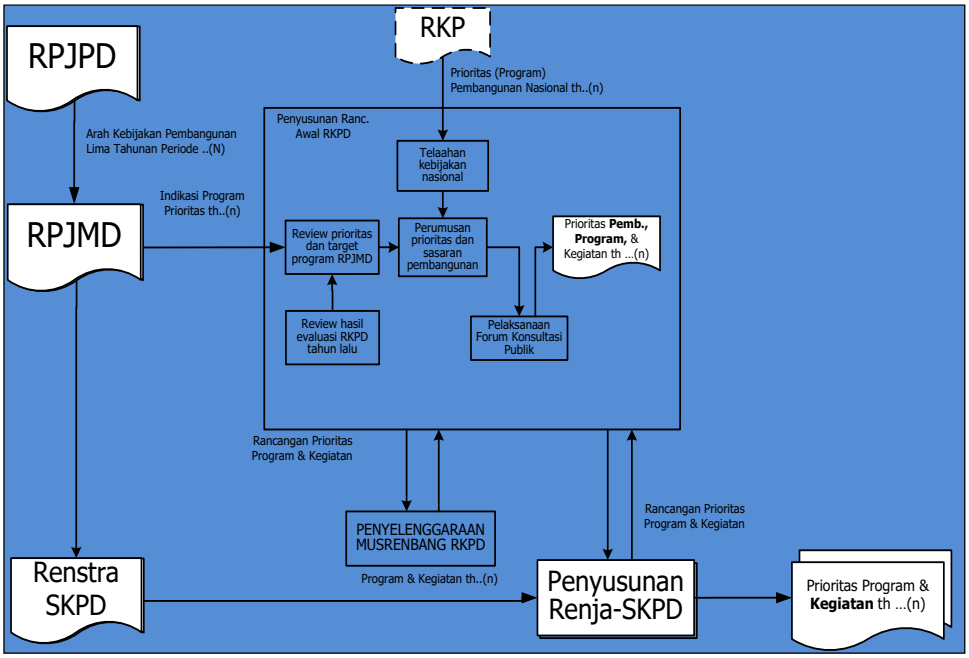
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 nomor);
27. Peraturan Bupati Sigi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Nomor);

1.3 Hubungan Antar Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). disamping dokumen perencanaan dan pengangaran tersebut diatas, dalam mewujudkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh, Pemerintah Daerah juga memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kesepakatan Nasional maupun Daerah.

Gambar 1.1
Bagan Alur Perencanaan Pembangunan Daerah



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2026 adalah menentukan arah kebijakan pembangunan daerah serta menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target pembangunan daerah dan menjadi landasan bagi seluruh OPD untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Tujuan penyusunan RKPD adalah mengsinkronisasikan usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD ditingkat Kecamatan dan Usulan Rencana Kerja OPD melalui Forum OPD dan ditindaklanjuti di Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten.

Tujuan khusus dari penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sigi;
2. Terwujudnya prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:
   - Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
   - Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
   - Mengintegrasikan rencana tata ruang daengan rencana pembangunan daerah;
   - Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2026 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati, digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen KUA PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sigi. RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2026 selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi, untuk memastikan APBD Kabupaten Sigi telah disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2026.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Sigi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Sigi terletak antara 0°51'24.02" (nol derajat lima puluh satu menit dua puluh empat koma nol dua detik.) sampai 2°3'20.24" (dua derajat tiga menit dua puluh koma dua puluh empat detik.) Lintang Selatan dan 119°38'46.7" (seratus sembilan belas derajat tiga puluh delapan menit empat puluh enam koma tujuh detik.) sampai 120°22'12.07" (seratus dua puluh derajat dua puluh dua menit dua belas koma tujuh detik.) Bujur Timur dan memiliki wilayah seluas 521.818,56 hektar (lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh enam hektar) atau sekitar 8,48 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Barat : Kabupaten Donggala, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.

Kabupaten Sigi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan, 176 desa dan 1 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

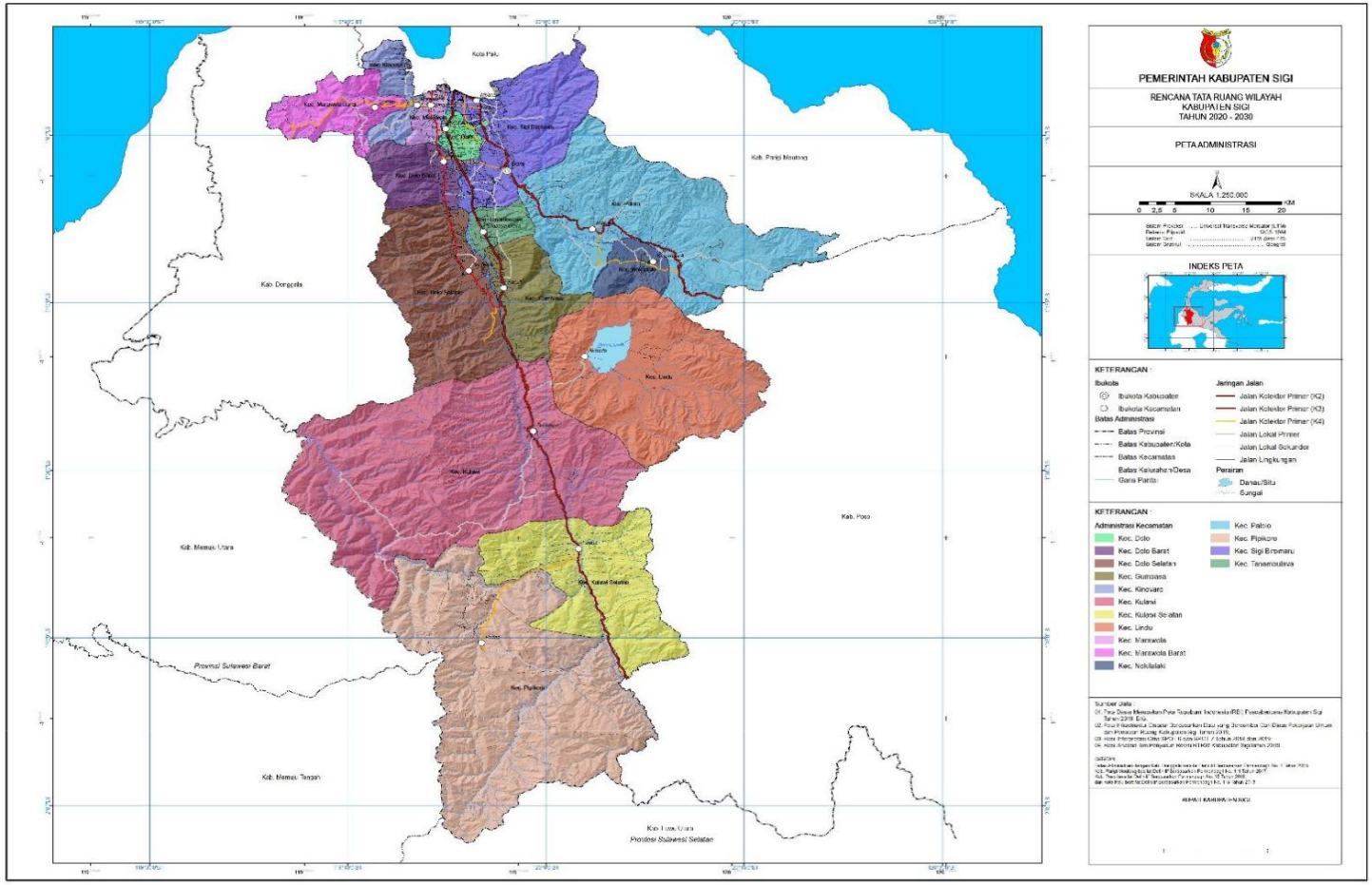
Tabel 2.1
Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Jarak ke Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Sigi Tahun 2024

No.	kecamatan	Luas (Ha)	%	Ibukota kecamatan	Jml Desa	Jarak dari ibukota Kab. (Km)
1	Pipikoro	960,67	18,41	Peana	19	123
2	Kulawi Selatan	420,06	8,05	Lawua	12	96
3	Kulawi	1058,25	20,28	Bolapapu	16	62
4	Lindu	554,17	10,62	Tomado	5	89
5	Nokilalaki	75,66	1,45	Kamarora A	5	35
6	Palolo	583,91	11,19	Makmur	21	25
7	Gumbasa	177,42	3,40	Pakuli	7	32
8	Dolo Selatan	587,05	11,25	Baluase	12	13
9	Dolo Barat	112,71	2,16	Kaleke	12	7
10	Tanambulava	56,36	1,08	Sibalaya utara	5	17
11	Dolo	21,92	0,42	Kotapulu	9	7
12	Sigi Biromaru	175,85	3,37	Mpanau	10	14
13	Sigi Kota	38,61	0,74	Bora	10	0
14	Marawola	151,33	2,90	Binangga	11	18
15	Marawola Barat	70,45	1,35	Dombu	12	33
16	Kinovaro	173,77	3,33	Porame	10	20
Kab. Sigi		**5.218,19**	**100**		**176**	**-**

Sumber : Sigi dalam Angka Tahun 2025, diolah Kembali.

Untuk lebih jelasnya mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten Sigi dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sigi



Suhu udara di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya wilayah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Dengan kondisi wilayah yang berada tepat di garis khatulistiwa, menjadikan wilayah Kabupaten Sigi memiliki suhu udara yang cukup panas. Berdasarkan hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu, sepanjang Tahun 2022, suhu udara rata-rata mencapai 27,65°C. Sedangkan rata-rata kelembaban udara pada Tahun 2022 mencapai 77.92 persen, intensitas curah hujan beragam setiap bulannya. Curah hujan rata-rata dalam satu Tahun mencapai 72.61 mm, penyinaran matahari berkisar 60.00 %, Sementara itu, arah angin terbanyak dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar 3.92 knots.

Tabel 2.6
Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi
Mutiara PaluTahun 2022-2024

No	Parameter Iklim	Satuan	Rata-rata Per Tahun		
			2022	2023	2024
1	Suhu Udara *Temperature*	°C	27,65	28,36	28,32
2	Tekanan Udara *Air Pressure*	mb	1.010,93	1.011,38	1.011,09
3	Kelembaban Udara *Humidity*	%	77,92	74,25	75,75
4	Penyinaran Matahari *Length of Daylight*	%	60,00	67,25	18,33
5	Curah hujan *Rain Falls*	mm	72,92	81,55	70,79
6	Kecepatan Angin *Wind Velocity*	Knots	3,92	9,17	3,58

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah kembali)

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Pertanian

Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan tata ruang wilayah.

Kawasan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Sigi saat ini berupa pertanian lahan basah dengan luas 16.169,08 hektar dan pertanian lahan kering yang secara tutupan lahan berdasarkan hasil analisa dan interpretasi citra SPOT 6/7 Tahun 2019 berupa tegalan/ladang dengan luas 15.556,97 hektar.

Dalam rencana pola ruang yang ditetapkan sebagai kawasan tanaman pangan direncanakan seluas kurang lebih 29.253 hektar yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Pipikoro seluas 936,99 hektar
2. Kecamatan Kulawi Selatan seluas 586,45 hektar
3. Kecamatan Kulawi seluas 836,75 hektar
4. Kecamatan Lindu seluas 5.881,22 hektar
5. Kecamatan Nokilalaki seluas 1.076,44 hektar
6. Kecamatan Palolo seluas 3.573,66 hektar
7. Kecamatan Gumbasa seluas 1.988,56 hektar
8. Kecamatan Dolo Selatan seluas 988,10 hektar
9. Kecamatan Dolo Barat seluas 1.212,20 hektar
10. Kecamatan Tanambulava seluas 1.750,88 hektar

11. Kecamatan Dolo seluas 1.547,89 hektar
12. Kecamatan Sigi Biromaru seluas 2.071,57 hektar
13. Kecamatan Marawola seluas 1.244,32 hektar
14. Kecamatan Marawola Barat seluas 177,32 hektar
15. Kecamatan Kinovaro seluas 877,60 hektar
16. Kecamatan Sigi Kota Seluas 3.883,24 hektar

Di dalam kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 27.537 hektar yang di dalamnya terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 17.393 hektar yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Marawola Barat. Selain itu juga, di dalam kawasan tanaman pangan terdapat juga kawasan hutan adat di Kecamatan Kulawi dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

2. Kawasan Hortikultura

Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Berdasarkan dominasi komoditasnya, tipe kawasan agribisnis hortikultura dapat dibedakan atas:

1. Kawasan dengan dominasi komoditas hortikultura dengan sedikit atau tanpa tambahan/sisipan komoditas lainnya.
2. Kawasan budidaya hortikultura yang seimbang atau hampir seimbang antara komoditas hortikultura dan komoditas Iainnya.
3. Kawasan dengan dominasi komoditas nonhortikultura dengan sedikit atau banyak tambahan/ sisipan komoditas hortikultura di dalamnya.

Kriteria yang menjadi dasar penetapan kawasan budidaya hortikultura adalah:

1. Mempunyai kesesuaian Iahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen.
2. Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
3. Mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Komoditi Hortikultura yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Sigi adalah Bawang Merah untuk tanaman sayuran. Dalam pengembangan tanaman hortikultura membutuhkan input dan sarana yang digunakan dalam berusaha tani antara lain benih/bibit, pupuk, tenaga kerja dan pestisida.

Rencana kawasan hortikultura yang ditetapkan di Kabupaten Sigi pada dasarnya tersebar dan bercampur dengan kawasan pertanian lahan kering dan perkebunan, namun demikian ditetapkan juga kawasan hortikultura seluas kurang lebih 930 hektar.

3. Kawasan Perkebunan

Kakao adalah tanaman perkebunan dengan produksi terbanyak di Kabupaten Sigi. Berdasarkan data statistik BPS Pada Tahun 2019 produksi Kakao mencapai 27.705 ton dengan wilayah penghasil terbesar berada di Kecamatan Palolo mencapai 10.855 ton. Selain kakao, Kabupaten Sigi juga merupakan tanaman penghasil kelapa yang jumlahnya cukup banyak yaitu 6.119 ton. Produksi kelapa terbesar di kecamatan Dolo Selatan dengan total produksi 2.466 ton.

Penetapan rencana kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk kawasan perkebunan rakyat dengan beragam jenis-jenis komoditas perkebunan yang terdapat di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 87.879 hektar. Namun demikian, didalam peruntukan kawasan perkebunan terdapat juga kawasan hutan adat seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar di Kecamatan Kulawi.

Rincian kawasan perkebunan untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pipikoro seluas 17.640,74 hektar
2. Kecamatan Kulawi Selatan seluas 8.525,07 hektar
3. Kecamatan Kulawi seluas 19.984,63 hektar
4. Kecamatan Lindu seluas 3.709,20 hektar
5. Kecamatan Nokilalaki seluas 1.108,68 hektar
6. Kecamatan Palolo seluas 9.591,15 hektar
7. Kecamatan Gumbasa seluas 2.750,59 hektar
8. Kecamatan Dolo Selatan seluas 9.253,42 hektar
9. Kecamatan Dolo Barat seluas 1.684,27 hektar
10. Kecamatan Tanambulava seluas 448,87 hektar
11. Kecamatan Dolo seluas 162,08 hektar
12. Kecamatan Sigi Biromaru seluas 5.144,63 hektar
13. Kecamatan Marawola seluas 316,48 hektar
14. Kecamatan Marawola Barat seluas 1.558,94 hektar
15. Kecamatan Kinovaro seluas 1.560,83 hektar
16. Kecamatan Sigi Kota Seluas 1.395,79 hektar.

4. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu sebagai

komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perekebunan, hortikultura atau perikanan) dan memiliki potensi untuk pengembangan peternakan secara terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam).

Ada 7 (tujuh) Kecamatan yg mempunyai potensi lahan produktif yang cukup besar tetapi pemanfaatannya belum maksimal, yaitu:

1. Kecamatan Dolo;
2. Kecamatan Dolo selatan;
3. Kecamatan Dolo barat;
4. Kecamatan Sigi biromaru;
5. Kecamatan Marawola;
6. Kecamatan Tanambulava; dan
7. Kecamatan Gumbasa

Ketujuh kecamatan di atas ini dapat dikembangkan menjadi kawasan peternakan di Kabupaten Sigi. Secara spesifik, untuk Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru dapat dijadikan kawasan peternakan yang menerapkan sistem budidaya intensif dan integrasi sapi potong, dan untuk Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Tanambulava dapat dijadikan kawasan peternakan yang menerapkan sistem pembibitan sapi potong (PO) dan sapi donggala sistem insentif dan pengembalaan, Sedangkan untuk Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Pipikoro dan Kecamatan Palolo dapat dijadikan kawasan peternakan yang menerapkan sistem pembibitan sapi bali,

Selanjutnya untuk Kecamatan Kinovaro dan sebagian Kecamatan Marawola memiliki potensi untuk pengembangan peternakan

kambing potong, dan untuk Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan-Kecamatan di Kulawi Raya berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pembibitan babi, dan untuk sebagian di Kecamatan Palolo (Lembantongoa) berpotensi untuk pengembangan kambing peranakan etawah (PE).

5. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

- Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
- Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Rencana pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Sigi adalah kawasan perikanan tangkap di seluruh perairan danau lindu. Selain perikanan tangkap, terdapat juga perikanan budidaya yang memanfaatkan lahan-lahan pertanian khususnya di Kecamatan Dolo dan Kecamatan Sigi Biromaru namun tidak tergambarkan didalam pola ruang.

6. Kawasan Industri

Program pembangunan industri di Kabupaten Sigi disusun mengacu pada kondisi existing dan dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain mengacu pada rencana pembangunan tersebut, program pembangunan industri Kabupaten Sigi juga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Untuk mencapai visi pembangunan industri dan mengimplementasikan berbagai misi

untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan industri tersebut, maka perlu ditetapkan berbagai strategi yang tepat. Strategi ini disusun untuk mencapai sasaran kualitatif dan kuantitatif yang ditentukan dalam pembangunan industri Kabupaten Sigi. Strategi ini juga yang dilaksanakan melalui berbagai program meliputi program pembangunan sumber daya industri;

Program pembangunan sarana dan prasarana industri; program kerjasama dengan pihak swasta dan antar pemerintah daerah Kabupaten Sigi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat khsususnya Kementerian Perindustrian dalam pengembangan industri; program pengembangan perwilayahan industri; program pemberdayaan IKM; serta program infrastruktur daerah yang menunjang percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten Sigi. Program-program bidang industri tersebut dilakukan melalui Strategi sebagai berikut:

1) Penguatan pasokan bahan baku industri *(supplay chain)* yang berkualitas dan *sustainable* sehingga industri berjalan dengan *continue*;
2) Peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri lokal, khususnya industri prioritas daerah;
3) Penciptaan wirausaha IKM baru memalui program santripreneur;
4) Pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM maupun diluar sentra IKM;
5) Peningkatan infrastruktur strategis daerah yang mendukung majunya industri termasuk aksesibilitas pada sumber bahan baku (raw material) dan logistik;

6) Pengembangan industri andalan pada sentra-sentra IKM berbasis potensi sumber daya alam prioritas masing-masing kecamatan;
7) Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok melalui platform digital dan marketplace (e-smart IKM);
8) Pembangunan industri hijau dengan mengadopsi dan berkolaborasi dengan konsep Sigi Hijau, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs); dan
9) Pemberdayaan, pembiayaan kelembagaan IKM dan penguatan konektivitas struktur industri kecil dan menengah.

Sejalan dengan Pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah, maka pembangunan industri Kabupaten Sigi juga dilakukan secara *holistic, integrative thematic,* dan *spatial* sehingga ada konektivitas dan sinergitas dalam perwilayahan yang berlangsung dari hulu ke hilir.

Tabel 2.7
Industri Prioritas Kabupaten Sigi 2020-2040

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri				Wilayah Potensial
		2019-2024		2024 - 2029	2029-2034	
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan				
		A	Pengolahan Makanan, Minuman berbahan baku Buah-Buahan, UmbiUmbian dan Sayur-Sayuran Khas Sigi.			
			- Pengolahan Makanan dan cemilan/ keripik berbahan baku Buah-Buahan (Buah Naga, pisang, Mangga, Nangka dan Popaya California dll)	- Suplemen dan pangan fungsional berbasis berbahan baku BuahBuahan (Buah Naga, pisang, Mangga, Nangka dan Pepaya California dll)	- Buah-buahan dalam kaleng	Seluruh Kecamatan,
			- Pengolahan Ubi Ungu (Tortila)		- Sayuran organik dalam kemasan dan produk turunan lainnya	(Kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Nokilalaki, Dolo, Dolo Barat, Dolo Selatan, Marawola, Marawola barat, Kinavaro, Gumbasa, Tanambulava, Lindu, Kulawi Kulawi Pipikoro) Selatan,
			- Pengolahan Minum berbahan Baku Buah-Buahan			
			- Pengolahan Rebung bambu			
			- IKM aneka olahan biji kopi khas Sigi			Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi selatan
		B	Industri Pengolahan Biji Kopi			
			- Produk bawang goreng dengan berbagai bentuk kemasan	- Diversifikasi Produk bawang goreng	- Produk bawang goreng dengan kemasan dan kualitas tinggi	Kecamatan Sigi Biromaru, kecamatan Dolo
					- Produk bawang goreng organik	
		C	Industri Pengolahan Gula			
			- Gula Merah	- Minuman Sirup berbahan baku Gula aren	·	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi
			- Gula semut			
		D	Industri berbahan baku Ikan Air Tawar			
			- Industri berbahan baku Ikan air tawar	- Pengolahan ikan air tawar menjadi tepung ikan, nugget ikan, bakso ikan, abon ikan, krupuk ikan dan masih banyak produk yang lainnya.	- Ikan kaleng	Kecamatan Dolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Sigi Biromaru,
			- Olahan Abon Ikan Mujair	- Pangan fungsional berbasis limbah industri hasil ikan air tawar	- berbagai Industri bahan baku Ikan dan produk hasil perikanan darat turunan lainnya	
			- Olahan Ikan Filet.	- Industri pengolahan minyak ikan air tawar dan suplemen ikan		
			- Pengolahan ikan air tawar menjadi tepung ikan, nugget ikan, bakso ikan, abon ikan, krupuk ikan dan masih banyak produk yang lainnya.			
		E	Industri Pengolahan Berbahan baku Daging Ternak			
			- Pengolahan daging ternak (ayam potong, sapi, Domba ekor gemuk	- Pengolahan limbah ternak menjadi biogas.	· Pengolahan daging kaleng	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Gumbasa
			- Pengolahan/pen yakan kulit ternak	- Pengolahan Daging hasil peternakan sapi dan domba ekor gemuk		

2	**Industri Hulu Agro**						
		A	**Industri Pengolahan Kelapa Terpadu**				
			- Air kelapa dalam kemasan	- Santan bubuk dan cair	· Carbon aktif	Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Marawola, Kecamatan Gumbasa	
			- Briket arang	- Tepung kelapa			
			- Nata de coco	- Asap cair			
		B	**Industri Pengolahan Minyak Atsiri (Cengkeh)**				
			- Industri penyulingan minyak atsiri	- · Diversifikasi minyak dari daun Cengkeh	· Produk turunan minyak atsiri dari olahan berbahan baku alternative lainnya.	Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi	
			- minyak atsiri				
		C	**Industri olahan coklat**				
			- Coklat Pasta	- Bubuk coklat	Coklat untuk konsumsi rumah sakit	Kecamatan Palolo	
			- Makanan dan minuman dari coklat	- Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao			
			- Lemak coklat		Produk coklat dengan kualitas tinggi		
			- Diverifikasi produk cokelat				
		D	**Industri Pakan**				
			- Pakan ternak	- Pakan Ternak dalam kemasan	Pakan ternak dalam kemasan	Kecamatan Sigi Boromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Gumbasa	
No.	**Industri Prioritas**	**Jenis Industri**				**Wilayah Potensial**	
		2019-2024		**2024 - 2029**	**2029-2034**		
3							
		A.	**Industri Furniture dan pengolahan Kayu**				
			- Furniture kayu	- Furniture kayu.	Furniture kayu dan kerajinan lainnya	Kecmatan Kulawi, Kecamatan Palolo, Kecamatan Nokilalaki	
			- Industri penggergajian kayu	- Industri penggergajian kayu			
		B	**Industri Kerajinan Rotan dan Bambu**				
			- Kerajinan furniture bebahan baku	- Kerajinan dan Meubel Rotan atau bambu	Kerajinan berbahan baku limbah industri pengolahan Rotan dan bambu	Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki	
			- Rotan dan	- Kerajinan anyaman Rotan dan bambu yang memiliki nilai tinggi	Kerajinan Rotan dan bambu yang memiliki nilai tinggi		
			- Bambu				
		C	**Industri Pengolahan Batako**				
			- Industri Pembuatan Batako	- Industri Batako berkulitas tinggi	Industri Batako berkulitas tinggi	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo	
			- Industri pembuatan pot dan kerajinan lainnya	- Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat (Gerabah)	Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat		

Sumber : Sigi dalam Angka Tahun 2024, diolah kembali

Berdasarkan penjabaran diatas, maka ditetapkan kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Sigi berupa kawasan sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 253 Ha. (dua ratus lima puluh tiga hektar) terdapat di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Marawola,

Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Sigi Kota, Dan Kecamatan Tanambulava.

7. Kawasan Pariwisata

Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan Pariwisata mengikuti Konsep pengembangan 3A (*Access*, *Accommodation*, *Attraction*). Konsep 3A mengungkapkan pentingnya mengembangkan Objek Wisata dengan mendukung faktor-faktor wisatawan yang datang ke Objek Wisata seperti Aksesibilitas ke Objek wisata, Akomodasi untuk para wisatawan, dan penjagaan nilai-nilai Atraksi dari sebuah Objek Wisata.

Kriteria Penetapan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

- kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat:
    1. meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
    2. mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
    3. tidak mengganggu fungsi lindung;
    4. tidak mengganggu upaya kelestarian sumberdaya alam;
    5. meningkatkan pendapatan masyarakat;

6. meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
7. meningkatkan kesempatan kerja;
8. melestarikan budaya lokal;
9. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep 3A di atas, dan berdasarkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sigi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka rencana pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi dilakukan melalui:

1. Pengembangan paket wisata alam yang memanfaatkan keindahan dan keunikan alam pada kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Taman Wisata Alam Wera, dan Taman Hutan Raya Ngatabaru.
2. Perintisan dan pengembangan Desa Wisata menjadi Desa Wisata yang maju dan mandiri berbasis keunikan alam, keunikan budaya, dan keunikan aktifitas ekonomi kreatif yaitu: Desa Sibedi, Desa Balane, Desa Toro, Desa Mataue, Desa Lawua, Desa Kalukutinggu, Desa Karunia, Desa Kaleke, Desa Tomado, Desa Wayu, Desa Bora dan beberapa Desa Lainnya.
3. Pengembangan keunikan wisata budaya di Kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan dan Lindu (Atraksi).
4. Pengembangan Kawasan-kawasan Wisata alam lainnya sesuai potensi yang ada sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
5. Pengembangan infrastruktur jalan ke destinasi wisata yang saat ini sebagian besar masih dalam kondisi yang kurang bagus dan

pembangunan infrastruktur pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lainnya.

Selain itu juga direncanakan *Botanical Garden Agroecoedutourism* sebagai kawasan pariwisata seluas 78 Ha. (tujuh puluh delapan hektar) di Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 660-174 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kebun Raya Kabupaten Sigi.

8. Kawasan Permukiman

a. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana pengembangan sistem perkotaan bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fungsi serta peran yang dimiliki setip masing-masing kawasan dan pengembangan sistem perkotaan dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan, adapun permukiman perkotaan Kabupaten Sigi terdiri dari wilayah yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan.

b. Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Adapun kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Sigi

yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lokal yaitu pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang ditetapkan di Kabupaten Sigi terbagi menjadi kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi dan kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa penampalan diatas pola ruang meliputi rawan bencana likuifaksi tinggi, gerakan tanah, rawan bencana banjir, dan sempadan patahan aktif (*active fault*).

1. **Kawasan Rawan Bencana Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Lindung**

   Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sigi berupa kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi atau yang ditetapkan dalam ZRB 4 dengan kriteria zona likuifaksi masif pasca gempa (4L).

   Bencana likuifaksi ini merupakan pertama kalinya terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7.4 Skala Richter yang mengguncang Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong pada 28 September 2018. Penetapan kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi ditetapkan seluas kurang lebih 250 hektar mencakup wilayah terdampak likuifaksi di Kabupaten Sigi yaitu Desa Sidondo I, Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru, dan Desa Sibalaya Kecamatan Tanambulava.

2. Kawasan Rawan Bencana Yang Tidak Ditetapkan Sebagai Kawasan Lindung berupa Penampalan

a. Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan dalam peta pola ruang diatas peruntukkan dasar. Peta hasil penampalan *(overlay)* sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai penampalan terhadap pola ruang di Kabupaten Sigi terdiri dari :

b. Rawan bencana likuifaksi tinggi di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Marawola, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Sigi Kota dan Kecamatan Tanambulava;
c. Rawan gerakan tanah tinggi di Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Sigi Kota dan Kecamatan Tanambulava;
d.
e. Rawan bencana banjir tinggi di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan

Marawola, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, dan Kecamatan Tanambulava; dan

f. Kawasan sempadan sesar aktif di Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Gumbasa.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas dan jenis kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai penampalan terhadap pola ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

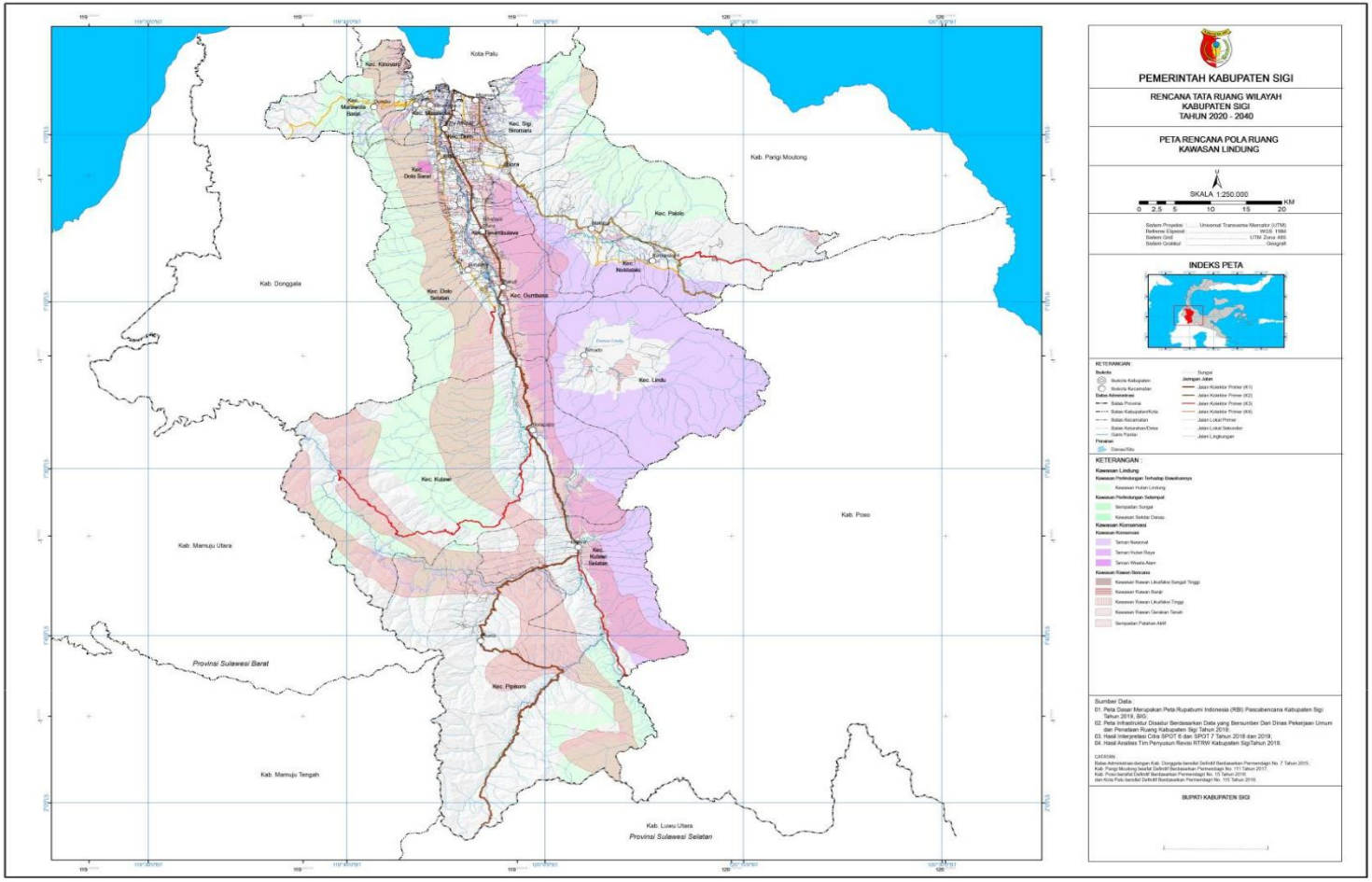
Tabel 2.8
Luas Dan Jenis Peruntukkan Ruang Diatas Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Total
Rawan Bencana Likuifaksi Tinggi	Sempadan Sungai	92,33	**2.343,46**
	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	1.706,14	
	Kawasan Perkebunan	137,33	
	Kawasan Permukiman Perdesaan	179,77	
	Kawasan Permukiman Perkotaan	227,89	
Rawan Gerakan Tanah Tinggi	Kawasan Hutan Lindung	51.835,33	**147.892,26**
	Sempadan Sungai	1.041,91	
	Taman Nasional	32.314,13	
	Taman Wisata Alam	342,02	
	Kawasan Hutan Produksi	1.487,72	
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	28.116,95	
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	3.596,91	
	Kawasan Pariwisata	45,27	
	Kawasan Perkebunan	26.201,76	
	Kawasan Permukiman Perdesaan	392,6	
	Kawasan Permukiman Perkotaan	152,56	
	Kawasan Pertanian Hortikultura	104,75	
	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	2.228,21	
	Sentra Industri Kecil Menengah	32,14	

Kawasan Sempadan Sesar Aktif	Kawasan Hutan Lindung	0,81	**1004,07**
	Sempadan Sungai	13,67	
	Kawasan Perkebunan	588,26	
	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	277,99	
	Sentra Industri Kecil Menengah	2,95	
	Kawasan Permukiman Perdesaan	99,17	
	Kawasan Permukiman Perkotaan	21,22	
	Taman Nasional	1,08	**4848,21**
	Kawasan Sekitar Danau	42,67	
	Sempadan Sungai	1.277,89	
	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	2.263,60	
	Kawasan Perkebunan	976,15	
	Kawasan Permukiman Perdesaan	257,07	
	Kawasan Permukiman Perkotaan	29,75	
	Jumlah	**156.088,00**	**156.088,00**

Sumber : *Sigi dalam Angka Tahun 2024, diolah kembali*

Gambar 2.7
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Sigi



2.1.4 Aspek Demografi

Berdasarkan publikasi BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Sigi tahun 2024 sebanyak 266.660 Jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 136.51 jiwa atau 51.19 persen, penduduk perempuan sebanyak 130.14 jiwa atau 48,80 persen dan mencapai 270.189 jiwa di Tahun 2024. komposisi penduduk laki-laki sebanyak 138.405 jiwa atau 51.23 persen, penduduk perempuan sebanyak 131.784 jiwa atau 48,77 persen.

Terjadinya kenaikan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kepadatan penduduk Kabupaten Sigi dari Tahun 2022–2024, dengan tingkat kepadatan antar kecamatan yang tidak merata. Peningkatan kepadatan ini dari Tahun 2022 mencapai 52 jiwa/Km2 menjadi 52 jiwa/Km2 pada Tahun 2024 dan Tahun 2024 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Dolo sebesar 1113 jiwa/Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Pipikoro, dengan kepadatan sebesar 10 jiwa/Km2.

Data selengkapnya mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Sigi disajikan pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2022, 2022, 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah 2019-2020	Luas Wilayah 2021-skrg	2022		2023		2024	
				JP	KP	JP	KP	JP	KP
1	Pipikoro	956,13	956,13	8.704	9	8.615	9	9.250	10
2	Kulawi Selatan	418,12	418,12	9.839	24	9.772	23	9.883	24
3	Kulawi	1.053,56	1.053,56	16.420	16	16.305	15	16.324	15
4	Lindu	552,03	552,03	5.584	10	5.557	10	6.133	11
5	Nokilalaki	75,19	75,19	5.824	77	5.731	76	6.090	81
6	Palolo	626,09	581,48	30.221	52	29.983	52	30.068	52
7	Gumbasa	176,49	176,49	13.663	77	13.578	77	13.215	75
8	Dolo Selatan	584,71	584,71	17.355	30	17.284	30	17.896	31
9	Dolo Barat	112,18	112,18	15.235	136	15.183	135	15.438	138
10	Tanambulava	56,33	56,33	9.899	176	9.895	176	9.894	176
11	Dolo	36,05	21,79	23.206	1065	23.206	1065	24.244	1113
12	Sigi Biromaru	289,6	175,29	48.053	274	48.775	278	46.554	266
13	Sigi Kota*		173,1	16.274	94	10.794	62	18.063	104
14	Marawola	38,65	38,65	29.786	771	16.121	417	30.267	783
15	Marawola Barat	150,51	150,51	5.871	39	30.068	200	5.532	37
16	Kinovaro	70,38	70,38	10.878	155	5.789	82	11.338	161
Kab. Sigi 2024		**5.196,02**	**5.196,02**	**266.812**	**51**	**266.654**	**51**	**270.189**	**52**

Sumber : *Sigi dalam Angka Tahun 2024, diolah kembali*

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu misalnya, secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi.Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, sementara berdasarkan umur dikelompokkan menurut ukuran rentang usia tertentu.

Tabel 2.11
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2022-2024

Kelompok Umur	2022			2023			2024		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
0 – 4	12.000	11.424	23.424	11,91	11,36	23,27	8.544	7.931	16.475
5 – 9	12.126	11.349	23.475	11,78	11,22	23,00	12.387	11.502	23.889
10 – 14	12.038	11.410	23.448	11,95	11,16	23,11	12.541	11.354	23.895
15 – 19	11.326	10.554	21.880	11,71	10,92	22,63	10.117	9.766	19.883
20 – 24	10.774	10.484	21.258	10,97	10,47	21,44	12.613	12.681	25.294
25 – 29	11.192	10.683	21.875	10,73	10,43	21,16	11.481	10.800	22.281
30 – 34	11.089	10.550	21.639	10,73	10,29	21,02	10.594	9.956	20.550
35 – 39	10.754	9.944	20.698	10,48	9,87	20,35	10.345	9.716	20.061
40 – 44	10.031	9.503	19.534	9,99	9,35	19,34	10.845	10.198	21.043
45 – 49	9.231	8.551	17.782	9,22	8,69	17,91	9.978	9.443	19.421
50 – 54	7.592	7.401	14.993	7,97	7,48	15,45	8.774	8.248	17.022
55 – 59	6.187	5.951	12.138	6,34	6,18	12,52	6.816	6.680	13.496
60 – 64	4.789	4.645	9.434	4,93	4,75	9,68	4.920	4.866	9.786
65 - 69	3.416	3.363	6.779	3,54	3,49	7,03	3.493	3.506	6.999
70 - 74	2.184	2.231	4.415	2,26	2,31	4,57	2.343	2.314	4.657
75 +	1.948	2.092	4.040	2,02	2,18	4,20	2.614	2.823	5.437
Kabupaten Sigi	**136.677**	**130.135**	**266.812**	**136,510**	**130,140**	**266,66**	**138.405**	**131.784**	**270.189**

Sumber : Sigi dalam Angka Tahun 2025, diolah kembali

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek

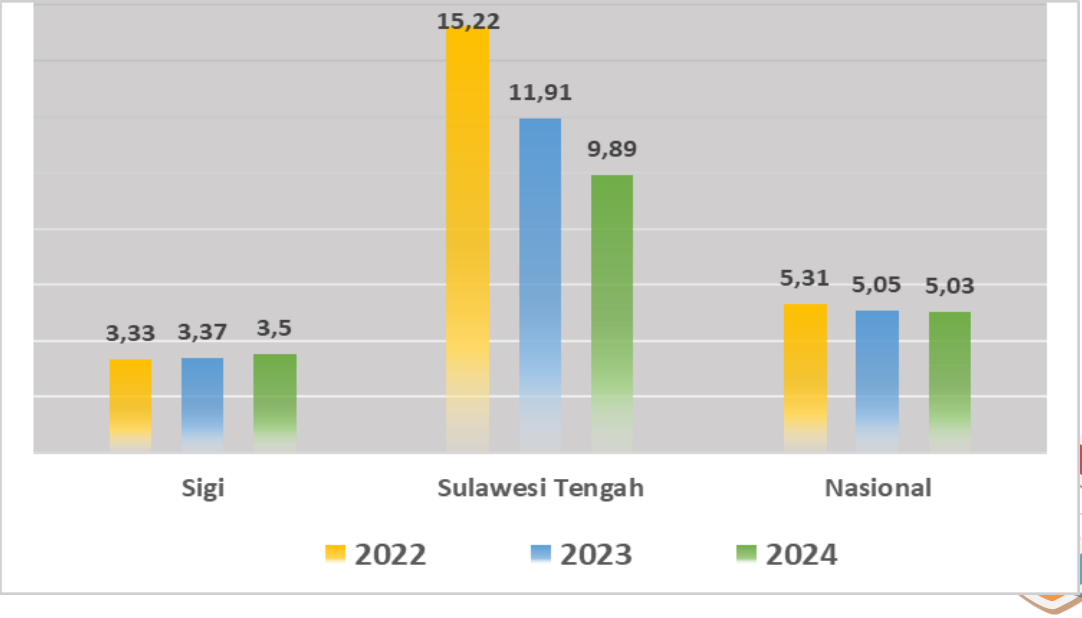
kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan ekonomi, dan (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial budaya. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, TPT, TPAK, angka kemiskinan dan rasio penduduk miskin

a. Pertumbuhan Ekonomi

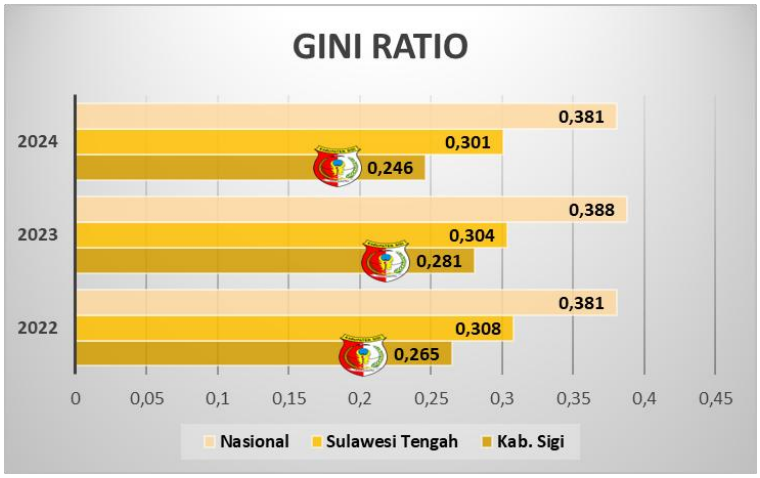
Kondisi ekonomi makro Kabupaten Sigi selama lima tahun (2020-2024) menunjukan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,50% atau mengalami kenaikan sebesar 0,13% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,37%. Pertumbuhan Ekonomi masih lebih rendah jika dibandingakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9,89%. dan masih berada dibawah Pertumbuhan Ekonomi secara nasional sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022- 2024 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini



b. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Sigi setiap tahunnya cenderung fluktuatif, yaitu pada tahun 2024 sebesar 0,281 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,246. Ini berarti bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan Kabupaten Sigi tergolong sedang. Data ketimpangan pendapatan disajikan pada Grafik 2.4.

Grafik 2.4. Indeks Gini Tahun 2022 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

c. Kemiskinan

Capaian angka kemiskinan Kabupaten Sigi pada tahun 2024 sebesar 12,06% menurun 0,77 dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu 12,83%. Capaian penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sigi masih berada di atas Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 11,77%. Jika dibandingankan dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi memiliki persentase penduduk miskin nomor 5 (lima) terendah setelah Kabupaten Morowali Utara yaitu dengan persentase penduduk miskin 11,95%. selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.16
K e m i s k i n a n
Periode 2022–2024 Kabupaten Sigi

PENDUDUK MISKIN (000 JIWA)		
2022	**2023**	**2024**
29,94	31,47	29,80
PERSENTASE MISKIN (%)		
2022	**2023**	**2024**
12,30	12,83	12,06
GARIS KEMISKINAN (RP/Kapita/bulan)		
2022	**2023**	**2024**
409.679	445,106	463.011
INDEKS KEDALAMAN (P1)		
2022	**2023**	**2024**
2.01	2,40	2,52
INDEKS KEPARAHAN (P2)		
2022	**2023**	**2024**
0.48	0,62	0,7

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Capaian TPAK Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebesar 75,92% mengalami peningkatanan 1,37% dari tahun 2024 sebesar 70,94%. Capaian Kabupaten Sigi pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 73,74% tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel : Perkembangan Tingkat pengangguran Kabupaten Sigi Tahun 2022 - 2024

NO	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	261.676	266.660	270.189
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,69	70,94	75,92
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,02	2,60	3,80
4	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,98	97,40	97,45

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

1. **Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2024, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sigi meningkat sebesar 0,33 persen. Pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sigi tercatat sebesar 70,15 tahun, dan sebelas tahun kemudian atau di tahun 2024 mencapai 70,48 tahun.

2. **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 yaitu 0,89% yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,87%. Data capaian kinerja didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Faktor-faktor yang melatar belakangi keberhasilan ini diantaranya terjalinnya komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan serta penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan Genre Kit, BKB Kit,BKL.Kit dan KIE Kit.



3. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

   IPG Kabupaten Sigi tahun 2024 dengan Indeks 94,37 mengalami kenaikan 0,10 dari tahun 2024 dengan indeks 94,3. capaian IPG Kabupaten Sigi berada diatas Propinsi Sulawesi Tengah dengan Indeks 92,89.

4. **Prevelensi Balita Gizi Buruk**

   Pada tahun 2024 prevalensi gizi buruk di Kabupaten Sigi sebesar 0,04%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2019-2024 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun

5. **Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Pembangunan Pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sigi telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis.

Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) merupakan salah satu sub komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Sigi. Pada indikator ini terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sigi pada tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sigi tahun 2024 masih berada di atas rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 8,96 dan juga berada di atas rata-

rata Nasional di angka 8,77. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sigi masuk kategori tinggi seperti tertuang dalam Tabel 2.17

Tabel 2.17
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2022-2024
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional

RATA RATA LAMA SEKOLAH'			
	2022	2023	2024
SIGI (Tahun)	8,82	8,84	9,03
SULAWESI TENGAH (Tahun)	8,89	8,89	8,96
NASIONAL(Tahun)	8,54	8,69	8,77

Sumber : BPS indikator sosial ekonomi 2025 BRS Kab. Sigi

6. Angka Harapan Lama Sekolah

Pada metode lama Indeks pendidikan dihitung dari dua komponen yaitu Angka Melek Huruf *(Literacy Rate/ Lit)* dan Angka Rata-rata Lama Sekolah *(Mean Years of Schooling/MYS)* penduduk berusia 15 Tahun ke atas. Pada metode baru Indeks pendidikan dihitung dari dua komponen yang berbeda yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah *(Mean Years of Schooling/ MYS)* penduduk berusia 25 Tahun ke atas dan Angka Harapan Lama Sekolah *(Expected Years of Schooling/ EYS).*

Angka Harapan lama sekolah di Kabupaten Sigi adalah 12.97 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 13,05 pada Tahun 2024, artinya lamanya pendidikan yang dicapai oleh setiap anak sudah sampai pada tingkat perguruan tinggi yaitu 13,05 tahun. Angka tersebut masih berada di bawah HLS Provinsi Sulawesi Tengah dan di bawah HLS Nasional.

Tabel 2.18
Angka Harapan Lama SekolahTahun 2022-2024
Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

HARAPAN LAMA SEKOLAH			
	2022	2023	2024
SIGI (Tahun)	12,88	12,97	13,05
SULAWESI TENGAH (Tahun)	13,23	13,32	13,33
NASIONAL (Tahun)	13,08	13,10	13,15

Sumber : BRS Kabupaten Sigi Maret 2025 dan BPS Pusat Tahun 2025

7. Angka Harapan Hidup

Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kondisi kesehatan penduduk tersebut dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi derajat kesehatannya dan dari sisi status kesehatannya. Derajat kesehatan penduduk dapat diukur melalui Angka Harapan Hidup *(Life Expectancy at Birth),* yang merupakan indikator penting dalam penghitungan IPM.

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sigi tahun 2024 berada di atas angka Provinsi Sulawesi Tengah namun masih berada di bawah Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.19
Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024

UMUR HARAPAN HIDUP (UHH)			
	2022	**2023**	**2024**
SIGI (Tahun)	70,87	70,91	71,11
SULAWESI TENGAH (Tahun)	70,41	70,49	70,66
NASIONAL (Tahun)	73,46	73,7	73,93

Sumber : BRS Kab. Sigi Maret 2025 dan BPS Pusat Tahun 2025.

8. Daya beli/Pengeluaran Perkapita penduduk

Pengeluaran konsumsi merupakan variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pengeluaran konsumsi perkapita adalah variabel yang cukup penting sebagai alat pemantau perkembangan standar hidup penduduk di suatu wilayah.

Dalam perkembangannya Tahun 2023 pengeluaran perkapita penduduk Sigi mencapai Rp. 8.489.000 (delapan juta Empat Ratus Sembilan puluh Delapan ribu rupiah) meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp.8.891.000 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.20
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024

PENGELUARAN PER KAPITA (Ribu rupiah/Tahun)			
	2022	**2023**	**2024**
SIGI	8171	8.498	8.891
SULAWESI TENGAH	9,378	9.696	10.149
NASIONAL	11,156	11479	11.899

Sumber : BRS Kabupaten Sigi dan BPS Pusat Tahun 2025.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Seni Budaya

Jumlah Grup Seni per 10.000 penduduk yang ada di Kabupaten Sigi mengalami kenaikan hingga 2024. Hal ini disebabkan adanya motivasi bagi para anak muda untuk lebih kreatif dalam membuat karya seni karena terinspirasi dari beberapa grup seni tersebut mampu untuk berprestasi sampai tingkat Nasional. Adapun grup seni tersebut terdiri atas seni tari, seni musik, seni rupa dan seni teater.

2. Olahraga

Indikator Kepemudaaan dan olahraga dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Semakin baik perkembangan dalam bidang kepemudaan dan olahraga, serta semakin membutuhkan pengelolaan yang baik. Selain klub olahraga, fokus olahraga juga dapat difokuskan pada indikator ketersediaan gedung olahraga

di mana gedung olahraga adalah suatu sarana pendukung kegiatan olahraga warga Kabupaten Sigi. Perkembangan terhadap fokus olahraga di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 2.22 di bawah ini :

Tabel 2.22
Realisasi Indikator Fokus Olahraga Kabupaten Sigi

NO	Cabang Olahraga	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	-	4	20	5	-	Orang
2	PERBASI (Persatuan Basket Seluruh Indonesia)	-	-	1	-	-	Orang
3	PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia)	-	-	1	-	-	Orang
4	PERGATSI (Persatuan Getball Seluruh Indonesia)	-	-	9	-	-	Orang
5	FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonsesia)	-	8	10	7	-	Orang
6	FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia)	-	-	9	-	-	Orang
7	IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia)	-	-	12	-	3	Orang
8	PSTI (Persatuan Sepak Takrau Indonesia)	-	-	3	-	-	Orang
9	TI (Taekwondo Indonesia)	-	5	14	5	-	Orang
10	PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia)	-	-	2	-	-	Orang
11	PERTINA (Persatuan Tinju Amatir Indonesia)	-	1	6	-	2	Orang
12	ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia)	-	-	3	-	-	Orang
13	PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia)	-	-	3	-	-	Orang
14	PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia)	-	2	13	-	-	Orang
15	FOPI (Federasi Olahraga Petanque Indonesia)	-	-	8	-	-	Orang
	TOTAL	-	20	114	17	5	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sigi

2.2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan indikator variabel aspek pelayanan umum dilihat berdasarkan fokus urusan wajib dan urusan pilihan yaitu:

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada urusan pendidikan Kabupaten Sigi.

Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat 268 unit dan 13 Unit Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdapat 68 unit dan 30 Unit Madrasah Tsanawiyah. Jumlah murid yang tercatat pada SD sebanyak 25.942 dan 1.300, SMP sebanyak 8.273dan 1.991 orang.

Tabel 2.23
Data Sekolah Dasar
di Kabupaten Sigi TA. 2024/2025

Kecamatan	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah Sekolah SD (Negeri+ Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri)	Jumlah Guru SD (Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri+ Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri)	Jumlah Murid SD (Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri+ Swasta)
Pipikoro	4	17	21	46	69	115	231	723	954
Kulawi Selatan	9	3	12	97	8	105	907	120	1027
Kulawi	19	6	25	186	25	211	1137	212	1349
Lindu	10	2	12	113	7	120	510	67	577
Nokilalaki	6	1	7	59	10	69	455	310	765
Palolo	26	1	27	298	11	309	2760	100	2860
Gumbasa	10	1	11	113	5	118	1142	41	1183
Dolo Selatan	15	1	16	162	7	169	1498	63	1561
Dolo Barat	18	1	19	257	7	264	1551	84	1635
Tanambulava	8	1	9	90	5	95	854	51	905
Dolo	16	2	18	205	13	218	2029	147	2176
Sigi Biromaru	34	6	40	439	57	496	4632	710	5342
Sigi Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marawola	16	4	20	214	79	293	2365	1131	3496
Marawola Barat	8	9	17	103	56	159	320	541	861
Kinovaro	12	2	14	147	16	163	1174	77	1251
Sigi	**211**	**57**	**268**	**2529**	**375**	**2904**	**21565**	**4377**	**25942**

Tabel 2.23
Data Sekolah Menengah Pertama
di Kabupaten Sigi TA. 2024/2025

Kecamatan	Jumlah Sekolah SMP (Negeri)	Jumlah Sekolah SMP (Swasta)	Jumlah Sekolah SMP (Negeri+ Swasta)	Jumlah Guru SMP (Negeri)	Jumlah Guru SMP (Swasta)	Jumlah Guru SMP (Negeri+ Swasta)	Jumlah Murid SMP (Negeri)	Jumlah Murid SMP (Swasta)	Jumlah Murid SMP (Negeri+ Swasta)
Pipikoro	2	1	3	21	5	26	79	47	126
Kulawi Selatan	3	-	3	53	-	53	628	-	628
Kulawi	7	-	7	103	-	103	599	-	599
Lindu	2	-	2	23	-	23	157	-	157
Nokilalaki	2	1	3	27	3	30	264	6	270
Palolo	7	-	7	118	-	118	1170	-	1170
Gumbasa	2	1	3	32	6	38	167	113	280
Dolo Selatan	4	-	4	65	-	65	505	-	505
Dolo Barat	4	1	5	78	9	87	557	75	632
Tanambulava	2	-	2	41	-	41	316	-	316
Dolo	1	2	3	36	10	46	473	137	610
Sigi Biromaru	9	3	12	164	14	178	1359	190	1549
Sigi Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marawola	3	1	4	73	7	80	729	55	784
Marawola Barat	5	1	6	56	4	60	195	58	253
Kinovaro	4	-	4	62	-	62	394	-	394
Sigi	**57**	**11**	**68**	**952**	**58**	**1010**	**7592**	**681**	**8273**

Sumber : BPS Kab. Sigi, Tahun 2025

a) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Tingkat partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun pada masing-masing jenjang pendidikan SD dan SLTP. APM mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah pada jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu). Tetapi APM memiliki kelemahan tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar

kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5-6 Tahun dan di atas 12 Tahun yang masih bersekolah di SD/Sederajat. Akibatnya APM tidak dapat mencapai angka maksimal yaitu 100 persen.

b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK SD umumnya di atas 100 karena banyaknya anak usia di luar 7-12 yang bersekolah di SD. Akibatnya APM dan APK dianggap kurang baik sebagai indikator partisipasi sekolah dalam MDGs. Indikator angka partisipasi sekolah sedikit berbeda dengan angka partisipasi kasar karena angka partisipasi kasar lebih menekankan pada keikutsertaan sekolah anak berdasarkan jenjang pendidikan sedangkan indikator angka partisipasi sekolah lebih menekankan pada keikutsertaan dari golongan usia pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan dasar jenjeng SD dan SMP sebagai implementasi program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Sigi. Pada Tahun 2024 mencapai 95.28 persen untuk usia SD dan 77,09,70 persen usia SMP. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD 100.67 persen dan 84.87 persen pendidikan SMP.

Tabel 2.24
Perkembangan APK, APM menurut Jenjang Pendidikan

Uraian	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2023	2024	2023	2024
SD/MI/Sederajat	94,09	95,28	102,03	100,67
SMP/MTs/Sederaja	73,70	77,09	88,98	84,87

Sumber : BPS Kabupaten Sigi Tahun 2025, diolah kembali

2. Urusan Kesehatan

Untuk memberikan pelayanan yang lebih merata, maka peranan puskesmas semakin dirasakan manfaatnya. Pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu terus dilakukan sehingga pada Tahun 2024 terdapat 1 (satu) Rumah Sakit, 19 (Sembilan belas) Puskesmas, 3 (tiga) poliklinik dan 49 (empat puluh sembilan) unit Puskesmas Pembantu. Sehubungan dengan penambahan fasilitas tersebut juga diikuti oleh penambahan tenaga kesehatan. Tahun 2024 tenaga kesehatan yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang dokter umum, dan 7 (tujuh) orang dokter gigi, 505 (lima ratus lima) orang bidan dan 307 (tiga ratus tujuh) orang perawat.

Tabel 2.25
Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Sigi

Kecamatan	Tenaga Kesehatan - Perawat	Tenaga Kesehatan - Bidan	Tenaga Kesehatan - Tenaga	Tenaga Kesehatan - Tenaga	Tenaga Kesehatan - Tenaga	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Keterapian	Jumlah Tenaga Keteknisan	Jumlah Tenaga Teknik	Jumlah Tenaga Kesehata
Pipikoro	25	23	8	14	4	4	3					
Kulawi Selatan	23	19	2	10	2	3	1					
Kulawi	23	35	6	15	2	4	2			1		
Lindu	22	21	6	5	3	3	2					
Nokilalaki	9	9	4	4	1	2	2					
Palolo	32	42	12	12	5	3	3			1		
Gumbasa	17	17	4	8	2	2	2					
Dolo Selatan	19	16	8	4	6	6	2					
Dolo Barat	31	33	12	13	5	5	3			1		
Tanambulava	12	18	6	8	3	3	2			1		
Dolo	20	37	14	12	4	3	5					
Sigi Biromaru	37	58	14	11	6	5	4			1		
Sigi Kota												
Marawola	30	49	18	12	5	5	8			4		
Marawola Barat	13	18	4	6	1	1	2			1		
Kinovaro	18	26	4	8	2	2	2			2		
Sigi	**331**	**421**	**122**	**142**	**51**	**51**	**43**			**12**		

Sumber : BPS, Kab. Sigi dalam Angka Tahun 2024, diolah kembali

Kecamatan	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Jumlah Klinik Pratama	Jumlah Posyandu
Pipikoro			1			
Kulawi Selatan			1			
Kulawi	1		1			
Lindu			1			
Nokilalaki				1		
Palolo			1			
Gumbasa			1			
Dolo Selatan				1		
Dolo Barat			1			
Tanambulava				1		
Dolo				1		
Sigi Biromaru	1		1			
Sigi Kota						
Marawola			1			
Marawola Barat				1		
Kinovaro				1		
Sigi	**2**		**9**	**6**		

Sumber : BPS, Kab. Sigi dalam Angka Tahun 2024, diolah kembali

a) Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima Tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.

Salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang kasus stunting terbilang masih cukup tinggi adalah Kabupaten Sigi. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Kesehatan bahwa angka kasus stunting di Sigi Tahun 2024 mencapai angka 33,0

Ada sebanyak 673 balita Stanting yang tersebar di beberapa desa sebagai lokasi sasaran dan orang tua asuh program terpadu percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan berbasis perangkat daerah, guna memperbaiki dan mewujudkan tumbung kembang anak dengan kualitas yang tinggi.

Tabel 2.16 : Angka Stunting Kabupaten/Kota Propunsi Sulawesi Tengah

NO	KAB/KOTA	2024			2023	KET
		STUNTING PARAH	STUNTING	TOTAL		
1	Banggai Kepulauan	5,5	22,9	28,4	27,7	0,7
2	Banggai	4,5	24,2	28,7	29,1	-0,4
3	Morowali	3,3	19,3	22,6	26,0	-3,4
4	Poso	4,2	16,9	21,1	26,5	-5,4
5	Donggala	7,3	22,3	29,6	34,1	-4,5
6	Toli-Toli	5,2	21,7	26,9	29,0	-2,1
7	Buol	10,8	26,1	36,9	30,0	6,9
8	Parigi Moutong	6,2	16,1	22,3	28,5	-6,2
9	Tojo Una-Una	5,1	11,4	16,5	21,3	-4,8
10	Sigi	8,4	24,6	33,0	26,4	6,6
11	Banggai Laut	4,5	22,1	26,6	25,6	1,0
12	Morowali Utara	2,8	17,6	20,4	24,7	-4,3
13	Kota Palu	6,5	19,1	25,6	22,1	3,5
	SULTENG			26,1	27,2	-1,1
	Prevalensi NAIK		Prevalensi TURUN			

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membentuk daya saing daerah. Pewujudannya dilakukan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, perencanaan dan pengendalian tata ruang, dan pengembangan perumahan.

Tabel 2.28
Realisasi indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Persentase panjang jalan kondisi baik	58,25	62,36	26,41
2	Persentase Jembatan kondisi baik	44,4	62,36	26,41
3	Persentase Penerima manfaat rumah layak huni	81,53	83,08	85,12
4	Persentase peningkatan Layanan Aresal Persawahar	50,19	62,22	26,41

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah rumah layak huni. Keberadaan rumah tidak layak huni menunjukkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial pada keluarga tersebut. Tahun 2024, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berkurang sebanyak 16,92 persen dimana ada sebanyak 59,904 RTLH berkurang sebanyak 11.156 RTLH.

Sedangkan persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani Tahun 2024 sebesar 6,39 persen.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mengembangkan investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja diperlukan stabilitas sosial dan politik. Untuk menciptakan iklim daerah yang kondusif, Pemerintah Kabupaten Sigi selalu melakukan pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP). Selain itu, setiap individu masyarakat harus membangun deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat. Hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah.

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan

dan Pemuda (OKP). selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP.

6. Urusan Sosial

Ada beberapa permasalahan dalam bidang sosial antara lain masih tingginya jumlah penduduk miskin, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, belum merata dan terkoordinasinya pelaksanaan berbagai kebijakan dan Program penanggulangan kemiskinan, belum optimalnya institusi yang menangani masalah kemiskinan kemudian ada pula permasalahan dibidang kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat antara lain rendahnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat, kurang tersedianya kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi masyarakat. Adanya faktor-faktor sosial ekonomi yang dapat memicu kerawanan sosial ekonomi dan konflik sosial konflik ekonomi. Terbatasnya kuantitas dan kualitas fasilitas sosial yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin.

Kinerja urusan sosial yang ditetapkan sebagai indikator sasaran, indikator yang pertama adalah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dan yang kedua adalah persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial dan ketiga adalah persentase penanganan PMKS ada sebanyak 516 yang tertangaani di tahun 2024 dan untuk korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhannya ada sebanyak 1.387 korban.

B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan sebagai berikut :

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan khususnya penanggulangan tingkat pengangguran merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang lebih terfokus agar upaya penanganan pengangguran benar-benar terarah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional mengingat masalah pengangguran mempunyai implikasi yang sangat luas bagi masalah sosial, politik dan keamanan. Untuk mengatasi masalah pengangguran perlu dibuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi para pencari kerja di Kabupaten Sigi.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk Angkatan kerja. Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sigi sebesar 75,92%. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2024 sebesar 2,55% hal ini menggambarkan dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Sigi terdapat sekitar 2 orang berstatus pengangguran.

Tabel 2.30
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi Tahun 2024

Kegiatan Utama *Main Activity*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Laki-Laki+ Perempuan *Male+Female*
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/*Economically Active*	89.261	63.377	152.638
1. Bekerja/*Working*	87.303	61.446	148.749
2. Pengangguran Terbuka/*Unemployment*	1.958	1.931	3.889
II. Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Active*	13.420	34.994	48.414
1. Sekolah/*Attending School*	8.003	8.233	16.236
2. Mengurus Rumah Tangga/*Housekeeping*	1.144	25.750	26.894
3. Lainnya/*Others*	4.273	1.011	5.284
Jumlah/*Total*	102.681	98.371	201.052

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025

2. Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam proses pembangunan peranan perempuan yang berwawasan atau berperspektif gender dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender karena selama ini masih banyak ditemui perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Sigi pada tahun 2024 pada angka 0,00016. Angka rasio KDRT dipengaruhi pada jumlah pada angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sigi. Untuk itu, diharapkan kedepannya perempuan akan lebih banyak berprestasi dalam pembangunan karena peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dari usaha pemberdayaan perempuan itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Tabel 2.31
Indikator DPPPA Kabupaten Sigi Tahun 2024

No.	Indikator	Tahun 2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4,82
2	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	100%
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	0,00018

3. Urusan Pangan

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Di Kabupaten Sigi telah dilaksanakan kegiatan dimaksud oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kinerja urusan pangan dijelaskan melalui ketersediaan pangan utama yaitu beras. ketersediaan pangan Kabupaten Sigi relatif aman dan terkendali. Pada Tahun 2024 persentase cadangan pangan mencapai 101,55 persen.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Berbagai aktivitas yang dilakukan manusia dengan tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya banyak daerah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Capaian penyelenggaraan urusan dinas lingkungan hidup dapat dilihat pada indikator Indeks kualitas lingkungan, persentase penanganan sampah Selengkapnya realisasi indikator urusan lingkungan hidup disajikan dalam Tabel 2.40 berikut ini :

Tabel 2.33

Realisasi indikator urusan lingkungan hidup

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024
1	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	79,78
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,33
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	97,48
4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	92,48
5	Persentase penanganan sampah	%	49,44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Penerbitan dokumen identitas penduduk yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk harus dimiliki oleh semua warga negara di mana hal ini merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak asasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 270.19 jiwa ditahun 2024 maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Sampai Tahun 2024 penduduk berusia 17 tahun ke atas yang melakukan perekaman KTP sebanyak 34.691 orang. Sedangkan untuk persentase anak usia 01-7 tahun yang memiliki KIA mencapai 76.847 orang

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sigi sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di

masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pemberdayaan masyarakat, penataan dan penguatan otonomi desa yang berbudaya, beradat dan partisipatif serta penguatan Pemerintahan desa.

Capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dimana indicator persentase pengentasan desa tertinggal pada tahun 2024 mencapai 31,37 persen Dimana jumlah desa teringgal sebanyak 13 desa, desa Berkembang sebanyak 64 desa, Desa Maju sebanyak 77 desa dan desa Mandiri sebanyak 22 Desa.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka mengatur kelahiran, maka pada setiap Kecamatan telah dibentuk klinik KB. Pada Tahun 2024 persentase peserta aktif KB modern sebanyak 27.219 orang dimana jumlah pasangan subur yang terdata sebanyak 42.828 pasangan. Di Kecamatan Sigi Biromaru yakni sebanyak 11 (sebelas) unit dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) unit yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan se-Kabupaten Sigi dengan jumlah PPKBD terbanyak berada di Kecamatan Palolo.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi, penduduk yang pernah menggunakan alat KB modern sebanyak 27.410 orang dan yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional sebanyak 191 orang.

8. Urusan Perhubungan

Pembangunan dibidang perhubungan dimaksudkan untuk mendukung pembangunan sektor-sektor lain salah satunya ialah

pembangunan sarana transportasi yang berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang, dan jasa baik ditingkat lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas, melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang perhubungan Kabupaten Sigi merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Urusan perhubungan terdiri dari 2 (dua) sektor yaitu sektor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP).

Jumlah dermaga penyeberangan yang ada di Kabupaten Sigi mengalami peningkatan, Pada Tahun 2024 jumlah dermaga penyeberangan sudah mencapai 3 (tiga) unit. Dimana data trayek angkutan penyebrangan berada di kecamatan lindu.

Jumlah pemasangan rambu-rambu setiap tahunnya hanya berjumlah 1 (satu) unit setiap Tahun, hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia untuk pemasangan rambu-rambu sangat terbatas.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada sub sektor telekomunikasi, kebutuhan akan informasi yang cepat menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Walaupun sarana telekomunikasi berupa telepon kabel dapat menjangkau beberapa kecamatan, namun perkembangan teknologi informasi berupa telepon genggam sudah dapat menjangkau seluruh Kecamatan.

Guna memberikan pelayanan informasi yang luas kepada masyarakat, ada sebanyak 23 layanan public yang diselenggarakan secara online guna untuk memberikan informasi dan data tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bisa di akses oleh Masyarakat luas.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sebagai pilar ekonomi daerah koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dirasakan sangat penting keberadaannya sehinggah harus tetap tumbuh dan berkembang. Alasannya ada empat yaitu mensejahterakan rakyat, menyelamatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta membangun pertumbuhan ekonomi. Perkembangan UKM dapat dipengaruhi oleh kondisi makro-ekonomi dan sektor ril. Sektor UMKM jika dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Namun di sisi lain, UMKM juga masih di hadapkan pada masalah yang mendasar yang secara garis besar mencakup Pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya. Kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha. Ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembanga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya Pelaku Usaha Kecil dan Mikro terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain.

Kinerja koperasi dapat diukur dari tingkat keaktifan koperasi dimana persentase koperasi aktif pada tahun 2024 mencapai 55 koperasi dan Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha sebanyak 3.980 dan usaha mikro keseluruhan sebanyak 18.293

11. Urusan Penanaman Modal

Realisasi pembangunan untuk urusan penanaman modal diukur dengan indikator antara lain jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (ribu), rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dan PMDN), dan Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta). Rasio daya serap tenaga kerja diperoleh dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMD dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Tahun 2024 persentase peningkatan investasi di kabupaten Sigi mencapai 139,82 persen

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sigi. Pada Tahun 2024 atlet yang berprestasi sebanyak 15 orang dengan jumlah medali yang diperoleh sebanyak 16 medali

Pembangunan dibidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa belum tersedia lapangan maupun gelanggang olahraga di Kabupaten Sigi.

13. Urusan Kebudayaan

Capaian pembangunan urusan kebudayaan dapat diukur melalui indikator kinerja daerah terkait penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Ada sebanyak 25 cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Sigi, dan semuanya tetap terjaga kelestariannya, hal ini disebabkan karena pencatatan yang setiap Tahun berkala dilakukan oleh Bidang Kebudayaan, dengan melibatkan para Juru Pelihara situs yang di Kabupaten Sigi serta hasil delineasi yang dilakukan Badan Pengelola Cagar Budaya Gorontalo yang membawahi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan bidang Kebudayaan Kabupaten Sigi serta laporan dari masyarakat.

14. Urusan Perpustakaan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi berdasarkan reviu Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi yaitu Pelayanan Arsip yang baik dan Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan yang baik. Pada tahun 2024 indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kabupaten Sigi dengan skor 69,09 tertinggi pada Tingkat kabupaten se propinsi Sulawesi Tengah.

15. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Pada tahun 2024 mencapai 66,62 persen arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dan 67,71 persen untuk arsip inaktif, Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional mencapai 58,58 persen.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten Sigi, yaitu bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kontribusi PDRB urusan perikanan diperoleh dari beberapa kegiatan yakni Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan Hasil Perikanan, jumlah total produksi perikanan (tangkap dan Budidaya) mencapai 1.201,9 ton dan jumlah total produksi perikanan yang ditetapkan sebanyak 1.200 ton hal ini menunjukkan kinerja yang mencapai 100,15 persen dari target yang direncanakan pada tahun 2024.

2. Urusan Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata selama Tahun 2024 dapat dilihat pada realisasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 23 wisatawan mancanegara dimana angka ini menunjukkan penurunan kunjungan yang pada tahun 2023 mencapai 23 wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan nusantara menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan mencapai 28.363 wisatawan nusantara dimana pada tahun 2023 mencapai 27.126 wisatawan nusantara.

Kunjungan wisata sangat dipengaruhi pada kegiatan promosi pariwisata melalui beberapa media antara lain *videotrone* promosi potensi pariwisata pada terminal kedatangan Bandara Mutiara Palu serta media

promosi lain seperti media sosial *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Website* perangkat daerah.

3. Urusan Pertanian

a) Pertanian

Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi diarahkan pada kawasan-kawasan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah, berada di daerah dataran rendah yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Tanambulava. dan Kecamatan Dolo, serta memiliki potensi untuk dapat dilalui jaringan irigasi alam dan buatan. Kawasan pengembangan pertanian lahan basah diarahkan pada desa-desa berlokasi di Kecamatan-kecamatan tersebut di atas dengan alokasi lahan untuk 30 Tahun mendatang seluas 33.697.00 Hektar. Pengembangan budidaya usaha tani merupakan usaha budidaya integral dan bersifat universal, dimana memandang kawasan sebagai titik sentral pembangunan komoditas dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sumberdaya lahan.

Peruntukan lahan untuk kawasan budidaya pertanian lahan kering memiliki prinsip yang relatif sama dengan pengembangan perencanaan untuk kawasan pertanian lahan basah, yaitu dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk komoditi pertanian lahan kering, kondisi topografi dan pengairan, status lahan, dan bukan merupakan bagian dari kawasan lindung.

Kawasan Pengembangan Pertanian Lahan Kering memiliki kemungkinan pengembangan menjadi Kawasan Perkebunan,

khususnya untuk kebun buah-buahan. Hal ini disebabkan karena kawasan perkebunan memiliki kesesuaian lahan yang hampir sama dengan pertanian lahan kering.

Walaupun lahan yang dialokasikan untuk pertanian lahan kering dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan, tetapi prioritas penggunaaan lahan tetap merupakan alokasi lahan untuk Pertanian Lahan Kering. Berdasarkan pada arahan RTRW Provinsi alokasi lahan untuk pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi adalah sebesar lebih kurang 16 ribu Ha. Tetapi, dengan melihat ketersediaan lahan yang ada, pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi dapat dikembangkan hingga 30.453.67 Ha yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi.

Dalam pengembangan pertanian Kabupaten Sigi ke depan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui usaha pertanian terpadu, pengembangan sistem pertanian organik dan sistem usaha agrbisnis; Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berdaya saing berbasis agribisnis untuk memenuhi kebutuhan pangan dan produk di dalam negeri dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan pangan; serta memanfaatkan pasar bahan baku industri pengolahan dalam negeri dan peluang eksport untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; Mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan tangguh, serta Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas petani *(Capacity building)* dan pelaku usaha agribisnis

untuk mampu mengakses teknologi, permodalan dan informasi pasar serta pengembangan kelembagaan petani.

Pengembangan pertanian organik merupakan salah satu strategi dalam upaya pengembangan komoditas pertanian yang memiliki daya saing baik pasar lokal maupun eksport. Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Data Tanaman Pangan kabupaten sigi untuk Padi dengan luas panen mencapai 21.053,5 hektare dan total produksi sebesar 110.290,3 ton. Produktivitas rata-rata sebesar 5,1 ton per hektare, Jagung dengan luas panen 11.705,5 hektare dan produksi sebesar 52.132,1 ton. Produktivitas sebesar 4,3 ton per hektare, Kedelai hanya 53 hektare dengan produksi 76 ton. Produktivitas sebesar 1,5 ton per hektare, Kacang tanah luas panen sebesar 152,5 hektare dan produksi 169,3 ton, dengan produktivitas yang masih rendah yakni hanya 1,01 ton per hektare dan Ubi Kayu lahan seluas 54,4 hektare, namun mampu menghasilkan produksi sebesar 1.138,2 ton dengan produktivitas tertinggi dari semua komoditas, yaitu 19,8 ton per hektare.

b) Perkebunan

Pengembangan Kawasan Perkebunan diarahkan tersebar secara merata di seluruh Kabupaten Sigi. Alokasi luas lahan kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2008-2038 adalah sebesar 55.718 Hektar. Pengembangan secara ekstensif untuk perkebunan masih dimungkinkan sepanjang komoditasnya adalah tanaman yang mempunyai fungsi pemeliharaan dan perlindungan terhadap air dan tanah.

Pengembangan kawasan perkebunan memiliki arti penting dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi. Mengingat kontribusi sektor perkebunan yang cukup berarti dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, serta fungsi perlindungan terhadap lingkungan, maka upaya secara ekstensif masih dapat dilakukan.

Penetapan rencana kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk kawasan perkebunan rakyat dengan beragam jenis-jenis komoditas perkebunan yang terdapat di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 87.879 hektar. Namun demikian, didalam peruntukan kawasan perkebunan terdapat juga kawasan hutan adat seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar di Kecamatan Kulawi.

Penetapan rencana kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi diarahkan untuk kawasan perkebunan rakyat dengan beragam jenis-jenis komoditas perkebunan yang terdapat di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 87.879 hektar. Namun demikian, didalam peruntukan kawasan perkebunan terdapat juga kawasan hutan adat seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar di Kecamatan Kulawi.

Realisasi komoditas perkebunan di Kabupaten Sigi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Produksi Tanaman Perkebunan Utama
di Kabupaten Sigi Tahun 2024

Komoditi	Jumlah Tanaman (Pohon)	TM (Tanaman Menghasilkan)	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/Ha)
Kelapa	6312	4.287	3.069.450	716
Cengkeh	404	61	23.875	391
Kakao	28258	20.140	19.499.065	968
Kemiri	1089	598	259.974	435
Kopi Robusta	3532	962	500.606	520
Panili	155	30	7.605	254
Pala	934	8	3.000	375
Lada	0	0	0	0
Jambu Mete	10	5	2.500	500
Kopi Arabika	489	183	7.433	41
Aren	34	15	300	20
Kelapa Sawit	150	50	22.500	450

Sumber : BPS kabupaten Sigi

c) Peternakan

Populasi ternak merupakan salah satu indikator yang mendapat pertimbangan pada suatu daerah, demikian pula Kabupaten Sigi peningkatan populasi menjadi pokok tujuan dalam upaya pengembangan peternakan. Populasi ternak tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.38
Populasi Ternak di Kab.Sigi Tahun 2024

TERNAK SAPI		TERNAK KAMBING		TERNAK
BALI	LOKAL	PE	LOKAL	BABI
	215	9	437	127

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kab.Sigi

4. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Capaian penyelenggaraan urusan perdagangan dapat di lihat dari banyaknya tempat perdagangan yang ada. Di kabupaten Sigi ada sebanyak 96 Rumah makan/Restoran. Untuk pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuannya ada sebanuak 8 pelaku usaha. Di tahun 2024 jumlah industry kecil dan menengah di kabupaten sigi mencapai 2.120 yang tersebar di 16 Kecamatan. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan proses jual beli.

5. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain transmigrasi bertujuan untuk pemerataan dan penyebaran penduduk dalam satu wilayah potensial serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Pada Tahun 2024 pembangunan transmigrasi difokuskan pada revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo yang terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yaitu SKP A, SKP B dan SKP C dimana terdapat 3 (tiga) Satuan Permukiman Transmigrasi di dalamnya yaitu Satuan Permukiman Lembantongoa SP1, Lembantongoa SP2 dan Bulupountu SP3zxz

Penempatan transmigrasi dilaksanakan pada akhir Tahun 2018 sejumlah 50 kepala keluarga (KK) di satuan Permukiman (SP) 3 Bulupountu sebagai langkah cepat pemerintah daerah Kabupaten Sigi dan pemerintah pusat dalam penanganan bencana alam gempa dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018. Penempatan di Tahun 2019 di 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu 50 kepala keluarga (KK) di Satuan permukiman (SP)2 Lembantongoa Kecamatan Palolo dan 50 kepala

keluarga (KK) di satuan permukiman (SP)3 Bulupountu Kecamatan Sigi Kota. Masyarakat yang ditempatkan diperioritaskan pada transmigrasi penduduk setempat (TPS) guna percepatan penanganan penanggulangan bencana alam gempa dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018.

2.2.5 Aspek Daya Saing

Aspek Daya saing merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat atau menggambarkan perkembangan suatu wilayah. Makin tinggi daya saing suatu daerah, makin tinggi pergerakkan dan aktivitas ekonomi yang dapat dicapai daerah tersebut. Keterbatasan infrastruktur daerah yang merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing daerah menjadi kendala atau hambatan dalam memanfaatkan segala potensi sumberdaya yang dimiliki suatu daerah.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga secara ekonomi dapat dilihat melalui besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Semakin besar pendapatan, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Namun data yang akurat tentang besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga sangat sulit diperoleh. Dalam prakteknya indikator pendapatan sering menghadirkan masalah-masalah tertentu. Pendapatan sulit didefinisikan karena pendapatan mencakup banyak komponen yang berkaitan dengan moneter, misalnya pendapatan rumah tangga pertanian sulit dihitung karena sebagian besar konsumsinya berasal dari

hasil produksi sendiri. Selain itu, individu cenderung membuat pernyataan yang keliru tentang tingkat pendapatannya, yang umumnya di bawah perkiraan (*under estimated*). Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut dan juga karena alasan nilai tabungan yang rendah, pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan total pengeluaran rumah tangga.

Struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mencirikan rumah tangga dengan memberikan gambaran pengeluaran makanan dan non makanan. Tingkat urgensi kebutuhan terhadap kedua jenis pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Jika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat pun menurun pada hampir semua rumah tangga. Namun, keadaan seperti ini lebih dirasakan pada kalangan rumah tangga miskin. Sebab, hal ini memaksa mereka lebih banyak menekan pengeluaran dan menggunakan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keterbatasan mereka, maka sangat wajar apabila rumah tangga khususnya yang mengalami penurunan standar hidup secara drastis akan mengambil tindakan dengan memberikan prioritas utama pada pengeluaran untuk makanan. Dengan demikian, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi makanan.

Rumah tangga yang lebih mampu biasanya mempunyai barang-barang non makanan lebih banyak daripada rumah tangga yang relatif lebih miskin. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang

dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang dibelanjakan bukan untuk makanan.

Tabel 2.39
Pengeluaran per Kapita Tahun 2022 s.d 2024
Kabupaten Sigi

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Total Pengeluaran Perkapita (Rp.000)	8.171	8.498	8.891

Sumber : Merujuk Pada Brs Kab Sigi Desember 2024

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Selanjutnya akan dibahas untuk pengeluaran bukan makanan. Jika penduduk sudah dapat memenuhi kebutuhan makanannya, mereka cenderung membelanjakan sisanya untuk pengeluaran lainnya. Kecenderungan menabung di Indonesia masih relatif rendah. Dengan asumsi tersebut, jika pengeluaran non makanan semakin besar, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan penduduk. Demikian sebaliknya jika pendapatan semakin rendah, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin tinggi dan pengeluaran untuk non makanan semakin rendah. Pengeluaran non makanan ini terdiri dari 6 kelompok konsumsi, yaitu:

1) Perumahan dan fasilitas rumah tangga;
2) Aneka barang dan jasa, termasuk di dalamnya biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan jasa lainnya;
3) Pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
4) Barang tahan lama;

5) Pajak, pungutan dan asuransi;

6) Keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Pada Tahun 2022 persentase pengeluaran non pangan penduduk kabupaten Sigi didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sebesar 57,01 persen, sebanyak 16,78 persen untuk aneka barang dan jasa. Sedangkan untuk pemenuhan pakaian, barang, pajak, retribusi dan keperluan pesta cenderung memiliki persentase pengeluaran yang hampir sama yakni pada kisaran 5-8 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Sigi masih memprioritaskan pendapatannya untuk keperluan non pangan masih pa kebutuhan yang bersifat primer, sandang, pangan papan. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingkat pendapatan yang umumnya masih relatif rendah.

Tabel 2.40
Golongan Pengeluaran Non Pangan Tahun 2024
Kabupaten Sigi

No	Kelompok Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran	Persentase pengeluaran
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	300.114	28,94
2	Aneka Barang dan Jasa	78.558	7,57
3	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	29.225	2,82
4	Barang yang tahan lama	12.696	1,22
5	Pajak Pungutan dan asuransi	46.476	4,48
6	Keperluan pesta dan upacara	1.084	0,1
Jumlah		**477.909**	**46,08**

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2024 diolah kembali

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Konteks ketersediaan infrastruktur sebuah wilayah terhadap Aspek Daya Saing Daerah adalah semakin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur sebuah kabupaten/kota tentunya akan meningkatkan daya saing daerah.

Daya saing daerah yang meningkat tentunya akan menjadi daya tarik terhadap pelaku ekonomi dalam berinvestasi di Kabupaten Sigi.

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Sigi sejauh ini berdasar pada pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang untuk menjamin tercapaianya tujuan dan sasaran tata ruang yang direncanakan melalui keterpaduan dalam pelaksanaan pengendalian ketaatan terhadap tata ruang yang telah di koordinasikan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta melalui badan atau dinas terkait penataan ruang. Ketaatan terhadap RTRW mengacu pada peraturan zonasi untuk penetapan kegiatan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona, yaitu a) penetapan intensitas kegiatan pada setiap zona yang ditetapkan, b) penetapan luasan kawasan yang diijinkan untuk suatu fungsi tertentu selama masih berkesesuaian.

1. **Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

   Pada Tahun 2022 merupakan Tahun awal perencanaan Tata Ruang Wilayah dengan rencana peruntukan RTRW (kawasan budidaya) sebanyak 258.477 ha. Yang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan. Dengan rasio ketaatan terhadap RTRW 0% ini menunjukan bahwa pada awal perencanaan tata ruang rasio ketaatan secara umum sesuai rencana. Sedangkan pada Tahun 2024 di mana kebutuhan pembangunan daerah menyebabkan permintaan akan lahan budidaya untuk kegiatan pembangunan meningkat sehingga rasio ketaatan terhadap RTRW dengan rasio sebesar 0,0003. Rasio ini menunjukan telah terjadi perubahan pola penggunaan

ruang di banding Tahun awal perencanaan. Secara umum rasio Ketaatan Terhadap RTRW digambarkan pada pada tabel dan gambar di bawah ini:

2. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan arahan penggunaan kawasan budidaya pada rencana pola ruang Kabupaten Sigi dapatlah digambarkan arahan kawasan yang dapat digunakan sebagai wilayah produktif yang dapat dikembangkan untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian, perkebunan, permukiman dan area penggunaan lain, sehingga wilayah produktif ini dapat difungsikan guna mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sigi yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan rasio wilayah produktif 2024 sebesar 0,85 , luas wilayah produktif 92.459,03 dan luas seluruh Wilayah Budidaya 108.187,73.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu indikator untuk menarik iklim investasi adalah adanya kondisi keamanan yang dapat dilihat pada rendahnya tingkat kriminalitas di suatu daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi menunjukkan pada Tahun 2024 jumlah kejahatan terhadap jiwa sebanyak 141 kasus. Dimana kasus kejahatan terbanyak adalah penganiayaan yaitu 88 kasus, dan kejahatan terhadap benda merupakan kejahatan yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengrusakan barang milik orang lain. Selama tahun 2024 terjadi 181 kasus kejahatan di kabupaten Sigi, dan 58 diantaranya merupakan pencurian biasa. Kasus terbanyak lainnya adalah narkoba, penipuan, dan penggelapan.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Pada Tahun 2024, jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja adalah 140.288 penduduk , sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah sebanyak 57.464 penduduk.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dari total angkatan kerja pada Tahun 2024, penduduk Kabupaten Sigi yang bekerja tercatat sebesar 98,94 persen sedangkan yang diklasifikasikan sebagai penganggur sekitar 1,06 persen.

2. Rasio Ketergantungan

Situasi kependudukan di suatu wilayah, selain digambarkan melalui laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya, juga dapat tercermin dari komposisi penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin. Semakin rendah proporsi penduduk usia tidak produktif, anak-anak dan manula, menyebabkan angka ketergantungan (*dependency ratio*) semakin kecil. Rendahnya dependency ratio memberikan kesempatan bagi penduduk produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia, yang terbagi menjadi kelompok penduduk usia produktif (15-64 Tahun) dan penduduk usia tidak produktif (0-14 Tahun dan di atas 65 Tahun). Rasio ketergantungan (*Depedency Ratio*) di Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebesar 197,300 atau dengan kata lain angka ketergantungan mencapai 46,93 persen.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Sigi dapat dirangkum dalam Tabel 2.49, sebagai berikut:

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam proses pembangunan disetiap daerah selalu diperhadapkan pada permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan *(strength)* yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan *(weakness)*yang belum diatasi, peluang *(opportunity)*yang belum dimanfaatkan, dan ancaman *(threat)*yang belum diantisipasi.

Rumusan permasalahan pembangunan daerah dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Sigi dapat dikategorikan permasalahan secara makro dan mikro.

2.4.1 Permasalahan Pembangunan

Adapun permasalahan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar yang Belum Optimal
2. Rendahnya daya saing kepemudaan dan olahraga
3. Indeks Literasi Masyarakat belum optimal
4. Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata yang belum optimal
5. Rendahnya daya saing perekonomian daerah terutama pertanian, perikanan,perdagangan, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif
6. Belum Optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat

7. Pertumbuhan Investasi yang masih rendah dan belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan
8. Kualitas Cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan penunjang belum optimal
9. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal untuk menurunkan tingkat kesejahteraan yang belum merata

Isu Strategis

1. Peningkatan Pelayananan Pendidikan dan Kesehatan untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan derajad Kesehatan masyarakat menuju terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing
2. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta menurunkan Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk
3. Pertumbuhan investasi dan daya saing ekonomi local
4. Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar dan penunjang dan pengelolaan lingkungan
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif serta upaya pengentasan kemiskinan Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif serta upaya pengentasan kemiskinan.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	15.693.493.807		2.135.950.947		3.854.069.478		2.960.852.082		6.061.155.512	100	###########	100,00%	95,66%	Badan Pendapatan Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase iuran evaluasi yang menjadi masukan dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (1)	100	50.241.800	25	-	25	2.622.000	25	1.050.000	25	43.513.000	100	47.185.000	100,00%	93,92%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	522.000	1	-	2	522.000	-	-	-	-	3	522.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	22.560.000	2	-	-	1.050.000	-	-	-	21.220.000	2	22.270.000	100,00%	98,71%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	22.560.000	-	-	-	-	2	1.050.000	-	21.510.000	2	22.560.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.833.000	2	-	-	1.050.000	-	-	-	783.000	2	1.833.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.833.000	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	253.800	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	680.000	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	7.648.657.777	25	1.081.072.942	25	2.063.234.636	25	1.231.112.036	25	2.732.086.374	100	7.107.505.988	100,00%	92,92%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	7.439.557.777	57	1.040.872.942	57	2.016.814.636	57	1.169.887.036	57	2.671.576.374	57	6.899.150.988	100,00%	92,74%		Tidak Ada

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	160.920.000	3	26.820.000	3	40.230.000	3	40.230.000	3	53.640.000	12	160.920.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	24.090.000	1	13.380.000	-	6.190.000	-	-	-	3.930.000	1	23.500.000	100,00%	97,55%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	24.090.000	3	-	3	-	3	20.995.000	3	2.940.000	12	23.935.000	100,00%	99,36%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi BMD yang menjadi masukan dalam	100	25.585.200	25	4.060.000	25	6.090.000	25	7.275.200	25	8.120.000	100	25.545.200	100,00%	99,84%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	925.200	1	-	-	-	-	925.200	-	-	1	925.200	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	300.000	-	-	1	-	-	300.000	1	-	2	300.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	24.360.000	3	4.060.000	3	6.090.000	3	6.050.000	3	8.120.000	12	24.320.000	100,00%	99,84%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	2.203.796.070	25	171.938.740	25	511.503.170	25	626.403.186	25	855.748.440	100	2.165.593.536	100,00%	98,27%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	258.974.920	-	-	1	217.774.170	-	23.038.800	1	12.950.000	2	253.762.970	100,00%	97,99%	Sisa Penawaran	Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	74.566.000	-	-	1	14.797.000	-	45.000.000	1	12.118.000	2	71.915.000	100,00%	96,44%	Sisa Oenawaran	Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	173.989.950	-	-	1	1.030.000	-	122.265.000	1	46.995.050	2	170.290.050	100,00%	97,87%	Sisa Penawaran pemebelian Blanko Pajak	Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	300.000	-	-	-	-	1	300.000	-	-	1	300.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	63.980.000	1	-	1	23.700.000	1	8.020.000	1	14.560.000	4	46.280.000	100,00%	72,34%	Sisa anggaran belanja makan dan minum	Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	1.631.519.000	5	171.938.740	7	254.202.000	8	427.313.186	5	769.125.390	25	1.622.579.316	100,00%	99,45%		Tidak Ada

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	466.200	-	-	-	-	1	466.200	-	-	1	466.200	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (%)	100	2.204.899.760	25	-	10	331.600.000	25	145.920.000	25	1.705.083.600	85	2.182.603.600	85,00%	98,99%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1.655.000.000	-	-	1	330.000.000	-	-	-	1.320.000.000	1	1.650.000.000	100,00%	99,70%	Sisa Penawaran	Tidak Ada
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	26.840.000	-	-	-	-	-	-	1	26.840.000	1	26.840.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	30.450.000	-	-	-	-	1	300.000	-	30.100.000	1	30.400.000	100,00%	99,84%	Sisa Penawaran	Tidak Ada
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	486.909.760	-	-	-	-	15	145.620.000	5	324.043.600	20	469.663.600	100,00%	96,46%	Sisa Penawaran	Tidak Ada
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	5.700.000	-	-	3	1.600.000	-	-	7	4.100.000	10	5.700.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	2.657.260.000	25	746.966.707	25	774.091.988	25	796.522.287	25	315.378.414	100	2.632.959.396	100,00%	99,09%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	5.760.000	1	1.810.000	1	-	1	3.600.000	1	350.000	4	5.760.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	2.165.200.000	3	664.356.707	3	657.891.988	3	672.722.287	3	147.928.414	12	2.142.899.396	100,00%	98,97%	Sisa Pembayaran karena tarif PJU yang fluktuatif	Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	486.300.000	3	80.800.000	3	116.200.000	3	120.200.000	3	167.100.000	12	484.300.000	100,00%	99,59%	Sisa Karena Pemutusan Kontrak tenaga kebersihan selama 2 bulan	Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	903.053.200	25	131.912.558	15	164.927.684	25	152.569.373	35	401.225.684	100	850.635.299	100,00%	94,20%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	559.896.000	1	111.675.158	3	142.840.884	2	117.031.173	1	153.435.114	7	524.982.329	100,00%	93,76%	Sisa service dan pembayaran pajak dan STNK	Tidak Ada

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	111.067.200	5	20.237.400	5	20.316.800	5	23.028.200	5	33.842.500	20	97.424.900	100,00%	87,72%	Sisa service dan pembayaran pajak dan STNK	Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	32.090.000	-	-	18	1.770.000	-	12.510.000	7	14.720.000	25	29.000.000	100,00%	90,37%	Ssia Pembayaran service komputer dan printer	Tidak Ada
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	200.000.000	-	-	-	-	-	-	20	199.228.070	20	199.228.070	100,00%	99,61%	Sisa penawaran	Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,66%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		KEUANGAN																	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)	5,53	1.496.043.020		57.900.000		386.294.750		319.504.700		686.352.400	-	1.450.051.850	0,00%	96,93%	Badan Pendapatan Daerah	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah (Rupiah)	3,6E+10	1.496.043.020	######	57.900.000	######	386.294.750	######	319.504.700	######	686.352.400	#####	1.450.051.850	97,53%	96,93%		
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	7	30.540.000	-	-	-	-	3	12.000.000	4	18.440.000	7	30.440.000	100,00%	99,67%		Tidak Ada
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	3	87.276.100	-	-	-	9.585.000	2	3.680.000	1	63.936.100	3	77.201.100	100,00%	88,46%		Tidak Ada
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4	62.100.000	-	-	5	12.050.000	7	-	4	37.150.000	16	49.200.000	100,00%	79,23%		Tidak Ada
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	10	30.477.600	-	-	-	-	-	-	10	30.000.000	10	30.000.000	100,00%	98,43%		Tidak Ada
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	7	262.264.400	-	15.000.000	3	32.650.000	3	77.050.000	1	135.404.800	7	260.104.800	100,00%	99,18%		Tidak Ada
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	7	32.997.620	-	-	-	22.585.150	7	8.999.700	-	-	7	31.584.850	100,00%	95,72%		Tidak Ada
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	37808	290.800.000	5.671	10.800.000	9.452	79.950.000	13.232	88.300.000	9.453	111.500.000	#####	290.550.000	100,00%	99,91%		Tidak Ada
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	3	39.150.000	-	-	2	15.765.000	-	-	1	18.110.000	3	33.875.000	100,00%	86,53%		Tidak Ada
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	3	213.979.800	3	12.600.000	3	118.949.000	3	24.600.000	3	52.326.000	3	208.475.000	100,00%	97,43%		Tidak Ada
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	4	21.600.000	-	3.600.000	-	8.640.000	-	3.960.000	4	5.400.000	4	21.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	3	260.454.700	3	14.100.000	3	60.500.000	3	62.350.000	3	121.445.500	3	258.395.500	100,00%	99,21%		Tidak Ada

		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	3	20.049.600	-	-	1	5.385.200	1	11.100.000	1	2.400.000	3	18.885.200	100,00%	94,19%		Tidak Ada
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	7	25.663.200	1	1.800.000	3	14.715.400	2	3.600.000	1	4.200.000	7	24.315.400	100,00%	94,75%		Tidak Ada
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	18	98.610.000	-	-	6	5.520.000	8	5.520.000	4	86.040.000	18	97.080.000	100,00%	98,45%		Tidak Ada
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	20.080.000	-	-	-	-	1	18.345.000	-	-	1	18.345.000	100,00%	91,36%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,93%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				17.189.536.827		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**95,77%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (persen)	100	5.197.555.661		814.938.521		1.017.877.173		1.239.829.963		1.101.465.583	100	4.174.111.240	100,00%	80,31%	Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai SAKIP perangkat daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah (% A Nilai)	100	106.696.081	100	17.439.500	100	23.559.781	100	42.569.900	100	23.113.700	100	106.682.881	100,00%	99,99%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	71.059.700	-	12.439.500	1	9.491.000	1	32.569.900	-	16.546.100	2	71.046.500	100,00%	99,98%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.000.100	-	-	-	2.000.100	-	5.000.000	1	-	1	7.000.100	100,00%	100,00%		Realisasi capaian Kinerjanya Di TW 4 yakni Dokumen RKA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.000.100	-	-	1	2.000.100	1	5.000.000	-	-	2	7.000.100	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.068.281	1	-	-	2.068.281	-	-	-	-	1	2.068.281	100,00%	100,00%		Realisasi Capaian Kinerjanya Di TW 1 yakni Dokumen DPA Awal
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	6.567.600	-	-	-	-	-	-	2	6.567.600	2	6.567.600	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	7.000.100	-	5.000.000	1	2.000.100	-	-	-	-	1	7.000.100	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	6.000.200	1	-	1	6.000.200	1	-	1	-	4	6.000.200	100,00%	100,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	3.411.075.989	100	578.599.423	100	653.050.723	100	697.916.423	100	577.926.014	100	2.507.492.583	100,00%	73,51%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN (Tahun)	34	3.106.107.889	28	550.379.423	27	550.379.423	27	550.379.423	27	551.439.214	27	2.202.577.483	80,15%	70,91%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	219.105.000	1	28.220.000	1	80.461.000	1	110.424.000	1	-	1	219.105.000	100,00%	100,00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	10.223.800	-	-	1	10.190.800	-	-	-	-	1	10.190.800	100,00%	99,68%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	7.450.500	-	-	-	6.300.000	-	1.150.500	1	-	1	7.450.500	100,00%	100,00%		Realisasi capaian Kinerjanya Di TW 4 yakni Laporan Keuangan Akhir Tahun
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	12.850.000	-	-	-	-	-	-	1	12.844.000	1	12.844.000	100,00%	99,95%		Tidak Ada

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	55.338.800	-	-	1	5.719.500	1	35.962.500	1	13.642.800	1	55.324.800	100,00%	99,97%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	25.166.900	-	-	100	18.390.000	100	5.965.400	100	-	100	24.355.400	100,00%	96,78%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.850.000	-	-	1	3.438.000	1	412.000	1	-	1	3.850.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD (Dokumen)	1	6.102.000	-	-	1	6.096.000	-	-	-	-	1	6.096.000	100,00%	99,90%		Tidak Ada
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	6.000.000	-	-	1	5.952.000	-	-	-	-	1	5.952.000	100,00%	99,20%		Tidak Ada
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	9.214.900	-	-	1	2.904.000	1	5.553.400	1	-	1	8.457.400	100,00%	91,78%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	505.206.091	100	57.127.598	100	68.062.000	100	203.145.777	100	168.217.155	100	496.552.530	100,00%	98,29%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	59.940.040	-	-	-	-	1	19.978.700	1	32.745.500	1	52.724.200	100,00%	87,96%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	8.090.630	-	-	-	-	-	-	1	8.090.630	1	8.090.630	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	24.742.421	-	-	-	-	1	8.248.125	1	16.494.025	1	24.742.150	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	3.600.000	-	-	-	-	1	1.200.000	1	1.200.000	1	2.400.000	100,00%	66,67%		Tidak Ada

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	9.210.000	-	-	-	2.241.000	1	6.881.550	-	-	1	9.122.550	100,00%	99,05%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	378.623.000	-	57.127.598	-	50.821.000	-	160.837.402	1	109.687.000	1	378.473.000	100,00%	99,96%		Realisasi Capaian Di TW 4 yaitu Rekapan Perjalanana Dinas Seluruh Pegawai
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	21.000.000	-	-	-	15.000.000	1	6.000.000	-	-	1	21.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	49.298.600	-	-	-	-	-	-	100	48.155.000	100	48.155.000	100,00%	97,68%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	28.000.000	-	-	-	-	-	-	1	28.000.000	1	28.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	21.298.600	-	-	-	-	-	-	3	20.155.000	3	20.155.000	60,00%	94,63%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	706.110.000	100	98.800.000	100	187.742.669	100	186.786.563	100	128.402.214	100	601.731.446	100,00%	85,22%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.030.000	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.020.000	1	4.020.000	100,00%	99,75%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	60.000.000	-	-	1	15.276.669	1	12.320.563	1	13.813.214	1	41.410.446	100,00%	69,02%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	642.080.000	-	98.800.000	-	172.466.000	-	172.466.000	1	112.569.000	1	556.301.000	100,00%	86,64%		Realisasi Capaian Rekapan Pelaporan Di TW 4

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	394.002.000	100	62.972.000	100	67.072.000	100	103.445.900	100	155.651.500	100	389.141.400	100,00%	98,77%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	316.412.000	2	62.972.000	2	67.072.000	3	100.645.900	3	81.378.000	10	312.067.900	100,00%	98,63%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan perbaikan peralatan kerja yang rusak ringan/sedang/berat (%)	4	12.590.000	-	-	-	-	2	2.800.000	2	9.601.000	4	12.401.000	100,00%	98,50%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	65.000.000	-	-	-	-	-	-	1	64.672.500	1	64.672.500	100,00%	99,50%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	87,97%	80,31%		
															Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi		
		PERENCANAAN																	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (%)	100	934.030.707		25.248.600		107.815.150		216.309.828		463.641.676	100	813.015.254	100,00%	87,04%	Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase analisis perencanaan dan pendanaan sesuai kapasitas fiskal daerah (%)	100	631.399.218	100	14.025.000	100	79.011.150	100	150.964.468	100	297.640.000	100	541.640.618	100,00%	85,78%		
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	12.200.000	-	-	-	-	-	-	1	11.200.000	1	11.200.000	100,00%	91,80%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	38.665.700	-	-	1	14.705.000	-	23.960.700	-	-	1	38.665.700	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	24.693.500	-	-	1	16.208.500	-	8.485.000	-	-	1	24.693.500	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	42.922.500	-	-	1	9.878.750	-	33.043.750	-	-	1	42.922.500	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	100	29.103.918	-	-	100	12.128.900	-	16.975.018	-	-	100	29.103.918	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	482.813.600	-	14.025.000	1	26.090.000	1	68.500.000	1	286.440.000	3	395.055.000	100,00%	81,82%		Tidak Ada
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti OPD (%)	100	22.691.144	100	-	100	-	100	-	100	22.645.076	100	22.645.076	100,00%	99,80%		
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Masukan)	1	9.564.046	-	-	-	-	-	-	1	9.533.800	1	9.533.800	100,00%	99,68%		Tidak Ada
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	3	7.510.122	-	-	-	-	-	-	3	7.494.900	3	7.494.900	100,00%	99,80%		Tidak Ada
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	5.616.976	-	-	-	-	-	-	1	5.616.376	1	5.616.376	100,00%	99,99%		Tidak Ada
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis program dan kegiatan pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerahkan dalam dalvas dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah (%)	100	279.940.345	100	11.223.600	100	28.804.000	100	65.345.360	100	143.356.600	100	248.729.560	100,00%	88,85%		

		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	181.182.311	1	11.223.600	1	18.364.000	1	38.767.460	1	108.838.600	1	177.193.660	100,00%	97,80%		Tidak Ada
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	*Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	1	2.500.000	-	-	-	-	1	2.499.900	-	-	1	2.499.900	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	10	96.258.034	-	-	3	10.440.000	3	24.078.000	4	34.518.000	10	69.036.000	100,00%	71,72%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,89%	87,04%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah (%)	100	1.060.933.321		70.425.003		167.347.426		271.223.133		489.504.881	100	998.500.443	100,00%	94,12%	Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dianalisis sesuai bidangnya (%)	100	430.040.240	100	49.020.203	100	94.969.520	100	180.532.083	-	88.227.400	75	412.749.206	75,00%	95,98%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10	52.499.500	5	25.373.600	3	14.610.900	2	12.515.000	-	-	10	52.499.500	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	10	16.414.000	-	-	5	8.635.000	5	7.779.000	-	-	10	16.414.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	81.119.520	-	-	1	62.040.620	-	19.078.900	-	-	1	81.119.520	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	10	14.807.720	-	-	-	-	5	12.613.680	5	613.800	10	13.227.480	100,00%	89,33%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9	144.762.100	3	23.646.603	3	9.683.000	3	97.316.903	-	-	9	130.646.506	100,00%	90,25%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9	13.120.600	-	-	-	-	9	11.794.700	-	750.000	9	12.544.700	100,00%	95,61%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9	86.416.100	-	-	-	-	6	19.433.900	3	66.531.800	9	85.965.700	100,00%	99,48%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	20.900.700	-	-	-	-	-	-	1	20.331.800	1	20.331.800	100,00%	97,28%		Tidak Ada

		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang dianalisis sesuai bidangnya (%)	100	438.811.200	100	21.404.800	100	44.732.000	100	42.842.450	100	305.780.550	100	414.759.800	100,00%	94,52%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	67.880.600	-	7.440.000	-	-	2	2.457.200	4	53.210.000	6	63.107.200	100,00%	92,97%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	6	17.488.700	-	-	-	-	2	4.419.250	4	13.050.850	6	17.470.100	100,00%	99,89%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	1	18.100.000	-	-	1	9.000.000	1	9.100.000	1	-	1	18.100.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	6	14.804.900	-	-	3	12.540.000	3	2.265.000	-	-	6	14.805.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	44.251.000	-	-	2	11.040.000	2	14.355.000	-	-	4	25.395.000	100,00%	57,39%		Tidak Ada

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	19.304.000	-	-	-	-	2	6.688.000	2	12.531.800	4	19.219.800	100,00%	99,56%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	12.975.000	-	-	-	-	-	-	4	12.975.000	4	12.975.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	244.007.000	1	13.964.800	1	12.152.000	1	3.558.000	1	214.012.900	4	243.687.700	100,00%	99,87%		Tidak Ada
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dianalisis sesuai bidangnya (%)	100	192.081.881	100	-	100	27.645.906	100	47.848.600	100	95.496.931	100	170.991.437	100,00%	89,02%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	7.554.910	-	-	-	-	1	1.132.100	3	5.799.800	4	6.931.900	100,00%	91,75%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	7.169.000	-	-	-	-	3	5.400.000	1	1.411.900	4	6.811.900	100,00%	95,02%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	10.191.000	-	-	2	7.505.300	-	-	2	2.668.000	4	10.173.300	100,00%	99,83%		Tidak Ada

		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	77.703.771	-	-	1	9.340.606	1	11.600.000	1	46.699.174	1	67.639.780	75,00%	87,05%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	32.617.000	-	-	-	3.000.000	2	16.100.500	2	13.102.100	4	32.202.600	100,00%	98,73%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	17.465.200	-	-	2	7.800.000	-	-	2	8.976.900	4	16.776.900	100,00%	96,06%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	9.500.000	-	-	-	-	4	9.500.000	-	-	4	9.500.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	29.881.000	-	-	-	-	-	4.116.000	1	16.839.057	1	20.955.057	100,00%	70,13%		Tidak Ada
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			98,17%	94,12%		
													Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang serta inovasi dan teknologi yang menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah (%)	100	783.903.600		-		51.998.100		174.737.993		434.429.400	100	661.165.493	100,00%	84,34%	Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah	

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase luaran litbang sektoral yang menjadi masukan dalam litbang bidang sosial dan kependudukan (%)	100	319.999.600	100	-	100	22.798.100	100	62.747.893	100	186.771.600	100	272.317.593	100,00%	85,10%		
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	319.999.600	-	-	-	22.798.100	-	62.747.893	1	186.771.600	1	272.317.593	100,00%	85,10%		Tidak Ada
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase luaran litbang sektoral yang menjadi masukan dalam litbang bidang ekonomi dan pembangunan (%)	100	180.166.500	-	-	100	1.000.000	100	86.640.100	100	89.968.800	100	177.608.900	100,00%	98,58%		
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	180.166.500	-	-	-	1.000.000	-	86.640.100	1	89.968.800	1	177.608.900	100,00%	98,58%		Tidak Ada
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase luaran litbang, perekayasaan dan uji coba penerapan rancang bangun yang menjadi masukan dalam pengembangan inovasi dan teknologi (%)	100	283.737.500	100	-	100	28.200.000	100	25.350.000	100	157.689.000	100	211.239.000	100,00%	74,45%		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	283.737.500	-	-	-	28.200.000	-	25.350.000	1	157.689.000	1	211.239.000	100,00%	74,45%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	84,34%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		
					7.976.423.289	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**91,91%**	**83,33%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	6.295.687.857		998.167.899		2.063.402.914		1.238.866.723		1.642.824.234	100	5.943.261.770	100,00%	94,40%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	25.440.000	25	-	25	11.340.000	25	-	25	13.600.000	100	24.940.000	100,00%	98,03%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	25.440.000	2	-	2	11.340.000	2	-	2	13.600.000	2	24.940.000	100,00%	98,03%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	4.691.135.787	25	845.300.895	25	1.586.668.034	25	900.892.167	25	1.016.619.069	100	4.349.480.165	100,00%	92,72%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	4.526.115.787	50	820.820.895	50	1.547.228.034	50	864.172.167	50	952.359.069	50	4.184.580.165	100,00%	92,45%	Realisasi Keuangan Tidak Mencapai 100% Dikarekan Adanya SILPA Gaji
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	200	153.680.000	50	24.480.000	50	39.440.000	50	36.720.000	50	53.040.000	200	153.680.000	100,00%	100,00%	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	11.340.000	1	-	1	-	1	-	1	11.220.000	1	11.220.000	100,00%	98,94%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	100	16.200.000	25	2.700.000	25	4.050.000	25	4.050.000	25	5.400.000	100	16.200.000	100,00%	100,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	16.200.000	1	2.700.000	1	4.050.000	1	4.050.000	1	5.400.000	1	16.200.000	100,00%	100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	571.365.570	25	58.687.084	25	156.220.300	25	160.867.736	25	194.336.065	100	570.111.185	100,00%	99,78%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4.000.000	1	-	1	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2	4.000.000	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	120.342.500	2	35.018.600	2	-	2	73.331.280	2	11.158.500	2	119.508.380	100,00%	99,31%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya Sisa Penawaran Penyedia Belanja Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	5.014.120	-	-	2	2.506.000	2	-	2	2.453.500	2	4.959.500	100,00%	98,91%	Realisasi Keuangan Tidak Mencapai 100 % Di Karenakan Adanya Sisa Penawaran Penyedia Belanja Alat Kebersihan Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	121.154.950	2	16.275.000	2	49.077.000	2	16.200.000	2	39.601.750	2	121.153.750	100,00%	100,00%	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	3.600.000	-	-	1	1.800.000	1	600.000	1	1.200.000	1	3.600.000	100,00%	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	317.254.000	1	7.393.484	1	100.837.300	1	70.736.456	1	137.922.315	1	316.889.555	100,00%	99,89%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya Sisa Uang Tiket dan Hotel Karena Pembelian Tidak Sesuai dengan Standar Biaya Harga Tiket dan Harga Hotel
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (%)	100	54.568.000	25	10.600.000	25	9.200.000	25	-	25	33.896.000	100	53.696.000	100,00%	98,40%	
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	9.396.000	-	-	-	-	2	-	3	9.396.000	5	9.396.000	100,00%	100,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	45.172.000	3	10.600.000	2	9.200.000	-	-	-	24.500.000	5	44.300.000	100,00%	98,07%	Realisai Keuangan Tidak Mencapai 100% di Karenakan Adanya Sisa Penawaran Penyedia Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	491.599.500	25	18.629.920	25	155.549.580	25	114.256.820	25	197.679.100	100	486.115.420	100,00%	98,88%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	1	5.000.000	1	-	1	-	1	-	1	5.000.000	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	92.299.500	1	13.629.920	1	20.211.480	1	13.474.320	1	42.069.100	1	89.384.820	100,00%	96,84%	Realisai Keuangan Tidak Mencapai 100% di Karenakan Adanya SILPA Dari Belanja Tagihan Internet Karena Pembelanjaan Tagihan Internet di Bawa

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	394.300.000	1	-	1	135.338.100	1	100.782.500	1	155.610.000	1	391.730.600	100,00%	99,35%	Realisai Keuangan Tidak Mencapai 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur dan SILPA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	445.379.000	25	62.250.000	25	140.375.000	25	58.800.000	25	181.294.000	100	442.719.000	100,00%	99,40%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	407.829.000	10	62.250.000	10	140.375.000	10	58.800.000	10	144.024.000	10	405.449.000	100,00%	99,42%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Harga Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Bawah Standar Biaya Harga Karena itu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	37.550.000	2	-	3	-	-	-	5	37.270.000	10	37.270.000	100,00%	99,25%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% karena Harga Pemeliharaan Ac, Laptop dan Printer di Bawa Standar Biaya Harga Karena
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	94,40%	
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		KEPEGAWAIAN																
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (Persentase)	85	1.734.662.440		356.727.202		406.263.901		109.403.675		814.090.412	85	1.686.485.190	100,00%	97,22%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Daerah (Persentase)	80	787.207.960	20	30.286.800	20	89.602.076	20	51.545.775	20	592.881.370	80	764.316.021	100,00%	97,09%	
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1	451.475.560	1	30.286.800	1	8.962.780	1	23.776.520	1	382.106.220	1	445.132.320	100,00%	98,59%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur dan Sisa Penawaran Penyedia Belanja Alat Tulis Kantor dan sisa Uang Tiket dan Hotel Karena Pembelian Tidak Sesuai dengan Standar Biaya Harga Tiket dan Harga Hotel

		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	150	170.579.000	25	-	100	46.399.316	-	-	25	109.373.690	150	155.773.006	100,00%	91,32%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur, sisa Uang Tiket dan Hotel Karena Pembelian Tidak sesuai dengan standar Biaya Harga Tiket dan Harga Hotel
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	56.874.900	1	-	1	23.572.980	1	8.853.600	1	24.337.800	1	56.764.380	100,00%	99,81%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur, sisa Uang Tiket dan Hotel Karena Pembeliyan Tidak sesuai dengan standar Biaya Harga Tiket dan Harga Hotel
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	108.278.500	1	-	1	10.667.000	1	18.915.655	1	77.063.660	1	106.646.315	100,00%	98,49%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur, sisa Uang Tiket dan Hotel Karena Pembelian Tidak sesuai Dengan standar Biaya Harga Tiket dan Harga Hotel
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penanganan Administrasi Mutasi dan Kepangkatan (Persentase)	70	812.244.480	20	326.440.402	20	285.941.825	20	34.494.186	10	140.789.580	70	787.665.993	100,00%	96,97%	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	800	122.610.000	200	-	200	72.326.993	200	7.114.002	200	42.689.000	800	122.129.995	100,00%	99,61%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur, sisa Uang Tiket dan Hotel Karena Pembelian Tidak sesuai Dengan standar Biaya Harga Tiket dan Harga Hotel
		Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	10	689.634.480	3	326.440.402	3	213.614.832	2	27.380.184	2	98.100.580	10	665.535.998	100,00%	96,51%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur dan Alat tulis Kantor, Serta sisa Uang Tiket dan Hotel Karena Pembelian Tidak sesuai Dengan standar Biaya Harga Tiket dan Harga Hotel
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	75	135.210.000	20	-	20	30.720.000	20	23.363.714	15	80.419.462	75	134.503.176	100,00%	99,48%	

		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	30	135.210.000	5	-	10	30.720.000	10	23.363.714	5	80.419.462	30	134.503.176	100,00%	99,48%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur, sisa Uang Tiket dan Hotel Karena
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,22%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Berkompetensi (Persentase)	86	569.624.900		150.269.642		187.013.210		63.721.348		161.419.234	86	562.423.434	100,00%	98,74%	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pengembangan Kompetensi yang terlaksana (Persentase)	79	569.624.900	20	150.269.642	20	187.013.210	20	63.721.348	19	161.419.234	79	562.423.434	100,00%	98,74%	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	569.624.900	1	150.269.642	1	187.013.210	1	63.721.348	1	161.419.234	1	562.423.434	100,00%	98,74%	Realisasi Keuangan Tdk Mencapi 100% di Karenakan Adanya SILPA Belanja Makan Minum Lembur, Sisa Penawaran Belanja Alat Tulis Kantor dan sisa Uang Tiket dan Hotel Karena Pembelian Tidak Sesuai dengan Standar Biaya Harga Tiket dan Hotel
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,74%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
					8.599.975.197	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**95,26%**	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan
1	2	3	4	7		12		13=12/7x100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	100	3.126.884.221	100	3.010.906.510	100,00%	96,29%	indikator kinerja Program ganti dengan Indeks Reformasi Birokrasi
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (%)	100	41.886.800	100	41.886.800	100,00%	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	14.300.000	2	14.300.000	100,00%	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	12.806.800	2	12.806.800	100,00%	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	14.780.000	2	14.780.000	100,00%	100,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.601.869.621	100	2.519.593.897	100,00%	96,84%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	2.519.669.621	29	2.437.453.897	100,00%	96,74%	sisa TPP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	82.200.000	2	82.140.000	100,00%	99,93%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	7.200.000	100	7.200.000	100,00%	100,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	7.200.000	3	7.200.000	100,00%	100,00%	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	142.316.000	90	122.753.701	90,00%	86,25%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	142.316.000	2	122.753.701	100,00%	86,25%	Sisa Perjalanan Dinas Luar Daerah, 1 Orang, digunakan utk perjalanan dinas Luar Daerah dlam propinsi. dan perjalanan dalam daerah untuk Monev kegiatan RR
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	18.847.200	100	18.847.200	100,00%	100,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	18.847.200	2	18.847.200	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	57.380.000	100	55.129.996	100,00%	96,08%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	24.000.000	1	23.999.996	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	33.380.000	1	31.130.000	100,00%	93,26%	Sisa Pembayaran Lembur Eselon II
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	257.384.600	100	245.494.916	100,00%	95,38%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	108.337.000	8	106.671.616	100,00%	98,46%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	138.447.600	5	128.223.300	100,00%	92,62%	Sisa Pembayara Biaya Balik Nama Kendaraan HIbah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	10.600.000	16	10.600.000	100,00%	100,00%	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,29%	
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah kegiatan yang terlasana pada Program Penanggulangan Bencana (Kegiatan)	100	1.646.495.535	100	1.434.574.011	100,00%	87,13%	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Persentase)	100	1.646.495.535	95	1.434.574.011	95,00%	87,13%	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	150	910.717.535	145	766.014.191	96,67%	84,11%	sisa anggaran sosialisasi (Simulasi kebencanaan) dari target 4 Lokasi yang terlaksana hanya 3 lokasi karena ada 1 kecamatan yang belum mempunyai Rencana Kontigensi

		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	3	735.778.000	3	668.559.820	100,00%	90,86%	Sisa pembayaran Lembur dan makan minum Lembur Petugas Pusdalop dan Sisa Lelang/ pengadaan Meubiler Pusdalop dan Gardu LIstrik Gedung PusdalopS-PB
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,16%	87,13%	
						Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
				4773379756				99,36%	93,13%	
						KINERJA DAN ANGGAR		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	2.799.647.952		420.163.943		866.877.737		580.845.479		816.914.350	100	2.684.801.509	100,00%	95,90%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	59.000.000	-	-	2	2.995.000	6	5.030.000	8	50.975.000	16	59.000.000	100,00%	100,00%		realisasi sesuai anggaran kas
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	5	10.110.000	-	-	2	-	-	3.610.000	3	6.470.000	5	10.080.000	100,00%	99,70%		TW 2 sdh di laksanakan pemeliharaan nanti Pertanggung jawabannya TW 3, TW 4 pembayaran pemeliharaan di TW 3
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,90%		
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Terhadap Masyarakat Terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Persentase (%))	2	1.622.436.386		328.220.640		256.560.000		818.245.826		211.573.140	2	1.614.599.606	100,00%	99,52%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka (Orang)	42	1.622.436.386	42	328.220.640	42	256.560.000	42	818.245.826	42	211.573.140	42	1.614.599.606	100,00%	99,52%		realisasi sesuai anggaran kas

					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,52%		
					Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang Menerima Bantuan Keuangan (Persentase (%))	10	48.047.177.400		16.043.800.000		29.000.000.000		180.114.400		2.819.168.856	10	48.043.083.256	100,00%	99,99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	5	192.500.000	2	43.800.000	-	-	1	129.910.000	2	17.000.000	5	190.710.000	100,00%	99,07%		realisasi sesuai anggaran kas
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,99%		
					Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Data ORMAS yang dikirim ke KEMENDAGRI (Data)	22	200.174.200		-		5.400.000		2.850.000		191.024.200	22	199.274.200	100,00%	99,55%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	4	50.174.200	-	-	1	5.400.000	1	2.850.000	2	41.024.200	4	49.274.200	100,00%	98,21%		realisasi sesuai anggaran kas
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,55%		
					Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi P4GN (Persentase (%))	3	25.000.000		-		4.800.000		8.831.500		3.101.900	18	16.733.400	600,00%	66,93%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya yang dilaksanakan (Dokumen)	2	25.000.000	-	-	2	4.800.000	2	8.831.500	2	3.101.900	2	16.733.400	100,00%	66,93%		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	25.000.000	-	-	10	4.800.000	40	8.831.500	-	3.101.900	50	16.733.400	100,00%	66,93%		1.TW I melaksanakan rapat Pembentukan ketua dan anggota FKUB, 2. TW 2 melaksanakan rapat lanjutan FKUB setelah pembentukan ketua dan anggota, 3. laporan pertanggungjawaban kegiatan di TW IV
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	66,93%		
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang Terditeksi Menjadi Potensi Konflik yang Terbuka (Persentase (%))	100	2.278.592.400		1.277.924.000		138.335.000		56.040.400		783.981.220	100	2.256.280.620	100,00%	99,02%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	450.000.000	1	199.149.000	1	49.000.000	1	1.000.000	1	199.149.000	4	448.298.000	100,00%	99,62%		TW IV untuk 2 dokumen pengamanan Natal dan Tahun Baru

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	201.469.000	1	30.900.000	1	54.133.000	1	9.000.000	1	100.950.000	4	194.983.000	100,00%	96,78%		Realisasi sesuai anggaran kas
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	94,26%	99,02%		
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				54.973.028.338	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,76%**	**99,71%**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		SEKRETARIAT DAERAH																	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejateraan Yang Dilegal Formalkan (%)	100	18.179.283.547		1.170.253.974		4.163.325.860		4.204.792.150		7.102.064.470	100	16.640.436.454	100,00%	91,54%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Layanan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan (1)	100	18.179.283.547	25	1.170.253.974	25	4.163.325.860	25	4.204.792.150	25	7.102.064.470	100	16.640.436.454	100,00%	91,54%		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	650	17.368.387.547	65	999.783.974	140	4.010.112.110	167	3.983.137.150	250	6.866.760.970	622	15.859.794.204	95,69%	91,31%		Relalisasi kegiatan tidak mencapai 100% ada beberapa Faktor yaitu : 1. Belanja Beasiswa : - Beasiswa Mahasiswa Yaman pada DPA Teranggarkan 20 Orang sementara yang lulus seleksi hanya 16 Orang - Beasiswa Mahasiswa IPB teranggarkan di DPA 2 Orang sementara yang lulus seleksi hanya 1 Orang - Beasiswa Kanada Teranggarkan 2 Orang tapi Tidak terealisasi 2. Belanja Hibah : Ada Beberapa Lembaga yang mendapat Bantuan tapi tidak dapat direalisasikan karena beberapa syarat administrasi tidak terpenuhi. 3. Adapun Belanja Lain yang tidak terelisasi adalah sisa sisa Penawaran dari belanja kegiatan

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4	748.800.000	1	170.470.000	1	95.483.750	1	221.655.000	1	232.657.500	4	720.266.250	100,00%	96,19%		Realisasi Keuangan Tidak Mencapai 100 % Karena ada Sisa Penawaran dari Belanja Makan Minum Kegiatan
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	6	62.096.000	-	-	5	57.730.000	-	-	1	2.646.000	6	60.376.000	100,00%	97,23%		Realisasi Keuangan Tidak Mencapai 100 % Karena ada Sisa Penawaran dari Belanja Kegiatan
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		95,88%	91,54%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					18.179.283.547	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**95,88%**	**91,54%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Organisasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	538.625.000		-		81.856.369		69.810.125		330.432.398	100	482.098.892	100,00%	89,51%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Organisasi	Relalisasi keuangan tidak mencapai 100% karena Terdapat sisa belanja Perjalanan dinas luar daerah,sisa dari Alat Tulis kantor hasil dari Penawaran Harga dengan Pihak ketiga,sisa honorarium Narasumber dan panitia serta Sisa dari Belanja Cetak Buku peraturan Bupati
		Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang dianalisis Anjab dan ABK, Persentase Ketatalaksanaan Pelayanan Publik ,Persentase LKP dan RB Kabupaten diselesaikan tepat waktu (%)	100	538.625.000	-	-	25	81.856.369	47	69.810.125	89	330.432.398	89	482.098.892	89,15%	89,51%		Relalisasi kegiatan tidak mencapai 100% karena Terdapat sisa belanja Perjalanan dinas luar daerah,sisa dari Alat Tulis kantor hasil dari Penawaran Harga dengan Pihak ketiga,sisa honorarium Narasumber dan panitia serta Sisa dari Belanja Cetak Buku peraturan Bupati
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	207.374.800	1	-	1	9.635.180	1	41.808.125	1	110.906.933	1	162.350.238	100,00%	78,29%		Terdapat Sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan sisa alat tulis kantor hasil penawaran pada sub kegiatan pengeloaan kelembagaan dan analisis jabatan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	97.740.000	1	-	1	37.291.700	1	5.700.000	1	45.012.972	1	88.004.672	100,00%	90,04%		Terdapat Sisa Belanja Honorarium Narasumber,panitia ,belanja cetak buku Peraturan Bupati dan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksanaan
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	138.354.000	-	-	1	26.202.320	1	13.092.000	-	98.103.458	2	137.397.778	100,00%	99,31%		Terdapat Sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan alat tulis kantor sesuai Harga Penawaran pada sub kegiatan peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi

		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	95.156.200	1	-	1	8.727.169	1	9.210.000	1	76.409.035	1	94.346.204	100,00%	99,15%		Terdapat Sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	89,51%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
					538.625.000	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**89,51%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perlengkapan dan Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (persen)	100	19.535.750.185		-		2.744.394.904		-		16.249.269.623	100	18.993.664.527	100,00%	97,23%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi kepegawaian yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	224.852.800	-	-	50	143.480.000	-	-	50	81.372.800	100	224.852.800	100,00%	100,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	224.852.800	-	-	1	143.480.000	-	-	1	81.372.800	2	224.852.800	100,00%	100,00%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (1)	753	5.913.455.388	753	-	753	131.441.600	753	-	753	5.747.694.701	753	5.879.136.301	100,00%	99,42%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	100.000.000	-	-	1	6.044.500	1	-	2	93.955.500	4	100.000.000	100,00%	100,00%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	114.004.000	-	-	5	39.516.200	-	-	5	74.487.800	10	114.004.000	100,00%	100,00%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	95.886.940	-	-	2	78.590.900	-	-	2	17.296.040	4	95.886.940	100,00%	100,00%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	1.016.324.000	5	-	5	-	5	-	5	1.014.662.500	20	1.014.662.500	100,00%	99,84%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	114.971.148	-	-	1	-	-	-	1	110.366.600	2	110.366.600	100,00%	96,00%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.388.480.000	3	-	3	7.290.000	3	-	3	1.378.354.000	12	1.385.644.000	100,00%	99,80%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	3.083.789.300	-	-	-	-	-	-	4	3.058.572.261	4	3.058.572.261	100,00%	99,18%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Lancarnya Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)	100	5.619.575.700	-	-	50	558.684.920	-	-	50	4.908.397.661	100	5.467.082.581	100,00%	97,29%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	556.700.000	-	-	1	23.560.000	-	-	2	531.100.000	3	554.660.000	100,00%	99,63%		Pengadaan Kendaraan Dinas yang di Bayarkan di TW 2 dan Penambahan Anggaran di perubahan TW 4
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	463.800.000	-	-	5	379.160.000	-	-	1	75.500.000	6	454.660.000	100,00%	98,03%		Pengadaan Kendaraan Dinas yang di Bayarkan di TW 2 dan Penambahan Anggaran di perubahan TW 4
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	150	920.287.000	-	-	13	52.130.000	-	-	137	848.395.000	150	900.525.000	100,00%	97,85%		Pembayaran dilakukan Pada TW 2 pada pengadaan Mebeluer di karenakan Proses Pengerjaan dan Pengiriman Lemari, Meja, Kursi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	3.678.788.700	-	-	3	103.834.920	2	-	3	3.453.402.661	8	3.557.237.581	100,00%	96,70%		Pada Tw 1 Tidak ada Realisasi dikarenakan Proses Pengadaan dan Tender Pengadaan Fisik Bangunan Gedung yang berkontrak di TW 2, pada TW 2 dilakukan Pembayaran Uang Muka pada Pengadaan Fisik

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ada (%)	100	3.249.080.000	-	-	50	662.430.000	-	-	50	2.470.065.173	100	3.132.495.173	100,00%	96,41%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	20.010.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	20.000.000	1	30.000.000	50,00%	149,93%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	348.600.000	-	-	-	-	-	-	2	222.025.173	2	222.025.173	100,00%	63,69%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	2.880.470.000	-	-	2	652.430.000	3	-	5	2.228.040.000	10	2.880.470.000	100,00%	100,00%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	2.016.818.700	-	-	50	429.574.100	-	-	50	1.505.944.543	100	1.935.518.643	100,00%	95,97%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	1.350.756.900	-	-	15	194.561.600	10	-	5	1.128.562.701	30	1.323.124.301	100,00%	97,95%		Kendaraan yang di service dan Pembayaran Pajak menggunakan Dana UP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	411.661.800	-	-	10	95.362.500	10	-	10	280.968.842	30	376.331.342	100,00%	91,42%		Kendaraan yang di service dan Pembayaran Pajak menggunakan Dana UP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	254.400.000	-	-	25	139.650.000	25	-	50	96.413.000	100	236.063.000	100,00%	92,79%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4

		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	961.477.597	-	-	25	74.707.484	25	-	50	836.176.745	100	910.884.229	100,00%	94,74%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	12	835.851.997	-	-	6	62.357.484	6	-	6	741.798.145	18	804.155.629	100,00%	96,21%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	5.625.600	-	-	-	-	-	-	1	2.818.800	1	2.818.800	50,00%	50,11%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	120.000.000	-	-	2	12.350.000	2	-	2	91.559.800	2	103.909.800	100,00%	86,59%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (%)	100	1.550.490.000	-	-	50	744.076.800	25	-	25	699.618.000	100	1.443.694.800	100,00%	93,11%		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan (Paket) (paket)	9	965.380.000	-	-	6	631.576.800	3	-	3	304.750.000	12	936.326.800	100,00%	96,99%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	555.110.000	-	-	3	112.500.000	3	-	3	364.868.000	9	477.368.000	75,00%	86,00%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4

		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	2	30.000.000	-	-	-	-	-	-	2	30.000.000	2	30.000.000	100,00%	100,00%		Pada TW 1 tidak ada Realisasi dikarenakan menggunakan, yang di GU kan pada TW 2, TW 3 belum ada Realisasi dikarenakan Masih Kekurangan Anggaran Sehingga di Anggarkan Kembali Pada TW 4
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,22%	97,23%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				19.535.750.185		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,22%**	**97,23%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (%)	100	3.659.780.000		774.068.069		1.100.249.720		495.512.463		1.284.963.548	100	3.654.793.800	100,00%	99,86%	Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan protokol dan komunikasi pimpinan sesuai SOP (1)	100	3.659.780.000	28	774.068.069	40	1.100.249.720	18	495.512.463	14	1.284.963.548	100	3.654.793.800	100,00%	99,86%		
		Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	27	1.105.143.000	8	214.936.269	8	194.109.720	7	202.443.763	4	491.673.248	27	1.103.163.000	100,00%	99,82%		Sisa Anggaran Makan dan Minum Jamuan Tamu
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	2	2.217.622.000	2	520.886.000	2	830.000.000	2	189.520.000	2	674.216.000	2	2.214.622.000	100,00%	99,86%		Media Berhenti Berlangganan Surat Kabar Mingguan Di TW III dan TW IV
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	6	337.015.000	1	38.245.800	2	76.140.000	2	103.548.700	1	119.074.300	6	337.008.800	100,00%	100,00%		Sisa Anggaran Belanja Cetak
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,86%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					3.659.780.000	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**99,86%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SEKRETARIAT DAERAH																	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana (Dokumen)	4	188.613.600		1.999.800		56.466.700		14.608.800		115.033.300	4	188.108.600	100,00%	99,73%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Administrasi Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti (18 Dokumen)	3	152.948.600	1	1.999.800	1	45.666.700	1	13.759.800	-	91.018.300	3	152.444.600	100,00%	99,67%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	18.700.000	-	-	1	4.500.000	-	-	-	14.200.000	1	18.700.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	123.448.600	1	1.999.800	1	37.416.700	1	13.759.800	1	69.768.300	4	122.944.600	100,00%	99,59%		Sisa Anggaran Honorarium TIM TPID. Adapun Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yaitu : 1.Dokumen Gas LPG 3 Kg. 2. Dokumen Laporan TPID 3. Dokumen Laporan Harga Bahan-Bahan Pokok
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	10.800.000	-	-	-	3.750.000	-	-	1	7.050.000	1	10.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan SDA Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti (Kebijakan)	3	35.665.000	1	-	1	10.800.000	1	849.000	-	24.015.000	3	35.664.000	100,00%	100,00%		

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	11.025.000	-	-	-	4.900.000	-	-	1	6.125.000	1	11.025.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	12.100.000	-	-	1	3.600.000	-	-	-	8.499.000	1	12.099.000	100,00%	99,99%		Tidak Ada
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	2	12.540.000	-	-	1	2.300.000	1	849.000	-	9.391.000	2	12.540.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,73%		
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				188.613.600	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**99,73%**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	13.315.985.831		2.725.693.512		3.865.743.684		2.757.455.933		3.374.114.035	100	12.723.007.164	100,00%	95,55%	Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (%)	100	598.193.212	25	38.394.800	50	138.509.180	75	124.413.800	100	295.439.466	100	596.757.246	100,00%	99,76%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	128.462.212	1	2.441.100	-	82.475.000	-	14.367.700	1	29.076.000	2	128.359.800	100,00%	99,92%		Pada TW 1 ada Realisasi Kegiatan Berupa Renja Awal dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 2.441.100 untuk belanja Bahan Cetak. Tw 2 Terdapat Realisasi Keuangan Sebesar Rp.82.475.000 untuk Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah. TW3 Tardapat Realisasi Keuangan sebesar Rp.14.367.700 untuk Belanja ATK,Bahan Cetak dan Perjalanan Dinas Dalan Daerah. TW4 Terdapat Ralisasi Kegiatan Berupa Renja Perebahan dan Realisasi Keuangan Sebear Rp. 29.076.000 untuk belanja ATK,Lembur dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	67.869.000	1	4.280.000	-	-	-	8.830.000	-	54.757.900	1	67.867.900	100,00%	100,00%		Pada TW 1ada Realisasi Kegiatan Berupa Dokumen RKA dan Realisasi Keuangan sebesar RP. 4.280.000 untuk Belanja Bahan/Alat Kegiatan Kantor. TW2 Tidak Ada Realisasi. TW3 Terdapat Realisasi Keuangan Sebesar Rp.8.830.000 untuk Belanja Bahan Cetak dan Lembur. TW4 Terdapat Realisasi Keuangan sebesar Rp.54.757.900.,untuk Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	16.033.500	-	-	-	-	-	7.017.900	1	8.955.000	1	15.972.900	100,00%	99,62%		Pada TW1 dan TW2 Belum Ada Realisasi. TW3 Terdapat Realisasi Keuangan sebesar Rp.7.017.900., untuk Belanja Bahan Cetak. TW4 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Dokumen RKA Perubahan dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp.8.955.000., untuk Belanja ATK dan Lembur.
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	22.275.500	1	7.305.000	-	-	-	13.350.000	-	1.605.000	1	22.260.000	100,00%	99,93%		Pada TW1 ada Realisasi Kegiatan Berupa Dokumen DPA dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp.7.305.000.,untuk Belanja ATK,Bahan Cetak dan Lembur. TW2 Tidak Ada Realisasi. TW 3 Terdapat Realisasi Keuangan Sebesar Rp.13.350.000., untuk Belanja Lembur. TW4 Terdapat Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.605.000., untuk Belanja ATK dan Lembur.

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	93.935.700	-	-	-	-	-	3.690.000	1	89.688.520	1	93.378.520	100,00%	99,41%		Pada TW1 dan TW2 Belum ada Realisasi. TW3 Terdapat Realisasi Keuangan sebesar Rp.3.690.000., untuk Belanja Lembur. TW4 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Dokumen DPA Perubahan dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp.89.688.520.,untuk Belanja ATK,Bahan Cetak, Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dianas Dalam Kota.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	62.873.800	1	6.823.800	-	-	-	-	-	55.358.896	1	62.182.696	100,00%	98,90%		Pada TW1 Terdapat Realisasi Keiatan Berupa Dokumen Lakip dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 6.823.800.,untuk Belanja Bahan Kegiatan Kantor dan Lembur. TW2 dan TW3 Tidak terdapat Realisasi. TW4 Terdapat Realisasi Keuangan sebesar Rp.55.358.896., untuk Belanja Alat/Bahan Kegiatan kantor, Lembur dan Perjalanan Dinas Biasa.
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	206.743.500	1	17.544.900	1	56.034.180	1	77.158.200	1	55.998.150	4	206.735.430	100,00%	100,00%		Pada TW 1 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Laporan hasil Emonev TW1 dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp.17.544.900., untuk Belanja Bahan Cetak, Lembur dan Perjalanan Dinas dalam Negeri. TW2 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Laporan Emonev TW2 dan Realissi Keuangan Sebesar Rp.56.034.180.,untuk Belanja Lembur dan Perjalanan Dinas Biasa. TW3 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Laporan Hasil Emonev TW3 dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp.77.158.200.,untuk Belanja Bahan cetak, Lembur dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. TW4 Terdapat Realisasi Kegiatan berupa Laporan Emonev TW4 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.55.998.150., untuk Belanja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	12.605.809.619	21	2.660.955.712	33	3.718.599.504	72	2.629.207.133	100	3.011.586.869	100	12.020.349.218	100,00%	95,36%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	115	11.906.263.219	115	2.552.330.712	115	3.557.459.504	115	2.479.835.333	115	2.738.944.069	115	11.328.569.618	100,00%	95,15%		Reaslisasi Penyediaan Gaji ASN Sesuai Dengan Jumlah
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	900	621.168.000	215	108.625.000	506	148.280.000	843	145.651.800	1.421	211.065.000	1.421	613.621.800	100,00%	98,79%		Pada TW 1 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa 215 Dokumen SPP yang di Verifikasi dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.108.625000., untuk Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan dan Lembur. TW2 Terdapat Realisasi kegiatan mencapai 505 Dokumen SPP yang di Verifikasi dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.148.280.000., untuk Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan Belanja Lembur dan Pada TW1 Belum Ada Realisasi, TW2 Terdapat
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6	8.919.600	-	-	3	-	-	3.720.000	3	5.194.600	6	8.914.600	100,00%	99,94%		Realisasi kegiatan Berupa 3 Dokumen yaitu Laporan Semesteran Bendahara Persediaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. TW3 Terdapat Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 3.720.000., untuk Belanja Jasa Kantor. TW4 Terdapat Realisasi kegiatan Berupa 3 Dokumen yaitu Laporan Semesteran Bendahara Persediaan Bendahara
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	27.526.800	-	-	-	-	-	-	1	27.515.300	1	27.515.300	100,00%	99,96%		Pada TW1,TW2 dan TW3 Belum Ada Realisasi. TW4 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa 1 Dokumen Calk dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp.27.515.300., untuk Belanja ATK,Bahan Cetak,dan belanja Jasa kantor.

		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	28.045.200	-	-	1	12.860.000	-	-	-	15.042.050	1	27.902.050	100,00%	99,49%	Pada TW1 Belum Ada Realisasi, TW2 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Dokumen Pemeriksaan BPK dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp.12.860.000.,untuk Belanja ATK dan Bahan Cetak. TW3 Tidak Ada Realisasi. TW 4 Terdapat Realisasi Keuangan sebesar Rp.15.042.050.,untuk Belanja ATK,Bahan Cetak dan Jasa kantor.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	13.886.800	3	-	3	-	3	-	3	13.825.850	12	13.825.850	100,00%	99,56%	TW 1,TW2,TW3 dan TW4 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Laporan Bulanan Bendahara. TW Terdapat Realisasi Keuangan Sebesae Rp. 13.825.850.,untuk Belanja ATK, Bahan cetak dan Jasa kantor.
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	111.983.000	33	26.343.000	33	8.635.000	70	3.835.000	100	67.087.700	100	105.900.700	100,00%	94,57%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6	111.983.000	2	26.343.000	2	8.635.000	-	3.835.000	2	67.087.700	6	105.900.700	100,00%	94,57%	TW1 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Dokumen RK BMD dan RP BMD. TW2 Terdapat Realisasi Kegiatan Berupa Dokumen Rekonsiliasi BMD Semesteran dan Laporan Rekonsiliasi Barang Pakai Habis Semesteran. TW3 Tidak Ada Realisasi kegiatan. TW4 Laporan Rekonsiliasi BMD Tahunan dan Laporan Rekonsiliasi Barang Pakai habis tahunan.
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,55%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
					13.315.985.831	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**95,55%**	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	25.980.307.632		4.659.846.958		7.267.010.879		5.419.961.842		7.945.755.407	100	25.292.575.086	100,00%	97,35%	Sekretariat DPRD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan daerah (1)	100	3.446.438.371	25	594.771.986	25	1.059.700.589	25	742.939.333	25	976.335.934	100	3.373.747.842	100,00%	97,89%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	3.014.383.371	34	521.751.986	34	970.722.386	34	705.457.536	34	743.997.731	34	2.941.929.639	100,00%	97,60%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6	432.055.000	2	73.020.000	1	88.978.203	1	37.481.797	2	232.338.203	6	431.818.203	100,00%	99,95%		Tidak Ada
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah (1)	100	2.282.364.148	25	220.779.080	25	363.413.854	25	466.885.000	25	1.214.736.384	100	2.265.814.318	100,00%	99,27%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000	-	-	1	7.801.000	1	-	1	16.500.000	1	24.301.000	100,00%	97,20%		Realisasi belanja TW III yaitu Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan pada TW 4 berupa Dokumen Nota Pesanan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	963.075.000	-	-	-	-	1	324.000.000	1	633.964.000	1	957.964.000	100,00%	99,47%		Tidak Ada
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	35.000.000	-	-	-	-	-	-	4	34.509.068	4	34.509.068	100,00%	98,60%		Tidak Ada

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	85.948.600	-	-	2	22.450.000	1	27.500.000	1	33.500.000	4	83.450.000	100,00%	97,09%		Tidak Ada
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	1.173.340.548	10	220.779.080	10	333.162.854	5	115.385.000	10	496.263.316	35	1.165.590.250	100,00%	99,34%		Tidak Ada
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)	100	2.306.414.150	-	-	50	1.647.134.000	25	-	25	529.469.426	100	2.176.603.426	100,00%	94,37%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	1.935.245.400	1	-	3	1.647.134.000	2	-	4	165.703.500	10	1.812.837.500	100,00%	93,67%		Realiasi TW I dilaksanakan pada TW II Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sedangkan TW III terealiasi pada TW IV Dokumen berupa SPK
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	371.168.750	-	-	-	-	-	-	1	363.765.926	1	363.765.926	100,00%	98,01%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1)	100	2.961.547.600	25	411.768.147	25	578.117.287	25	637.213.971	25	1.220.082.502	100	2.847.181.907	100,00%	96,14%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	132.645.400	1	29.525.100	1	34.998.900	1	22.576.000	1	45.249.600	4	132.349.600	100,00%	99,78%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	238.000.000	5	29.241.047	8	61.668.387	2	14.581.971	9	85.879.286	24	191.370.691	100,00%	80,41%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.590.902.200	3	353.002.000	3	481.450.000	3	600.056.000	3	1.088.953.616	12	2.523.461.616	100,00%	97,40%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	485.150.000	25	47.783.978	25	53.628.900	25	41.577.000	25	135.460.200	100	278.450.078	100,00%	57,39%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	410.500.000	10	47.783.978	10	46.828.900	5	41.577.000	5	97.430.200	30	233.620.078	100,00%	56,91%		Tidak Ada

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	60	74.650.000	17	-	11	6.800.000	19	-	13	38.030.000	60	44.830.000	100,00%	60,05%		Belanja pemeliharaan TW II dan TW III yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan pada Perubahan Anggaran yaitu TW IV berupa dokumen Nota Pesananan
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)	100	13.206.513.363	25	3.228.603.767	25	3.214.671.249	25	3.280.036.538	25	3.336.730.961	100	13.060.042.515	100,00%	98,89%		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	30	12.973.893.363	30	3.228.603.767	30	3.214.671.249	30	3.093.363.338	30	3.293.030.961	30	12.829.669.315	100,00%	98,89%		Tidak Ada
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	3	142.620.000	-	-	-	-	2	96.703.200	1	43.700.000	3	140.403.200	100,00%	98,45%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	30	90.000.000	-	-	-	-	30	89.970.000	-	-	30	89.970.000	100,00%	99,97%		Tidak Ada
	Layanan Administrasi DPRD	persentase layanan administrasi DPRD (%)	100	1.291.880.000	25	156.140.000	25	350.345.000	25	251.310.000	25	532.940.000	100	1.290.735.000	100,00%	99,91%		
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	734.970.000	3	91.920.000	3	63.280.000	3	168.250.000	3	410.690.000	12	734.140.000	100,00%	99,89%		Tidak Ada
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4	556.910.000	1	64.220.000	1	287.065.000	1	83.060.000	1	122.250.000	4	556.595.000	100,00%	99,94%		Tidak Ada
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	97,35%		
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	SEKRETARIAT DPRD																	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang didukung (%)	0	11.945.730.869		2.602.171.832		3.449.458.114		2.100.955.416		3.784.245.338	-	11.936.830.700	0,00%	99,93%	Sekretariat DPRD	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	100	352.906.869	-	-	-	-	50	300.000.000	50	52.906.700	50	352.906.700	50,00%	100,00%		
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	1	52.906.869	-	-	-	-	-	-	1	52.906.700	1	52.906.700	100,00%	100,00%		Tidak Ada

	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	1	300.000.000	-	-	-	-	1	300.000.000	-	-	1	300.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD (%)	100	894.000.000	25	-	25	126.000.000	25	126.000.000	25	635.500.000	100	887.500.000	100,00%	99,27%		
	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	60	390.000.000	-	-	-	-	-	-	60	383.500.000	60	383.500.000	100,00%	98,33%		Tidak Ada
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	5	288.000.000	-	-	2	72.000.000	2	72.000.000	1	144.000.000	5	288.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia (orang)	7	216.000.000	7	-	7	54.000.000	7	54.000.000	7	108.000.000	7	216.000.000	100,00%	100,00%		Belanja Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi TW I dilaksanakan pada TW II berupa Dokumen Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (%)	100	2.176.569.900	25	714.196.600	25	181.860.000	25	653.890.696	25	626.622.604	100	2.176.569.900	100,00%	100,00%		
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	35	1.500.000.000	10	390.880.000	10	181.860.000	10	653.890.696	5	273.369.304	35	1.500.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	676.569.900	3	323.316.600	3	-	3	-	3	353.253.300	3	676.569.900	100,00%	100,00%		Pelaksanaan Kegiatan Reses TW II dan TW III dilaksanakan pada Perubahan Anggaran TW IV berupa Dokumen Reses Anggota per Dapil
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerjasama daerah (%)	100	888.400.000	25	172.936.000	25	120.500.000	25	165.600.000	25	426.964.000	100	886.000.000	100,00%	99,73%		
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	65	888.400.000	25	172.936.000	25	120.500.000	10	165.600.000	5	426.964.000	65	886.000.000	100,00%	99,73%		Tidak Ada
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD (%)	100	7.633.854.100	25	1.715.039.232	25	3.021.098.114	25	855.464.720	25	2.042.252.034	100	7.633.854.100	100,00%	100,00%		

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	25	7.633.854.100	10	1.715.039.232	8	3.021.098.114	4	855.464.720	3	2.042.252.034	25	7.633.854.100	100,00%	100,00%		Tidak Ada
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,93%		
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			37.926.038.501		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**98,16%**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		SEKRETARIAT DAERAH																	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejateraan Yang Dilegal Formalkan (%)	100	1.265.562.300		409.333.620		97.852.800		242.489.164		513.828.946	100	1.263.504.530	100,00%	99,84%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Evaluasi kinerja kecamatan Persentase tapal batas yang ditetapkan (Peringkat 100 %)	100	1.235.562.300	23	409.333.620	54	97.852.800	79	242.489.164	79	483.828.946	79	1.233.504.530	78,50%	99,83%		
		Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	3	277.704.900	-	-	1	64.459.800	1	6.850.000	1	205.558.901	3	276.868.701	100,00%	99,70%		Terdapat Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Sigi Kota dan Kantor Camat Nokilalaki
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	5	234.909.200	-	-	1	1.585.200	3	116.452.584	-	116.736.965	4	234.774.749	80,00%	99,94%		1. Terdapat Sisa Pembayaran pada kegiatan Pembangunan Tugu Batas Antara Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kab. Sigi dengan Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu. 2. Kegiatan tidak mencapai 100% dikarenakan Batas Antara Desa Wayu Kecamatan Marawola barat dengan Desa Balane Kecamatan Kinovaro masih dalam tahap penyelesaian
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	5	722.948.200	2	409.333.620	1	31.807.800	1	119.186.580	1	161.533.080	5	721.861.080	100,00%	99,85%		Terdapat Sisa Belanja Honorarium Narasumber dan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan BIMTEK LPPD, LKPJ dan RLPPD
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah (%)	100	30.000.000	-	-	-	-	-	-	100	30.000.000	100	30.000.000	100,00%	100,00%		
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	96,29%	99,84%		
						Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					1.265.562.300	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**96,29%**	**99,84%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (%)	100	4.334.966.081		715.940.438		1.342.833.480		1.390.536.280		688.388.971	100	4.137.699.169	100,00%	95,45%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD (1)	1	31.733.100	-	-	-	-	1	6.765.000	-	23.796.900	1	30.561.900	100,00%	96,31%		1 Dokumen perencanaan dan keuangan, TW 4 sisa realisasi keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	12.036.200	1	-	-	-	-	-	-	11.265.000	0	11.265.000	25,00%	93,59%		Dokumen Renja, LAKIP di TW 1 realisasi uangnya di TW 4
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	14.115.000	-	-	-	-	1	6.765.000	-	7.350.000	1	14.115.000	100,00%	100,00%		1 Dokumen DPA, RKA TW III, uang di TW 4 sisa lealisasi
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.581.900	-	-	-	-	-	-	1	5.181.900	1	5.181.900	100,00%	92,83%		Dokumen DPA perubahan di TW IV menghasilkan 1 dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	3.689.594.781	100	646.760.938	100	1.232.986.741	100	1.229.259.338	100	394.552.176	100	3.503.559.193	100,00%	94,96%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	3.622.154.781	38	635.520.938	38	1.216.126.741	38	1.212.399.338	-	372.072.176	29	3.436.119.193	75,00%	94,86%		Tidak Ada

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	67.440.000	1	11.240.000	1	16.860.000	1	16.860.000	-	22.480.000	1	67.440.000	75,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi BMD yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (1)	100	13.680.000	100	1.600.000	100	2.400.000	100	2.400.000	100	6.480.000	100	12.880.000	100,00%	94,15%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6	13.680.000	-	1.600.000	1	2.400.000	2	2.400.000	3	6.480.000	6	12.880.000	100,00%	94,15%		TW 1 kegiatan berjalan di TW 2 laporan dari TW 1 bentuk laporan penatausahaan barang, TW 3 menghasilkan 2 laporan dari TW 2 berupa
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	131.166.300	-	-	100	25.758.239	100	30.812.442	100	72.102.895	100	128.673.576	100,00%	98,10%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.493.300	-	-	-	-	1	9.492.500	-	-	1	9.492.500	100,00%	99,99%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.380.000	-	-	1	5.190.000	1	5.190.000	-	-	1	10.380.000	50,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	111.293.000	1	-	1	20.568.239	1	16.129.942	1	72.102.895	1	108.801.076	100,00%	97,76%		TW 1 menghasilkan 1 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi, uangnya di TW2
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (%)	100	102.171.900	-	-	-	-	100	46.600.000	100	54.566.000	200	101.166.000	200,00%	99,02%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	102.171.900	-	-	-	-	1	46.600.000	1	54.566.000	1	101.166.000	100,00%	99,02%		Tidak Ada

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	167.500.000	100	30.400.000	100	42.800.000	100	38.700.000	100	55.600.000	100	167.500.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	167.500.000	1	30.400.000	1	42.800.000	1	38.700.000	1	55.600.000	1	167.500.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	199.120.000	100	37.179.500	100	38.888.500	100	35.999.500	100	81.291.000	100	193.358.500	100,00%	97,11%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	192.300.000	2	37.179.500	4	38.888.500	4	35.999.500	4	78.306.000	14	190.373.500	100,00%	99,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	2	6.820.000	1	-	1	-	-	-	-	2.985.000	2	2.985.000	100,00%	43,77%		Pemeliharaan di TW 1 ada 1 unit dan di TW 2 ada 1 unit realisasi keuangan di TW 4
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										78,39%	95,45%		
						Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA) BERSKALA NASIONAL (Jumlah)	3	137.895.100		-		24.451.900		37.044.606		73.512.800	3	135.009.306	100,00%	97,91%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan regulasi insentif yang di legal formalkan (reegulasi)	1	137.895.100	-	-	1	24.451.900	1	37.044.606	1	73.512.800	1	135.009.306	75,00%	97,91%		
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	137.895.100	-	-	1	24.451.900	1	37.044.606	1	73.512.800	1	135.009.306	100,00%	97,91%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,91%		

																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DITINDAK LANJUTI (%)	100	332.060.000		-		103.018.100		117.899.832		105.029.684	100	325.947.616	100,00%	98,16%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Penanaman Modal yang ditindak lanjuti (jumlah)	2	332.060.000	-	-	2	103.018.100	2	117.899.832	-	105.029.684	-	325.947.616	0,00%	98,16%		TW 4 realisasi keuangan dari TW 3
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	316.517.000	-	-	1	98.035.100	1	117.899.832	1	94.629.684	1	310.564.616	100,00%	98,12%		Tidak Ada
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	15.543.000	-	-	-	4.983.000	-	-	1	10.400.000	1	15.383.000	100,00%	98,97%		TW 2 perjalanan dinas untuk melakukan pengambilan data penyusunan dokumen, TW 4 menghasilkan 1 dokumen
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,16%		
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PERIZINAN USAHA YANG DITERBITKAN (%)	100	78.252.400		3.150.000		12.096.000		-		62.706.400	100	77.952.400	100,00%	99,62%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi perijinan usaha (Hari)	3	78.252.400	3	3.150.000	3	12.096.000	-	-	-	62.706.400	-	77.952.400	0,00%	99,62%		TW 4 realisasi keungan dari TW 2
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25	57.099.400	-	-	5	12.096.000	10	-	10	45.003.400	25	57.099.400	100,00%	100,00%		TW 3 10 pelaku usah realisasi keuangan ada di TW 4

		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	10	21.153.000	5	3.150.000	-	-	-	-	5	17.703.000	10	20.853.000	100,00%	98,58%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,62%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAPORAN PENANAMAN MODAL PERUSAHAAN YANG TEPAT WAKTU (LKPN) (%)	100	543.060.498		-		212.123.532		78.230.000		248.940.578	100	539.294.110	100,00%	99,31%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (Dokumen)	3	543.060.498	-	-	3	212.123.532	3	78.230.000	-	248.940.578	-	539.294.110	0,00%	99,31%		TW 2 dan 3 Menghasilkan 3 dokumen realisasi capaian investasi, TW 4 sisa realisasi keuangan
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2	230.257.800	-	-	2	155.119.932	2	-	2	71.525.000	2	226.644.932	100,00%	98,43%		TW 4 Realisasi keuangan di TW 3
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	10	190.782.798	-	-	3	35.399.500	3	47.114.600	4	108.115.678	10	190.629.778	100,00%	99,92%		Tidak Ada

		Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2	122.019.900	-	-	2	21.604.100	2	31.115.400	2	69.299.900	2	122.019.400	100,00%	100,00%		TW 2 dan 3 Melaksanakan kegiatan pengawasan dan di TW 4 realisasi keungan pada TW 3
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,31%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				5.426.234.079		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**82,74%**	**96,12%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
v		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (persen)	100	247.328.788.813		35.135.213.965		130.055.318.376		37.370.034.629		35.174.039.798	100	237.734.606.768	100,00%	96,12%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	247.264.834.813	100	35.135.213.965	100	130.055.318.376	100	37.356.099.239	100	35.124.039.798	100	237.670.671.378	100,00%	96,12%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	211	247.264.834.813	211	35.135.213.965	211	130.055.318.376	211	37.356.099.239	211	35.124.039.798	211	237.670.671.378	100,00%	96,12%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	3.954.000	-	-	25	-	50	3.954.000	25	-	100	3.954.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3.954.000	-	-	-	-	1	3.954.000	-	-	1	3.954.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	60.000.000	-	-	20	-	10	9.981.390	70	50.000.000	100	59.981.390	100,00%	99,97%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	60.000.000	-	-	2	-	2	9.981.390	8	50.000.000	12	59.981.390	100,00%	99,97%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,12%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	

v		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase terlaksananya SPM pendidikan (%)	100	58.766.697.525		-		1.526.464.504		20.918.492.024		33.748.301.400	100	56.193.257.928	100,00%	95,62%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (0.85)	80	35.536.516.410	-	-	30	796.361.084	10	13.178.857.152	40	21.380.899.050	80	35.356.117.286	100,00%	99,49%		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5	432.706.120	-	-	-	-	2	107.254.421	3	321.563.762	5	428.818.183	100,00%	99,10%		Tidak Ada
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5	206.459.250	-	-	-	-	2	58.991.631	3	147.384.859	5	206.376.490	100,00%	99,96%		Tidak Ada
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	6	1.297.826.640	-	-	-	-	3	386.428.873	3	909.323.102	6	1.295.751.975	100,00%	99,84%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	160.434.250	-	-	-	-	1	43.808.771	1	116.092.676	2	159.901.447	100,00%	99,67%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4	394.076.000	-	-	-	-	1	112.558.214	3	280.898.805	4	393.457.019	100,00%	99,84%		Tidak Ada
		Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	7	416.975.100	-	-	-	-	2	41.371.000	5	371.124.000	7	412.495.000	100,00%	98,93%		Tidak Ada
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	50	1.508.980.000	-	-	-	-	-	-	50	1.508.980.000	50	1.508.980.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	8	540.000.000	-	-	-	-	1	40.000.000	7	497.455.000	8	537.455.000	100,00%	99,53%		Tidak Ada
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	495	286.950.700	-	-	300	172.166.000	95	52.235.000	100	61.129.000	495	285.530.000	100,00%	99,50%		Tidak Ada

		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	2500	25.202.929.152	2.500	-	2.500	-	2.500	11.005.167.844	2.500	14.197.761.308	2.500	25.202.929.152	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	10	1.771.177.538	-	-	2	478.000.084	1	736.487.626	7	528.204.955	10	1.742.692.665	100,00%	98,39%		Tidak Ada
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1.618.988.000	-	-	1	130.895.000	1	149.100.000	1	1.337.071.200	1	1.617.066.200	100,00%	99,88%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	22	1.699.013.660	-	-	1	15.300.000	7	445.453.772	14	1.103.910.383	22	1.564.664.155	100,00%	92,09%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun (0.8)	80	15.588.434.995	-	-	25	538.700.000	20	5.384.913.080	35	9.532.057.847	80	15.455.670.927	100,00%	99,15%		
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4	580.395.600	-	-	-	-	1	140.944.364	3	397.115.069	4	538.059.433	100,00%	92,71%		Tidak Ada
		Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	6	2.126.482.201	-	-	-	-	2	378.314.302	4	1.659.749.635	6	2.038.063.937	100,00%	95,84%		Tidak Ada
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	854	1.605.000.000	-	-	654	398.400.000	-	-	200	1.206.600.000	854	1.605.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	50	245.131.000	-	-	30	129.500.000	10	27.435.000	10	87.559.000	50	244.494.000	100,00%	99,74%		Tidak Ada
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50	10.800.000	-	-	50	10.800.000	-	-	-	-	50	10.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	2500	10.177.301.194	2.500	-	2.500	-	2.500	4.644.121.265	2.500	5.533.179.929	2.500	10.177.301.194	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	50	107.625.000	-	-	-	-	15	25.075.000	35	82.550.000	50	107.625.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4	735.700.000	-	-	-	-	1	169.023.149	3	565.304.214	4	734.327.363	100,00%	99,81%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase angka Partisipasi Sekolah 4-6 Tahun (0.85)	80	5.319.846.120	-	-	25	191.403.420	20	2.354.721.792	35	513.444.503	80	3.059.569.715	100,00%	57,51%		
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5	279.692.750	-	-	-	-	3	150.000.000	2	70.188.000	5	220.188.000	100,00%	78,72%	Penawaran harga dari penyedia lebih rendah dari pagu anggaran yang	Tidak Ada
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	10	471.390.720	-	-	3	191.403.420	6	150.794.300	1	129.193.000	10	471.390.720	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Paud yang mengelola Dana BOP Paud (orang)	100	4.198.200.000	100	-	-	-	100	2.005.500.000	-	-	50	2.005.500.000	50,00%	47,77%	Dana BOP Tahap 2 tidak dicairkan karena sebagian sekolah-sekolah	Tidak Ada
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	3	370.562.650	-	-	-	-	1	48.427.492	2	314.063.503	3	362.490.995	100,00%	97,82%	Penawaran harga dari penyedia lebih rendah dari pagu anggaran yang ditetapkan diDPA	Tidak Ada
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase jumlah kelulusan kejar Paket A dan B (%)	80	2.321.900.000	-	-	-	-	20	-	60	2.321.900.000	80	2.321.900.000	100,00%	100,00%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	100	2.321.900.000	-	-	-	-	25	-	75	2.321.900.000	100	2.321.900.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,43%	95,62%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

v		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Guru yang memenuhi kualifikasi (%)	100	4.767.354.800		-		90.664.800		2.052.242.000		2.620.729.301	100	4.763.636.101	100,00%	99,92%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-rata Rasio Guru terhadap murid per sekolah (Guru/murid)	21	4.767.354.800	-	-	5	90.664.800	-	2.052.242.000	16	2.620.729.301	21	4.763.636.101	100,00%	99,92%		
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	9	4.767.354.800	-	-	2	90.664.800	2	2.052.242.000	5	2.620.729.301	9	4.763.636.101	100,00%	99,92%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,92%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
v		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase aset budaya yang dilestarikan (%)	100	12.641.709.407		-		-		-		12.628.080.100	100	12.628.080.100	100,00%	99,89%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang di bina (%)	8	12.641.709.407	-	-	2	-	1	-	5	12.628.080.100	8	12.628.080.100	100,00%	99,89%		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	16	205.800.000	-	-	-	-	-	-	16	205.800.000	16	205.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	6	12.435.909.407	-	-	-	-	1	-	5	12.422.280.100	6	12.422.280.100	100,00%	99,89%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,89%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
v		**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase literasi sejarah wilayah (%)	100	1.150.000.000		-		-		448.200.000		701.800.000	100	1.150.000.000	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga sejarah lokal yang dibina (%)	100	1.150.000.000	-	-	25	-	25	448.200.000	50	701.800.000	100	1.150.000.000	100,00%	100,00%		
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	7	1.150.000.000	-	-	-	-	3	448.200.000	4	701.800.000	7	1.150.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
v		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu (%)	100	349.000.078		-		-		81.112.400		215.998.047	100	297.110.447	100,00%	85,13%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah SK penetapan cagar Budaya (jumlah)	4	50.000.000	-	-	1	-	1	-	2	50.000.000	4	50.000.000	100,00%	100,00%		
		Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	10	50.000.000	-	-	-	-	3	-	7	50.000.000	10	50.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik (%)	45	299.000.078	-	-	25	-	-	81.112.400	20	165.998.047	45	247.110.447	100,00%	82,65%		
		Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	3	299.000.078	-	-	-	-	1	81.112.400	1	165.998.047	2	247.110.447	66,67%	82,65%	Pada kegiatan ini pencairannya tidak 100 % karena	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										71,44%	85,13%		
						Predikat Kinerja										Sedang	Tinggi		
					325.003.550.623	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,32%**	**96,23%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	5.248.641.362		894.910.164		1.759.517.859		1.064.964.939		1.365.416.034	100	5.084.808.996	100,00%	96,88%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	7.550.000	-	-	20	-	40	-	40	7.550.000	100	7.550.000	100,00%	100,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	7.550.000	-	-	-	-	-	-	6	7.550.000	6	7.550.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	4.324.224.563	97	762.885.164	98	1.493.777.572	99	884.897.724	100	1.024.523.300	100	4.166.083.760	100,00%	96,34%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	4.182.474.563	45	751.805.164	45	1.450.327.572	45	872.437.724	45	949.763.300	45	4.024.333.760	100,00%	96,22%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	141.750.000	1	11.080.000	1	43.450.000	1	12.460.000	1	74.760.000	1	141.750.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	202.794.799	-	-	20	74.613.085	40	31.828.215	40	93.606.992	100	200.048.292	100,00%	98,65%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	20.006.799	-	-	2	9.000.000	-	-	2	11.006.700	4	20.006.700	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	182.788.000	-	-	1	65.613.085	1	31.828.215	1	82.600.292	1	180.041.592	100,00%	98,50%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Luaran Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Masukan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah (1)	100	668.572.000	97	132.025.000	98	178.127.202	99	137.826.000	100	220.308.442	100	668.286.644	100,00%	99,96%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	31.000.000	-	-	4	5.012.202	4	3.026.000	4	22.948.442	12	30.986.644	100,00%	99,96%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	147.572.000	12	45.750.000	12	49.515.000	12	22.000.000	12	30.040.000	12	147.305.000	100,00%	99,82%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	490.000.000	12	86.275.000	12	123.600.000	12	112.800.000	12	167.320.000	12	489.995.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	45.500.000	-	-	100	13.000.000	100	10.413.000	100	19.427.300	75	42.840.300	75,00%	94,15%		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45	22.500.000	-	-	-	-	32	10.413.000	13	9.427.300	45	19.840.300	100,00%	88,18%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45	23.000.000	-	-	32	13.000.000	6	-	7	10.000.000	45	23.000.000	100,00%	100,00%		1 unit kendaraan R2 terdampak gempa likuifaksi di jono kec. Sigi biromaru masih terdaftar, 1 unit kendaraan R2 hilang di rumah PPL Perikanan masih terdaftar
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,88%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Neraca Bahan Makanan (NBM) (NBM)	95	2.440.456.250		-		752.828.710		459.060.955		1.176.138.580	95	2.388.028.245	100,00%	97,85%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan (Persentase (%))	100	2.376.725.000	-	-	20	734.235.530	40	430.566.905	40	1.159.538.580	100	2.324.341.015	100,00%	97,80%		
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	100	2.325.025.000	-	-	20	713.635.530	40	430.566.905	40	1.128.438.580	100	2.272.641.015	100,00%	97,75%		Tidak Ada
		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	*Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	100	51.700.000	-	-	20	20.600.000	-	-	80	31.100.000	100	51.700.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi (Persentase (%))	86	63.731.250	-	-	20	18.593.180	30	28.494.050	36	16.600.000	86	63.687.230	100,00%	99,93%		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4	63.731.250	-	-	2	18.593.180	1	28.494.050	1	16.600.000	4	63.687.230	100,00%	99,93%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,85%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan (Persentase)	90	171.371.000		15.500.000		120.450.000		23.350.000		11.750.000	90	171.050.000	100,00%	99,81%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	

		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya data penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan (Dokumen)	5	171.371.000	5	15.500.000	5	120.450.000	5	23.350.000	5	11.750.000	5	171.050.000	100,00%	99,81%		
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	2	171.371.000	2	15.500.000	2	120.450.000	2	23.350.000	2	11.750.000	2	171.050.000	100,00%	99,81%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,81%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman (Persentase)	100	16.257.250		-		-		6.950.000		9.307.250	100	16.257.250	100,00%	100,00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah (Persentase (%))	100	16.257.250	-	-	-	-	50	6.950.000	50	9.307.250	100	16.257.250	100,00%	100,00%		
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	16.257.250	-	-	-	-	1	6.950.000	1	9.307.250	2	16.257.250	100,00%	100,00%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	NTN Perikanan Tangkap (Nilai)	108	82.350.000		3.800.000		-		21.800.000		56.650.000	108	82.250.000	100,00%	99,88%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Kelompok)	100	82.350.000	20	3.800.000	-	-	30	21.800.000	50	56.650.000	100	82.250.000	100,00%	99,88%		
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	3	82.350.000	1	3.800.000	-	-	1	21.800.000	1	56.650.000	3	82.250.000	100,00%	99,88%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,88%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	NTN Perikanan Budidaya (Skor)	107	1.150.372.591		10.250.000		100.266.000		353.217.300		647.717.359	107	1.111.450.659	100,00%	96,62%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	200	1.150.372.591	197	10.250.000	198	100.266.000	199	353.217.300	200	647.717.359	200	1.111.450.659	100,00%	96,62%		

		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	20	1.150.372.591	5	10.250.000	5	100.266.000	5	353.217.300	5	647.717.359	20	1.111.450.659	100,00%	96,62%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,62%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					9.109.448.453	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**97,19%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	3.475.674.233		575.812.632		1.156.433.603		555.033.697		932.320.489	100	3.219.600.421	100,00%	92,63%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.819.307.133	25	531.912.632	25	971.552.803	25	479.243.597	25	605.672.064	100	2.588.381.096	100,00%	91,81%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	2.698.107.133	32	515.472.632	32	944.252.803	32	471.023.597	32	536.782.064	32	2.467.531.096	100,00%	91,45%	Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	121.200.000	1	16.440.000	1	27.300.000	1	8.220.000	1	68.890.000	1	120.850.000	100,00%	99,71%	Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	18.360.000	25	1.700.000	25	2.550.000	25	850.000	25	13.020.000	100	18.120.000	100,00%	98,69%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	18.360.000	1	1.700.000	1	2.550.000	1	850.000	1	13.020.000	1	18.120.000	100,00%	98,69%	Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	137.688.500	-	-	50	40.788.000	25	4.108.000	25	78.086.880	100	122.982.880	100,00%	89,32%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	32.179.500	-	-	1	6.783.000	1	2.808.000	1	21.880.500	3	31.471.500	100,00%	97,80%	Tidak Ada

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	105.509.000	-	-	1	34.005.000	-	1.300.000	1	56.206.380	2	91.511.380	100,00%	86,73%	realisasi kinerja tidak ada karena sudah terlaksana di TW I
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	291.073.000	25	42.200.000	25	81.721.000	25	54.711.000	25	109.099.000	100	287.731.000	100,00%	98,85%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	41.100.000	-	-	-	-	3	2.511.000	9	38.589.000	12	41.100.000	100,00%	100,00%	Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	249.973.000	2	42.200.000	4	81.721.000	4	52.200.000	2	70.510.000	12	246.631.000	100,00%	98,66%	Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	209.245.600	-	-	50	59.821.800	25	16.121.100	25	126.442.545	100	202.385.445	100,00%	96,72%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	185.445.600	-	-	8	58.571.800	2	13.366.100	5	107.192.545	15	179.130.445	100,00%	96,59%	Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	1	8.850.000	-	-	1	1.250.000	1	2.755.000	1	4.300.000	1	8.305.000	100,00%	93,84%	Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	14.950.000	-	-	-	-	-	-	1	14.950.000	1	14.950.000	100,00%	100,00%	Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,63%	
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang tersedia (%)	90,91	272.443.000		28.200.000		79.100.000		54.925.000		105.842.088	95	268.067.088	104,99%	98,39%	

		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar yang memadai (Unit)	1	262.718.000	-	28.200.000	-	79.100.000	1	47.500.000	-	103.542.088	1	258.342.088	100,00%	98,33%	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	262.718.000	-	28.200.000	-	79.100.000	1	47.500.000	1	103.542.088	1	258.342.088	100,00%	98,33%	realisasi kinerja tidak ada karena hanya honorarium petugas
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar yang layak fungsi (Pasar)	17	9.725.000	-	-	-	-	10	7.425.000	7	2.300.000	17	9.725.000	100,00%	100,00%	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	9.725.000	-	-	-	-	1	7.425.000	1	2.300.000	2	9.725.000	100,00%	100,00%	Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,39%	
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	62,5	2.085.650.000		999.972.000		41.625.000		-		1.044.018.500	63	2.085.615.500	100,00%	100,00%	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang dipantau (Komoditi)	22	2.085.650.000	22	999.972.000	22	41.625.000	22	-	22	1.044.018.500	22	2.085.615.500	100,00%	100,00%	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2.085.650.000	1	999.972.000	-	41.625.000	-	-	1	1.044.018.500	2	2.085.615.500	100,00%	100,00%	realisasi kinerja tidak ada karena hanya berisi perjalanan dinas
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	100,00%	
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang bertanda tera sah (%)	26,59	323.397.000		-		24.798.273		154.050.002		127.566.302	100	306.414.577	376,08%	94,75%	
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang di tera/tera ulang dan diawasi sesuai standar/regulasi (%)	100	323.397.000	-	-	15	24.798.273	60	154.050.002	25	127.566.302	100	306.414.577	100,00%	94,75%	
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	300	315.147.000	-	-	47	20.748.273	150	154.050.002	103	123.366.302	300	298.164.577	100,00%	94,61%	Tidak Ada

		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	50	8.250.000	-	-	25	4.050.000	-	-	25	4.200.000	50	8.250.000	100,00%	100,00%	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	94,75%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok WUB/IKM (%)	100	1.428.672.500		-		66.711.999		1.035.497.053		264.866.589	100	1.367.075.641	100,00%	95,69%	
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi (sosialisasi) pembangunan industri (Dokumen)	1	1.428.672.500	-	-	1	66.711.999	1	1.035.497.053	1	264.866.589	1	1.367.075.641	75,00%	95,69%	
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2	17.475.000	-	-	2	15.639.650	-	-	-	-	2	15.639.650	100,00%	89,50%	Tidak Ada
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	1.010.630.000	-	-	-	-	1	899.000.000	1	110.561.000	2	1.009.561.000	100,00%	99,89%	Tidak Ada
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	10	385.817.500	-	-	2	42.722.349	3	131.697.053	5	152.705.589	10	327.124.991	100,00%	84,79%	Tidak Ada

		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	10	14.750.000	-	-	5	8.350.000	1	4.800.000	4	1.600.000	10	14.750.000	100,00%	100,00%	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,69%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) (%)	0	25.900.000		-		-		-		25.900.000	58	25.900.000	0,00%	100,00%	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi ijin IKM IUI, IPUI, IUKI, IPKI (rekomendasi ijin IKM)	30	25.900.000	-	-	-	-	-	-	30	25.900.000	30	25.900.000	100,00%	100,00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada

		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	25.900.000	-	-	-	-	-	-	1	25.900.000	1	25.900.000	100,00%	100,00%	Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			100,00%	100,00%	
														Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (%)	98	-		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI (Informasi Industri)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada

		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
					7.611.736.733	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**95,55%**	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.178.537.662		376.858.490		728.875.618		424.695.837		477.378.330	100	2.007.808.275	100,00%	92,16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	2.098.537.862	25	376.858.490	25	696.252.818	25	409.610.837	25	445.103.330	100	1.927.825.475	100,00%	91,87%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	2.098.537.862	24	376.858.490	24	696.252.818	24	409.610.837	24	445.103.330	24	1.927.825.475	100,00%	91,87%		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di sesuaikan dengan jumlah pegawai
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	19.999.800	25	-	25	8.749.800	25	-	25	11.250.000	100	19.999.800	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	19.999.800	1	-	1	8.749.800	1	-	1	11.250.000	1	19.999.800	100,00%	100,00%		Pembagian Anggaran Pada Anggaran Kas berada di Triwulan II dan Triwulan IV
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase lancarnyaa Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	60.000.000	25	-	25	23.873.000	25	15.085.000	25	21.025.000	100	59.983.000	100,00%	99,97%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	60.000.000	2	-	2	23.873.000	2	15.085.000	2	21.025.000	2	59.983.000	100,00%	99,97%		Pembagian Anggaran Pada Anggaran Kas berada di Triwulan II, III dan Triwulan IV
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			100,00%	92,16%		
													Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpusyakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	44,89	806.488.000		72.920.500		190.996.980		225.768.920		295.211.282	45	784.897.682	100,00%	97,32%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Yang Terkelola Sesuai Dengan Standar Teknis (Jumlah)	10	436.419.400	2	44.780.000	2	102.594.000	3	114.529.120	3	153.642.400	10	415.545.520	100,00%	95,22%		

		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	105	20.025.000	-	-	10	1.650.000	80	17.475.000	15	900.000	105	20.025.000	100,00%	100,00%		Pembagian Anggaran Pada Anggaran Kas berada di Triwulan II, III dan Triwulan IV
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	30	370.660.000	7	44.780.000	8	76.350.000	8	87.379.620	7	143.262.400	30	351.772.020	100,00%	94,90%		Honorarium Tenaga Supir / Driver tidak dibayarkan Karena Pada Tahun ini Tidak ada Tenaga Driver
		Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan (Eksemplar)	5000	2.250.000	-	-	2.200	1.120.000	-	-	2.800	1.130.000	5.000	2.250.000	100,00%	100,00%		Pembagian Anggaran Pada Anggaran Kas berada di Triwulan II dan Triwulan IV
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	7500	43.484.400	-	-	3.750	23.474.000	2.500	9.674.500	1.250	8.350.000	7.500	41.498.500	100,00%	95,43%		Terdapat sisa anggaran pada belanja alat tulis kantor karena di sesuaikan dengan E katalog melalui pejabat pengadaan Barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat daerah Kabupaten Sigi
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca, Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Kali)	10	370.068.600	2	28.140.500	2	88.402.980	3	111.239.800	3	141.568.882	10	369.352.162	100,00%	99,81%		
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	11	224.853.000	2	28.140.500	3	56.660.700	3	55.800.200	3	83.654.500	11	224.255.900	100,00%	99,73%		Tidak Ada
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	7	24.285.600	-	-	2	-	3	16.825.600	2	7.460.000	7	24.285.600	100,00%	100,00%		Pembagian Anggaran Pada Anggaran Kas berada di Triwulan III dan Triwulan IV
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	20	81.703.000	-	-	5	23.246.200	5	21.840.000	10	36.537.182	20	81.623.382	100,00%	99,90%		Tidak Ada

		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya (Orang)	9	39.227.000	-	-	2	8.496.080	4	16.774.000	3	13.917.200	9	39.187.280	100,00%	99,90%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,32%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	75	204.511.650		18.590.000		36.390.000		22.108.000		126.606.950	75	203.694.950	100,00%	99,60%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang dikelola kabupaten (0.45)	45	169.943.950	5	18.590.000	10	35.390.000	15	22.108.000	15	93.121.650	45	169.209.650	100,00%	99,57%		
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	440	107.595.950	110	18.590.000	150	35.390.000	100	4.658.000	80	48.298.050	440	106.936.050	100,00%	99,39%		Tidak Ada
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	50	62.348.000	-	-	-	-	20	17.450.000	30	44.823.600	50	62.273.600	100,00%	99,88%		Pembagian Anggaran Pada Anggaran Kas berada di Triwulan III dan Triwulan IV
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Informasi Yang Dikelola (Unit)	3	34.567.700	3	-	3	1.000.000	3	-	3	33.485.300	3	34.485.300	100,00%	99,76%		
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	34.567.700	-	-	8	1.000.000	-	-	4	33.485.300	12	34.485.300	100,00%	99,76%		Pembagian Anggaran Pada Anggaran Kas berada di Triwulan II dan Triwulan IV
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,60%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Kegiatan)	6	8.600.000		-		-		3.330.000		5.270.000	6	8.600.000	100,00%	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Presentase Arsip dibawah 10 Tahun yang telah dimusnahkan (%)	2	8.600.000	-	-	-	-	1	3.330.000	1	5.270.000	2	8.600.000	100,00%	100,00%		
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	400	8.600.000	-	-	-	-	150	3.330.000	250	5.270.000	400	8.600.000	100,00%	100,00%		Pembagian Anggaran Pada Anggaran Kas berada di Triwulan III dan Triwulan IV

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				3,198E+09												100,00%	93,96%		
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	7.158.522.701		1.459.300.133		1.479.054.889		1.985.223.334		1.959.595.774	100	6.883.174.130	100,00%	96,15%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100,00%	100,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	7.035.830.301	-	1.459.300.133	-	1.475.054.889	-	1.950.933.334	100	1.875.193.374	100	6.760.481.730	100,00%	96,09%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85	7.030.830.301	85	1.459.300.133	85	1.475.054.889	85	1.950.933.334	85	1.870.193.374	85	6.755.481.730	100,00%	96,08%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	56.692.400	-	-	-	4.000.000	-	7.290.000	100	45.402.400	100	56.692.400	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	31.692.400	-	-	1	4.000.000	1	7.290.000	3	20.402.400	5	31.692.400	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase luaran pelaporan dokumen penyediaan jasa penunjang yang menjadi masukan dalam pengelolaan jasa penunjang urusan perangkat daerah (%)	100	56.000.000	-	-	-	-	-	27.000.000	100	29.000.000	100	56.000.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	56.000.000	1	-	1	-	1	27.000.000	1	29.000.000	1	56.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,15%		
															Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Yang Memenuhi Standar Teknis (%)	100	725.020.000		-		-		-		722.920.000	100	722.920.000	100,00%	99,71%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan benih/bibit ternak dan jenis HPT yang berkualitas (%)	100	725.020.000	-	-	-	-	-	-	100	722.920.000	100	722.920.000	100,00%	99,71%		
		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	1000	725.020.000	-	-	-	-	-	-	1.000	722.920.000	1.000	722.920.000	100,00%	99,71%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,71%		
															Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang Berkualitas Sesuai Standar Teknis (%)	100	26.429.999.900		15.750.000		15.750.000		6.356.800.439		###########	100	###########	100,00%	99,62%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkualitas sesuai standar teknis (%)	100	26.429.999.900	-	15.750.000	-	15.750.000	-	6.356.800.439	100	###########	100	###########	100,00%	99,62%		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	17	5.335.200.000	-	-	-	-	5	1.487.099.263	17	3.847.500.000	17	5.334.599.263	100,00%	99,99%		Tidak Ada
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	58	14.283.800.000	-	-	-	-	18	3.055.376.760	40	###########	58	###########	100,00%	99,48%		Tidak Ada
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3	889.200.000	-	-	-	-	-	247.909.167	3	641.250.000	3	889.159.167	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	5.921.799.900	1	15.750.000	1	15.750.000	1	1.566.415.249	1	4.298.885.181	1	5.896.800.430	100,00%	99,58%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,62%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Prevalensi Penyakit Hewan Menular (%)	2	381.150.000		-		-		24.172.000		248.267.834	2	272.439.834	100,00%	71,48%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus penyakit hewan/ternak dalam satu daerah yang berhasil dikendalikan (%)	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	100,00%	0,00%		
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan (%)	70	310.350.000	-	-	-	-	-	-	50	217.469.834	50	217.469.834	71,43%	70,07%		

		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	*Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	2	11.350.000	-	-	-	-	-	-	1	7.045.000	1	7.045.000	62,50%	62,07%		Tidak Ada
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	2	299.000.000	-	-	-	-	-	-	2	210.424.834	2	210.424.834	75,00%	70,38%		Tidak Ada
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Persentase (%))	5	70.800.000	-	-	-	-	-	24.172.000	3	30.798.000	3	54.970.000	60,00%	77,64%		
		Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	*Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2	70.800.000	-	-	-	-	-	24.172.000	2	30.798.000	2	54.970.000	100,00%	77,64%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	79,27%	71,48%		
															Predikat Kinerja	Tinggi	Sedang		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (%)	5	4.268.545.331		487.974.560		537.242.600		1.528.008.851		1.518.233.644	5	4.071.459.655	100,00%	95,38%	Dinas Peternakan dan Kesehatan	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Implementasi Program Penyuluhan Pertanian (%)	100	4.268.545.331	-	487.974.560	-	537.242.600	-	1.528.008.851	100	1.518.233.644	100	4.071.459.655	100,00%	95,38%		
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1	4.268.545.331	1	487.974.560	1	537.242.600	1	1.528.008.851	1	1.518.233.644	1	4.071.459.655	100,00%	95,38%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,38%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					38.963.237.932	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,80%**	**98,25%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dinas Sosial

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	2.828.921.542		525.033.975		1.021.103.331		535.396.156		662.935.827	100	2.744.469.289	100,00%	97,01%	Dinas Sosial	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan (Tahun)	100	2.776.365.742	100	519.033.975	100	990.953.031	100	524.118.256	100	646.113.327	100	2.680.218.589	100,00%	96,54%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	2.776.365.742	31	519.033.975	31	990.953.031	31	524.118.256	31	646.113.327	31	2.680.218.589	100,00%	96,54%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Jenis)	100	52.555.800	11	6.000.000	35	30.150.300	21	11.277.900	32	16.822.500	100	64.250.700	100,01%	122,25%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	52.555.800	3	6.000.000	3	30.150.300	3	11.277.900	3	16.822.500	12	64.250.700	100,00%	122,25%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,01%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Sosial (persentase)	100	139.408.800		21.916.313		30.150.300		29.746.973		52.550.000	98	134.363.586	98,00%	96,38%	Dinas Sosial	Jumlah KAT 1121 KK adalah target kabupaten sedangkan target Dinas hanya 25 KK yang diserahkan di dusun vonggo desa bakubakulu kecamatan Palolo sehingga target tidak tercapai
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) (persentase)	100	139.408.800	16	21.916.313	22	30.150.300	21	29.746.973	38	52.550.000	96	134.363.586	96,38%	96,38%		Jumlah KAT 1121 KK adalah target kabupaten sedangkan target Dinas hanya 25 KK yang diserahkan di dusun vonggo desa bakubakulu kecamatan Palolo sehingga target tidak tercapai
		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	*Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1121	139.408.800	25	21.916.313	25	30.150.300	25	29.746.973	25	52.550.000	25	134.363.586	2,23%	96,38%		Jumlah KAT 1121 KK adalah target kabupaten sedangkan target Dinas hanya 25 KK yang diserahkan di dusun vonggo desa bakubakulu kecamatan Palolo sehingga target tidak tercapai

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										2,23%	96,38%		
						Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (persentase)	100	8.746.912.444		363.498.800		575.760.935		800.567.280		6.930.823.496	100	8.670.650.511	100,00%	99,13%	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial (persentase)	100	997.628.344	23	228.585.900	29	286.740.000	22	210.979.250	26	261.985.211	101	988.290.361	100,54%	99,06%		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	319	245.033.000	80	35.000.000	100	55.802.400	90	84.100.900	49	63.602.132	319	238.505.432	100,00%	97,34%		Tidak Ada
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	*Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	352.560.144	20	15.558.000	20	203.815.000	20	42.819.250	20	88.162.768	20	350.355.018	100,00%	99,37%		Tidak Ada
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	870	400.035.200	186	178.027.900	197	27.122.600	289	84.059.100	198	110.220.311	870	399.429.911	100,00%	99,85%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,13%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					11.715.242.786	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**98,84%**	**98,59%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.989.889.462		473.083.703		613.939.569		831.327.686		906.240.753	100	2.824.591.711	100,00%	94,47%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persenrtase LKIP PD yang diserahkan tepat waktu 2. Persentase penyusunan perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu (1)	100	10.050.000	25	-	25	-	25	-	100	10.034.000	100	10.034.000	100,00%	99,84%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	10.050.000	-	-	-	-	-	-	1	10.034.000	1	10.034.000	100,00%	99,84%		sisa dari belanja lembur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	2.267.497.622	15	405.143.703	35	436.431.969	50	752.867.686	100	519.698.073	100	2.114.141.431	100,00%	93,24%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.193.817.622	14	395.453.703	14	421.871.969	14	730.587.686	14	492.858.073	14	2.040.771.431	100,00%	93,02%		Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena ada PNS yang pensiun
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	73.680.000	1	9.690.000	1	14.560.000	1	22.280.000	1	26.840.000	1	73.370.000	100,00%	99,58%		berisi honorarium pengelola keuangan. Tidak mencapai 100% karena adanya penambahan anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	12.920.000	25	1.700.000	25	3.740.000	25	1.700.000	100	5.780.000	100	12.920.000	100,00%	100,00%		

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	12.920.000	6	1.700.000	6	3.740.000	6	1.700.000	6	5.780.000	24	12.920.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (persentase) (1)	100	154.968.840	-	-	60	58.467.600	20	-	100	93.307.880	100	151.775.480	100,00%	97,94%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	16.097.700	-	-	1	4.765.600	-	-	1	11.278.000	1	16.043.600	50,00%	99,66%		Realisasi tidak mencapai 100% karena keuangan disesuaikan dengan kontrak penawaran
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.968.740	-	-	1	2.694.000	-	-	-	-	1	2.694.000	100,00%	90,75%		Realisasi tidak mencapai 100% karena keuangan disesuaikan dengan kontrak penawaran
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4.649.400	-	-	-	-	-	-	1	4.649.400	1	4.649.400	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1.717.000	-	-	1	697.000	1	-	1	1.015.000	1	1.712.000	100,00%	99,71%		Realisasi tidak mencapai 100% karena keuangan disesuaikan dengan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	129.536.000	-	-	1	50.311.000	-	-	1	76.365.480	1	126.676.480	50,00%	97,79%		Berisi perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan karena hanya tersisa uang transport
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan (1)	100	40.000.000	-	-	-	-	-	-	100	40.000.000	100	40.000.000	100,00%	100,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	1	40.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	277.600.000	10	34.800.000	15	71.440.000	50	47.000.000	100	120.660.000	100	273.900.000	100,00%	98,67%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.840.000	-	-	1	1.840.000	-	-	1	1.000.000	1	2.840.000	50,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	66.360.000	-	-	1	20.200.000	1	-	1	45.960.000	1	66.160.000	100,00%	99,70%		sisa dari biaya pembayaran listrik

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	208.400.000	1	34.800.000	1	49.400.000	1	47.000.000	1	73.700.000	1	204.900.000	100,00%	98,32%		Berisi honor tenaga kontrak. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena terdapat tenaga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan (1)	100	226.853.000	20	31.440.000	25	43.860.000	25	29.760.000	30	116.760.800	100	221.820.800	100,00%	97,78%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	134.403.000	1	31.440.000	1	23.860.000	5	29.760.000	1	44.670.800	8	129.730.800	100,00%	96,52%		sisa dari biaya pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	42.450.000	-	-	1	20.000.000	1	-	1	22.450.000	1	42.450.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1	49.640.000	1	49.640.000	100,00%	99,28%		Realisasi tidak mencapai 100% karena keuangan disesuaikan dengan kontrak penawaran yang ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		97,52%	94,47%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentasi informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan (%)	90	100.800.000		-		-		88.750.050		11.800.000	90	100.550.050	100,00%	99,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi melalui media elektronik dan media masa (10 Dokumen)	10	100.800.000	-	-	-	-	-	88.750.050	10	11.800.000	10	100.550.050	100,00%	99,75%		
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	5	89.000.000	-	-	-	-	5	88.750.050	-	-	5	88.750.050	100,00%	99,72%		Realisasi tidak mencapai 100% karena keuangan disesuaikan dengan kontrak penawaran yang ada
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	3	11.800.000	-	-	-	-	-	-	3	11.800.000	3	11.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Manajemen Komunikasi Krisis	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis (Dokumen)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	99,75%		
						Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentasi aplikasi yang suda terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK (%)	90	1.617.056.000		-		659.850.000		395.226.000		535.550.000	90	1.590.626.000	100,00%	98,37%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub domain lingkup pemerintah daerah (%)	85	1.602.730.000	30	-	60	657.450.000	80	389.600.000	85	529.250.000	85	1.576.300.000	100,00%	98,35%		
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	10.150.000	-	-	2	2.500.000	-	-	2	7.650.000	4	10.150.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	4	1.592.580.000	-	-	1	654.950.000	1	389.600.000	2	521.600.000	4	1.566.150.000	100,00%	98,34%		Realisasi tidak mencapai 100% karena keuangan disesuaikan dengan
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan ke website pemerintah kab sigi (Pengunjung)	200	14.326.000	200	-	200	2.400.000	200	5.626.000	200	6.300.000	200	14.326.000	100,00%	100,00%		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)	1	14.326.000	-	-	1	2.400.000	1	5.626.000	1	6.300.000	1	14.326.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,37%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase OPD yang menyelenggarakan statistik setoral (%)	44	12.542.000		-		850.000		-		11.680.000	44	12.530.000	100,00%	99,90%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data Statistik daerah yang dikumpulkan,diolah dan di analisasi (Daerah)	32	12.542.000	-	-	10	850.000	10	-	12	11.680.000	32	12.530.000	100,00%	99,90%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	1	7.550.000	-	-	-	-	-	-	1	7.550.000	1	7.550.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	1	4.992.000	-	-	1	850.000	1	-	1	4.130.000	1	4.980.000	100,00%	99,76%		realisasi sesuai anggaran kas
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,90%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	presentase OPD yang menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi (%)	47	15.000.000		-		5.000.000		-		9.900.000	47	14.900.000	100,00%	99,33%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang tercover layanan keamanan informasi dan Persandian (Daerah)	32	15.000.000	32	-	32	5.000.000	32	-	32	9.900.000	32	14.900.000	100,00%	99,33%		
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	1	15.000.000	-	-	1	5.000.000	1	-	1	9.900.000	1	14.900.000	100,00%	99,33%		realisasi sesuai anggaran kas
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,33%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					4.735.287.462	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**98,43%**	**95,94%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	2.563.767.114		429.785.729		852.741.678		526.078.003		608.130.866	100	2.416.736.276	100,00%	94,27%	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	27.200.000	-	-	-	-	-	-	6	27.200.000	6	27.200.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	94,27%		
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan (Persen)	95	496.424.000		28.200.000		83.781.900		195.296.200		182.473.250	90	489.751.350	94,74%	98,66%	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	1	496.424.000	-	28.200.000	-	83.781.900	-	195.296.200	1	182.473.250	1	489.751.350	100,00%	98,66%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,66%		
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaag (Persn)	90	1.958.439.900		49.800.000		385.460.720		116.048.000		1.389.025.026	85	1.940.333.746	94,44%	99,08%	Dinas Pemuda Dan Olahraga	

	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)	5	300.000.000	-	-	5	300.000.000	-	-	-	-	5	300.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,08%		
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Bina Pramuka (Persen)	90	500.000.000		-		-		500.000.000		-	85	500.000.000	94,44%	100,00%	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	500.000.000	-	-	-	-	1	500.000.000	-	-	1	500.000.000	100,00%	100,00%		
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	500.000.000	-	-	-	-	1	500.000.000	-	-	1	500.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%		
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				5.518.631.014	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**96,89%**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (persen)	100	14.228.774.962		2.644.982.732		4.976.944.654		2.875.350.933		3.323.399.506	100	13.820.677.825	100,00%	97,13%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	37.000.000	100	-	100	-	100	-	100	36.960.000	100	36.960.000	100,00%	99,89%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	37.000.000	-	-	-	-	-	-	3	36.960.000	3	36.960.000	100,00%	99,89%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	13.514.670.732	100	2.644.982.732	100	4.862.889.654	100	2.842.583.149	100	2.759.703.874	100	13.110.159.409	100,00%	97,01%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	169	13.514.670.732	169	2.644.982.732	169	4.862.889.654	169	2.842.583.149	169	2.759.703.874	169	13.110.159.409	100,00%	97,01%	silpa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	100	25.600.000	-	-	-	-	-	-	100	25.530.000	100	25.530.000	100,00%	99,73%		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	25.600.000	-	-	-	-	-	-	4	25.530.000	4	25.530.000	100,00%	99,73%		Tidak Ada
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	presentase luaran pelaporan pendapatan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi pendapatan perangkat daerah (Dokumen)	1	2.658.000	-	-	-	-	-	-	1	1.508.000	1	1.508.000	100,00%	56,73%		

		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	2.658.000	-	-	-	-	-	-	1	1.508.000	1	1.508.000	100,00%	56,73%	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang tidak dibelanjakan	Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (Paket)	1	586.674.930	1	-	1	96.055.000	1	16.300.000	1	472.452.525	1	584.807.525	100,00%	99,68%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	210.989.930	1	-	1	74.060.000	1	5.000.000	1	130.389.930	1	209.449.930	100,00%	99,27%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	375.685.000	-	-	1	21.995.000	1	11.300.000	1	342.062.595	3	375.357.595	100,00%	99,91%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik (Dokumen)	2	62.171.300	2	-	2	18.000.000	2	16.467.784	2	27.245.107	2	61.712.891	100,00%	99,26%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	62.171.300	2	-	2	18.000.000	2	16.467.784	2	27.245.107	2	61.712.891	100,00%	99,26%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,13%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Yang Memenuhi Standar Teknis (%)	100	1.042.342.539		-		409.955.100		249.263.500		326.167.874	100	985.386.474	100,00%	94,54%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang diawasi dan didampingi penggunaannya (Jenis)	1	1.042.342.539	-	-	1	409.955.100	1	249.263.500	-	326.167.874	-	985.386.474	0,00%	94,54%		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1.042.342.539	1	-	1	409.955.100	1	249.263.500	1	326.167.874	1	985.386.474	100,00%	94,54%	sisa beanja makan minum dan perjalana dalam daerah	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	94,54%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang Berkualitas Sesuai Standar Teknis (%)	100	12.113.945.000		-		-		2.768.000.000		9.049.700.000	100	11.817.700.000	100,00%	97,55%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket prasarana pertanian yang dibangun (Paket)	50	12.113.945.000	-	-	20	-	20	2.768.000.000	10	9.049.700.000	50	11.817.700.000	100,00%	97,55%		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	30	8.000.000.000	-	-	10	-	10	2.000.000.000	10	6.000.000.000	30	8.000.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	*Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	20	4.113.945.000	20	-	20	-	20	768.000.000	20	3.049.700.000	20	3.817.700.000	100,00%	92,80%	Silpa DAK	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,55%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (%)	100	7.225.146.360		341.390.000		1.416.724.483		3.153.048.970		1.979.457.139	100	6.890.620.592	100,00%	95,37%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (Persentase (%))	100	7.225.146.360	100	341.390.000	100	1.416.724.483	100	3.153.048.970	100	1.979.457.139	100	6.890.620.592	100,00%	95,37%		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	13	432.789.520	-	-	1	79.400.400	6	129.162.000	6	198.723.400	13	407.285.800	100,00%	94,11%	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor tidak terserap utk praBPP	Tidak Ada
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	4	400.000.000	-	-	1	8.400.000	2	141.179.507	1	199.778.239	4	349.357.746	100,00%	87,34%	silpa Belanja Modal Personal Computer	Tidak Ada
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	10	6.392.356.840	10	341.390.000	10	1.328.924.083	10	2.882.707.463	10	1.580.955.500	10	6.133.977.046	100,00%	95,96%	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Satgas Kelapa Sawit) tidak terserap	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,37%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					34.610.208.861	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**96,83%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.730.543.299		487.669.571		959.914.455		562.583.239		639.262.862	100	2.649.430.127	100,00%	97,03%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.661.043.499	25	487.669.571	25	934.387.413	25	555.761.971	25	602.118.722	100	2.579.937.677	100,00%	96,95%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	2.661.043.499	28	487.669.571	28	934.387.413	28	555.761.971	28	602.118.722	28	2.579.937.677	100,00%	96,95%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	9.499.800	25	-	25	-	25	-	25	9.499.800	100	9.499.800	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	9.499.800	2	-	2	-	2	-	1	9.499.800	7	9.499.800	100,00%	100,00%		realisasi keuangan di lakukan di tw 4
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	60.000.000	25	-	25	25.527.042	25	6.821.268	25	27.644.340	100	59.992.650	100,00%	99,99%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	60.000.000	3	-	3	25.527.042	3	6.821.268	3	27.644.340	12	59.992.650	100,00%	99,99%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,03%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	

		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah taman kehati yang dikelola (Lokasi)	1	74.618.000		-		37.225.000		37.225.000		-	1	74.450.000	100,00%	99,77%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Sigi (Lokasi)	1	74.618.000	-	-	1	37.225.000	1	37.225.000	1	-	1	74.450.000	75,00%	99,77%		
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	*Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	7	74.618.000	1	-	2	37.225.000	4	37.225.000	-	-	7	74.450.000	100,00%	99,77%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,77%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang faham terhadap lingkungan hidup (%)	47	4.641.512.975		275.465.000		713.973.089		457.511.540		1.151.061.790	47	2.598.011.419	100,00%	55,97%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dilatih (Kelompok)	15	4.641.512.975	3	275.465.000	4	713.973.089	5	457.511.540	3	1.151.061.790	15	2.598.011.419	100,00%	55,97%		
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	10	1.448.578.450	-	126.825.000	-	367.284.800	-	121.171.189	-	617.770.205	-	1.233.051.194	0,00%	85,12%		dokumen yang dihasilkan 0 karena anggaran yang melekat pada sub kegiatan ini merupakan dana earmark
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	3	133.736.425	-	-	1	-	1	29.836.425	1	103.900.000	3	133.736.425	100,00%	100,00%		realisasi keuangan pada tw 2 direalisasikan pada tw 3
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	15	3.059.198.100	3	148.640.000	4	346.688.289	5	306.503.926	3	429.391.585	15	1.231.223.800	100,00%	40,25%		adanya belanja modal tanah perkebunan yang tidak direalisasikan sehingga persentase keuangan rendah

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										68,79%	55,97%		
						Predikat Kinerja										Sedang	Rendah		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah (%)	63	97.902.000		-		47.437.000		45.364.500		5.100.000	63	97.901.500	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	18600	97.902.000	3.891	-	3.774	47.437.000	3.487	45.364.500	2.167	5.100.000	13.319	97.901.500	71,61%	100,00%		
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	10500	97.902.000	3.891	-	2.851	47.437.000	3.487	45.364.500	2.167	5.100.000	12.396	97.901.500	100,00%	100,00%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					7.544.576.274	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**80,80%**	**71,84%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Tinggi**	**Sedang**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				I		II		III		IV							
3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.840.703.437		319.271.875		629.980.228		374.821.007		430.282.148	100	1.754.355.258	100,00%	95,31%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	90	1.785.584.537	17	317.771.875	49	612.416.238	69	372.571.007	85	397.393.248	85	1.700.152.368	94,69%	95,22%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	1.717.384.537	17	304.131.875	17	591.956.238	17	352.111.007	17	383.753.248	17	1.631.952.368	100,00%	95,03%		Penganggaran gaji memang selalu lebih karena mengantisipasi adanya Pegawai PNS yang (mutasi dari dinas lain)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	68.200.000	1	13.640.000	1	20.460.000	1	20.460.000	1	13.640.000	1	68.200.000	100,00%	100,00%		Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan tiap bulan (Dokumen berupa SPJ/SPM)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	90	7.500.000	20	1.500.000	50	2.250.000	80	2.250.000	90	1.500.000	90	7.500.000	100,00%	100,00%		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	7.500.000	1	1.500.000	1	2.250.000	1	2.250.000	1	1.500.000	1	7.500.000	100,00%	100,00%		Honor Pengelola BMD yang dibayarkan tiap bulan (Dokumen berupa SPJ/SPM)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	90	29.618.900	-	-	32	9.327.000	-	-	90	20.200.900	90	29.527.900	99,66%	99,69%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	29.618.900	-	-	1	9.327.000	1	-	1	20.200.900	1	29.527.900	100,00%	99,69%		Terdapat selisih belanja modal Paket Peralatan Kantor (ATK Kantor, Bahan cetak kantor, Bahan perabot kantor)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	90	18.000.000	-	-	33	5.986.990	-	-	85	11.188.000	85	17.174.990	94,91%	95,42%		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000	1	-	1	5.986.990	1	-	1	11.188.000	1	17.174.990	100,00%	95,42%		Terdapat selisih belanja listrik karena setiap bulan tagihan listrik berbeda (Laporan berupa bukti pembayaran listrik setiap bulan dibuatkan SPJ/SPM)
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,31%		
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menerapkan PPRG (%)	100	75.440.000		-		73.790.000		-		-	100	73.790.000	100,00%	97,81%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang bekerja sama dalam Peningkatan Strategi PUG dalam mencapai Kesetaraan Gender (%)	100	75.440.000	-	-	98	73.790.000	-	-	-	-	98	73.790.000	97,81%	97,81%		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	5	75.440.000	-	-	5	73.790.000	-	-	-	-	5	73.790.000	100,00%	97,81%		Terdapat selisih belanja Kegiatan Bimtek (Bimtek PPRG)
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,81%		
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (rasio)	5	121.489.000		-		28.800.000		-		88.021.094	5	116.821.094	100,00%	96,16%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (%)	100	121.489.000	-	-	50	28.800.000	-	-	50	88.021.094	100	116.821.094	100,00%	96,16%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	5	121.489.000	-	-	5	28.800.000	5	-	5	88.021.094	5	116.821.094	100,00%	96,16%		Selisih belanja perjalanan dinas, penjangkauan kasus dan pendampingan kasus
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,16%		
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga (%)	100	374.503.000		-		214.725.000		-		154.105.057	-	368.830.057	0,00%	98,49%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Lembaga Penyedia Layanan (%)	100	374.503.000	-	-	78	214.725.000	-	-	98	154.105.057	98	368.830.057	98,49%	98,49%		

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	5	174.503.000	-	-	5	14.725.000	-	-	5	154.105.057	3	168.830.057	50,00%	96,75%		Selisih belanja perjalanan dinas
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	200.000.000	-	-	20	200.000.000	-	-	-	-	20	200.000.000	100,00%	100,00%		Dana Hibah Dharma Wanita
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	76,70%	98,49%		
													Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak (%)	100	738.702.675		38.750.000		142.710.675		327.377.800		164.368.993	100	673.207.468	100,00%	91,13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terbentuknya Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha (%)	100	738.702.675	3	38.750.000	26	142.710.675	74	327.377.800	91	164.368.993	91	673.207.468	91,13%	91,13%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	5	738.702.675	5	38.750.000	5	142.710.675	5	327.377.800	5	164.368.993	5	673.207.468	100,00%	91,13%		terdapat selisih belanja kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi di Kab. Sigi dan selisih belanja Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perkawinan Anak Tingkat SMA serta selisih belanja Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, dan Pembentukan PATBM di Kecamatan
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	91,13%		
													Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Anak yang Tertangani (%)	69,44	88.017.724		-		-		-		88.017.724	69	88.017.724	100,00%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Anak yang tertangani (persen)	69,44	14.684.000	-	-	-	-	-	-	69	14.684.000	69	14.684.000	100,00%	100,00%		
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	*Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokumen)	1	14.684.000	-	-	-	-	-	-	1	14.684.000	1	14.684.000	100,00%	100,00%		Teralisasi 100%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Anak yang tertangani (persen)	69,44	73.333.724	-	-	-	-	-	-	69	73.333.724	69	73.333.724	100,00%	100,00%		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	1	73.333.724	-	-	-	-	-	-	1	73.333.724	1	73.333.724	100,00%	100,00%		Teralisasi 100%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	100,00%		
													Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

		3.238.855.836		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**97,31%**	**94,94%**		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (persen)	100	##########		##########		921.390.024		552.792.626		622.342.314	100	2.607.327.299	100,00%	95,41%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase lintas sektor yang kerjasama dalam pengendalian penduduk (%)	100	784.352.710		##########		236.282.900		253.805.620		177.207.400	100	773.860.447	100,00%	98,66%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 (%)	85	##########		54.000.000		702.866.000		##########		##########	85	8.586.627.946	100,00%	97,46%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				12.327.658.007		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**97,45%**	**97,08%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Inspektorat

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	10.975.467.235		2.222.050.295		2.091.094.088		3.427.105.242		2.594.713.694	100	10.334.963.319	100,00%	94,16%	Inspektorat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kan (Dokumen)	3	23.772.800	1	3.190.000	1	2.412.800	1	-	3	18.070.000	3	23.672.800	100,00%	99,58%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	4.682.000	-	1.682.000	-	-	-	-	3	3.000.000	3	4.682.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.960.400	-	-	-	1.960.400	-	-	1	3.000.000	1	4.960.400	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.508.000	-	-	-	-	-	-	1	1.508.000	1	1.508.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	3.452.400	-	-	-	452.400	-	-	1	3.000.000	1	3.452.400	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.908.000	-	1.508.000	-	-	-	-	1	5.300.000	1	6.808.000	100,00%	98,55%		Selisih Belanja ATK

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1.508.000	-	-	-	-	-	-	1	1.508.000	1	1.508.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	754.000	-	-	-	-	-	-	1	754.000	1	754.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	7.538.686.490	100	1.520.522.089	100	1.494.098.934	100	2.490.196.988	100	1.805.247.977	100	7.310.065.988	100,00%	96,97%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	7.393.606.490	58	1.485.062.089	58	1.433.546.934	58	2.477.398.988	58	1.793.105.977	58	7.189.113.988	100,00%	97,23%		Selisih tunjangan inspektur dan fungsional
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	145.080.000	25	35.460.000	50	60.552.000	75	12.798.000	100	12.142.000	100	120.952.000	100,00%	83,37%		Selisih honor pengelola keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dokumen)	2	16.200.000	-	-	1	5.400.000	-	6.750.000	2	4.050.000	2	16.200.000	100,00%	100,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	16.200.000	-	-	1	5.400.000	1	6.750.000	2	4.050.000	2	16.200.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi kepegawaian yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	764.677.000	25	95.405.400	50	186.475.000	75	193.016.600	100	84.635.928	100	559.532.928	100,00%	73,17%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	764.677.000	3	95.405.400	3	186.475.000	4	193.016.600	10	84.635.928	10	559.532.928	100,00%	73,17%		Selisih belanja diklat kontribusi, akomodasi dan transportasi serta terdapat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd (laporan)	15	1.257.939.945	2	140.132.350	5	264.022.580	5	232.706.870	15	455.283.257	15	1.092.145.057	100,00%	86,82%		

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.600.000	-	-	1	1.000.000	1	-	1	2.472.500	1	3.472.500	100,00%	96,46%		Selisih belanja alat listrik
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	444.320.945	1	35.302.400	1	51.874.400	1	53.502.000	1	289.564.470	1	430.243.270	100,00%	96,83%		Selisih belanja modal
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	29.927.000	-	1.549.000	-	2.047.000	-	9.961.000	2	5.848.766	2	19.405.766	100,00%	64,84%		Selisih belanja cetak
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	780.092.000	-	103.280.950	-	209.101.180	-	169.243.870	15	157.397.521	15	639.023.521	100,00%	81,92%		Selisih belanja uang harian , akomodasi dan tiket
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran jasa telpone, air dan listrik (Kali)	12	557.465.000	3	72.991.101	3	138.684.774	3	265.362.139	12	42.454.674	12	519.492.688	100,00%	93,19%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	155.600.000	3	22.316.101	3	47.402.774	3	30.083.139	12	42.454.674	12	142.256.688	100,00%	91,42%		Selisih belanja listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	401.865.000	1	50.675.000	1	91.282.000	1	235.279.000	1	-	1	377.236.000	100,00%	93,87%		Selisih belanja sapras perkantoran
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara (Unit)	19	816.726.000	7	389.809.355	6	-	6	239.072.645	19	184.971.858	19	813.853.858	100,00%	99,65%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	816.726.000	5	389.809.355	7	-	7	239.072.645	19	184.971.858	19	813.853.858	100,00%	99,65%		Selisih belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	94,16%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		INSPEKTORAT DAERAH																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Unit Kerja yang telah Mengimplementasikan SPIP pada Level Terdefinisi (%)	3	1.837.075.000		124.120.000		176.960.000		632.330.000		843.335.000	3	1.776.745.000	100,00%	96,72%	Inspektorat	

		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa (LHP)	55	1.578.575.000	13	95.520.000	26	131.970.000	39	570.420.000	55	720.335.000	55	1.518.245.000	100,00%	96,18%		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	264.000.000	-	-	1	26.400.000	3	78.000.000	4	142.350.000	4	246.750.000	100,00%	93,47%		Selisih belanja uang harian dan transportasi
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	3	201.325.000	-	-	-	-	3	91.500.000	3	102.300.000	3	193.800.000	100,00%	96,26%		Selisih belanja uang harian dan transportasi
		Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	32	344.400.000	10	25.200.000	10	42.750.000	12	210.450.000	32	47.010.000	32	325.410.000	100,00%	94,49%		Selisih belanja uang harian dan transportasi
		Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	3	26.400.000	3	25.950.000	-	-	-	-	-	-	3	25.950.000	100,00%	98,30%		Selisih belanja uang harian dan transportasi
		Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	12	387.450.000	3	44.370.000	3	45.420.000	3	61.120.000	12	220.425.000	12	371.335.000	100,00%	95,84%		Selisih belanja uang harian dan transportasi
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	20	355.000.000	-	-	10	17.400.000	10	129.350.000	20	208.250.000	20	355.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan tujuan tertentu terkait penanganan kasus kepegawaian, pengaduan masyarakat, laporan gratifikasi/benturan kepentingan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa (LHP)	6	258.500.000	1	28.600.000	3	44.990.000	5	61.910.000	6	123.000.000	6	258.500.000	100,00%	100,00%		
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	44	82.000.000	-	-	-	-	-	-	44	82.000.000	44	82.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6	176.500.000	2	28.600.000	2	44.990.000	2	61.910.000	6	41.000.000	6	176.500.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,72%		

															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP (%)	3	355.720.000		-		4.400.000		-		289.170.000	3	293.570.000	100,00%	82,53%	Inspektorat	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Obyek Pendampingan yang ditindaklanjuti (%)	100	130.150.000	25	-	50	4.400.000	75	-	100	123.420.000	100	127.820.000	100,00%	98,21%		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	8	130.150.000	-	-	1	4.400.000	7	-	8	123.420.000	8	127.820.000	100,00%	98,21%		Selisih belanja honorarium tim
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah SKPD dan pemerintahan desa yang didampingi (SKPD)	1	225.570.000	-	-	-	-	1	-	-	165.750.000	1	165.750.000	100,00%	73,48%		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	1	225.570.000	-	-	-	-	-	-	1	165.750.000	1	165.750.000	100,00%	73,48%		Selisih belanja kegiatan sosialisasi pada kegiatan saber pungli
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	82,53%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi		
					13.168.262.235	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**94,21%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dinas Pariwisata

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.948.625.782		473.516.871		1.003.571.239		1.121.584.958		151.786.245	100	2.750.459.313	100,00%	93,28%	Dinas Pariwisata	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi yang menjadi masukan dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (1)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.423.625.783	25	454.516.871	25	837.841.239	25	897.684.958	25	46.251.559	100	2.236.294.627	100,00%	92,27%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	2.405.955.783	24	454.516.871	23	837.841.239	22	897.684.958	22	28.581.559	23	2.218.624.627	87,50%	92,21%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	17.670.000	-	-	-	-	-	-	1	17.670.000	1	17.670.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	316.799.999	-	-	50	68.600.000	25	161.400.000	25	76.534.686	100	306.534.686	100,00%	96,76%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.321.999	-	-	-	-	-	-	1	4.321.999	1	4.321.999	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.100.000	-	-	-	-	-	-	1	7.500.000	1	7.500.000	100,00%	74,26%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	302.378.000	-	-	1	68.600.000	1	161.400.000	1	64.712.687	3	294.712.687	100,00%	97,46%		Tidak Ada

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	174.000.000	25	19.000.000	25	63.500.000	25	62.500.000	25	29.000.000	100	174.000.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	120.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	20.000.000	1	120.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	54.000.000	1	9.000.000	1	13.500.000	1	22.500.000	1	9.000.000	1	54.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	34.200.000	-	-	100	33.630.000	-	-	-	-	100	33.630.000	100,00%	98,33%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	34.200.000	-	-	1	33.630.000	-	-	-	-	1	33.630.000	100,00%	98,33%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89,80%	93,28%		
						Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase obyek wisata yang terkelola dengan baik (%)	7,89	1.528.711.924		132.875.000		259.913.924		1.080.551.040		32.675.000	8	1.506.014.964	100,00%	98,52%	Dinas Pariwisata	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Menjadi Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/kota (OW)	3	1.528.711.924	3	132.875.000	3	259.913.924	3	1.080.551.040	3	32.675.000	3	1.506.014.964	100,00%	98,52%		
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	300.000.000	-	-	-	-	3	299.976.040	-	-	3	299.976.040	100,00%	99,99%		Tidak Ada
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	4	81.610.000	1	15.000.000	2	63.560.000	-	-	1	3.050.000	4	81.610.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.147.101.924	1	117.875.000	1	196.353.924	1	780.575.000	1	29.625.000	1	1.124.428.924	100,00%	98,02%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,52%		

																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	MOU Kerjasama Pariwisata (MOU)	3	16.220.000		-		-		-		16.220.000	3	16.220.000	100,00%	100,00%	Dinas Pariwisata	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (MOU)	1	16.220.000	-	-	-	-	-	-	1	16.220.000	1	16.220.000	100,00%	100,00%		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	16.220.000	-	-	-	-	-	-	1	16.220.000	1	16.220.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	100,00%		
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase SDM Pariwisata yang terlatih (Persen)	95	166.060.000		-		56.048.475		59.690.000		35.939.600	95	151.678.075	100,00%	91,34%	Dinas Pariwisata	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah tahapan pelatihan peningkatan SDM Parekraf tingkat dasar (Kali)	2	118.280.000	-	-	2	34.158.475	2	33.800.000	2	35.939.600	2	103.898.075	100,00%	87,84%		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	118.280.000	-	-	1	34.158.475	1	33.800.000	1	35.939.600	1	103.898.075	100,00%	87,84%		Tidak Ada
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Produktif (Kali)	20	47.780.000	-	-	10	21.890.000	10	25.890.000	-	-	20	47.780.000	100,00%	100,00%		
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	40	47.780.000	-	-	30	21.890.000	40	25.890.000	-	-	70	47.780.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	91,34%		
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					4.659.617.706	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**											**93,55%**	**94,95%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	5.106.236.558		800.383.908		1.660.110.352		1.037.299.416		1.431.326.031	100	4.929.119.707	100,00%	96,53%	Dinas Perhubungan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencaaan dan evaluasi PD (Dokumen)	100	21.500.000	-	-	-	-	-	-	100	21.500.000	100	21.500.000	100,00%	100,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	21.500.000	-	-	-	-	-	-	3	21.500.000	3	21.500.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	4.148.043.953	25	725.888.908	50	1.460.301.221	75	866.773.830	100	967.253.398	63	4.020.217.357	62,50%	96,92%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	4.072.803.953	45	725.888.908	45	1.441.491.221	45	847.963.830	45	929.633.398	45	3.944.977.357	100,00%	96,86%		Selisih Belanja Tambahan Penghasilan TPP dan Mutasi Pegawai
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	75.240.000	-	-	1	18.810.000	1	18.810.000	1	37.620.000	1	75.240.000	75,00%	100,00%		Tidak Ada

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	10.200.000	-	2.295.000	-	2.550.000	50	2.550.000	50	2.805.000	100	10.200.000	100,00%	100,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	10.200.000	-	2.295.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.805.000	1	10.200.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	314.458.805	-	-	50	15.112.098	75	42.077.830	100	223.519.689	100	280.709.617	100,00%	89,27%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	34.113.710	-	-	-	-	1	15.086.100	1	18.118.610	1	33.204.710	100,00%	97,34%		Selisih Belanja Materai dan Belanja
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12.064.095	-	-	1	5.100.000	1	-	1	6.886.000	1	11.986.000	100,00%	99,35%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	1	3.600.000	-	-	-	-	-	-	1	3.600.000	1	3.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	264.681.000	-	-	1	10.012.098	1	26.991.730	1	194.915.079	1	231.918.907	75,00%	87,62%		Selisih Belanja Perjalan Dinas Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	216.580.000	25	29.800.000	50	45.647.033	75	39.047.756	100	89.172.544	100	203.667.333	100,00%	94,04%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000	-	-	1	4.947.033	1	1.847.756	1	5.492.544	1	12.287.333	100,00%	68,26%		Selisih Belanja Tagihan Listrik Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	198.580.000	1	29.800.000	1	40.700.000	1	37.200.000	1	83.680.000	1	191.380.000	100,00%	96,37%		Tidak Ada

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	395.453.800	25	42.400.000	50	136.500.000	75	86.850.000	100	127.075.400	100	392.825.400	100,00%	99,34%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	387.983.800	1	42.400.000	1	136.500.000	1	86.850.000	1	119.605.400	1	385.355.400	100,00%	99,32%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	11	7.470.000	-	-	-	-	-	-	11	7.470.000	11	7.470.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,34%	96,53%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	65	888.990.000		-		72.128.600		591.910.000		88.022.982	65	752.061.582	100,00%	84,60%	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Angka)	500	95.000.000	22	-	20	49.778.600	30	-	350	44.861.482	422	94.640.082	84,40%	99,62%		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	13	95.000.000	-	-	8	49.778.600	-	-	5	44.861.482	13	94.640.082	100,00%	99,62%		Tidak Ada
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji kir angkutan umum tepat waktu (%)	60	61.590.000	-	-	-	-	-	-	60	5.600.000	60	5.600.000	100,00%	9,09%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PKB (Jenis)	1	61.590.000	-	-	-	-	-	-	1	5.600.000	1	5.600.000	100,00%	9,09%		Karena Alat Pengujian Statis Kendaraan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah angka pelanggaran (Pelanggar)	60	122.400.000	#####	-	######	22.350.000	9.650	39.960.000	60	37.561.500	60	99.871.500	100,00%	81,59%		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	1	122.400.000	-	-	1	22.350.000	1	39.960.000	1	37.561.500	1	99.871.500	75,00%	81,59%		Selisih Belanja Honorarium Pemungut Pajak Karena Target (PAD) Tidak Tercapai

		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum (%)	60	610.000.000	-	-	-	-	30	551.950.000	30	-	60	551.950.000	100,00%	90,48%		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2	610.000.000	-	-	-	-	2	551.950.000	-	-	2	551.950.000	100,00%	90,48%		Selisih Sisa Pengadaan Langsung Kendaraan Roda Empat BUMDES (sumber Dana DAK)
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,56%	84,60%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang Melalui Dermaga (Orang)	8400	38.440.000		-		3.300.000		8.940.000		26.200.000	-	38.440.000	0,00%	100,00%	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pelabuhan yang beroperasi terhadap jumlah pelabuhan yang tersedia (%)	25	38.440.000	-	-	-	3.300.000	-	8.940.000	25	26.200.000	25	38.440.000	100,00%	100,00%		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	38.440.000	-	-	1	3.300.000	1	8.940.000	1	26.200.000	1	38.440.000	75,00%	100,00%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		75,00%	100,00%		
														Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Tinggi		
					6.033.666.558	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**97,93%**	**94,80%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.752.745.825		470.028.329		929.900.112		552.632.654		675.162.253	100	2.627.723.348	100,00%	95,46%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,46%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kebijakan Pemerintahan Desa dalam mendukung program Sigi Religi (Persentase)	70	2.055.650.350		243.897.264		421.521.546		408.661.872		661.227.842	-	1.735.308.524	0,00%	84,42%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		46,69%	84,42%		
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Persentase)	60	1.850.459.092		188.370.000		779.438.725		434.245.697		438.546.764	-	1.840.601.186	0,00%	99,47%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,47%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					6.658.855.267	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**83,54%**	**93,16%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.770.627.116		463.308.093		984.452.785		560.571.755		677.724.967	97	2.686.057.600	96,77%	96,95%	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.690.627.116	25	463.308.093	25	959.452.785	25	539.491.755	25	643.804.967	100	2.606.057.600	100,00%	96,86%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	2.690.627.116	26	463.308.093	26	959.452.785	26	539.491.755	29	643.804.967	27	2.606.057.600	92,24%	96,86%	Adanya perubahan jumlah pegawai dan adanya sisa anggaran dari pembayaran pajak gaji dan pembayaran TPP	Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	20.000.000	25	-	25	-	25	11.080.000	25	8.920.000	100	20.000.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000	1	-	1	-	1	11.080.000	1	8.920.000	4	20.000.000	100,00%	100,00%	Adanya masalah hasil download file	Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	60.000.000	25	-	25	25.000.000	25	10.000.000	25	25.000.000	100	60.000.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	60.000.000	1	-	1	25.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	4	60.000.000	100,00%	100,00%	Adanya masalah hasil download file	Tidak Ada

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										92,47%	96,95%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	899.319.000		79.865.520		246.034.715		95.326.000		478.092.765	100	899.319.000	100,00%	100,00%	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	899.319.000	25	79.865.520	25	246.034.715	25	95.326.000	25	478.092.765	100	899.319.000	100,00%	100,00%		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	5	899.319.000	3	79.865.520	13	246.034.715	7	95.326.000	7	478.092.765	30	899.319.000	100,00%	100,00%	Adanya masalah hasil download file	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	90	2.726.777.596		440.291.380		732.477.538		586.398.000		860.220.600	96	2.619.387.518	106,73%	96,06%	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (%)	100	2.726.777.596	25	440.291.380	25	732.477.538	25	586.398.000	25	860.220.600	100	2.619.387.518	100,00%	96,06%		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	24	2.726.777.596	6	440.291.380	6	732.477.538	6	586.398.000	6	860.220.600	24	2.619.387.518	100,00%	96,06%	Terdapat lebih dari 1 rincian belanja yang ada pada sub kegiatan ini, berupa penyuluhan tentang damkar, penanganan kebakaran dan non kebakaran, belanja honorarium PNS, belanja non ASN, belanja BBM, dll	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,06%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				6.396.723.712		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRA**										**96,74%**	**97,00%**		

						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (persen)	100	6.053.266.022		812.350.507		1.827.132.009		956.697.079		-	100	3.596.179.595	100,00%	59,41%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	59.310.600	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	1	59.310.600	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	5.091.247.673	25	808.630.507	50	1.773.620.952	75	935.212.559	100	-	100	3.517.464.018	100,00%	69,09%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75	4.793.528.673	75	808.630.507	75	1.773.620.952	75	935.212.559	75	-	75	3.517.464.018	100,00%	73,38%		Terdapat retribusi insentif pemakaian alat yang tidak dibayarkan karena tidak ada realisasi penerimaan alat berat. Untuk pembayaran gaji terdapat sisa anggaran karena adanya kelebihan perhitungan gaji dari bagian anggaran.
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD (Dokumen)	0	217.770.000	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Dikoordinasikan Dan Disusun (Tahun)	0	79.949.000	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase lancarnyaa Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	3.000.000	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100,00%	0,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	12	3.000.000	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi kepegawaian yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	164.414.749	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100,00%	0,00%		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	164.414.749	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerahngelolaan administrasi umum perangkat daerah (1)	100	407.293.000	25	3.720.000	50	5.700.000	75	5.700.000	100	-	100	15.120.000	100,00%	3,71%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	19.000.000	1	3.720.000	2	5.700.000	8	5.700.000	10	-	10	15.120.000	100,00%	79,58%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (jumlah)	0	388.293.000	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerahrintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (1)	100	78.000.000	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	78.000.000	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	216.000.000	25	-	50	47.811.057	75	15.784.520	100	-	100	63.595.577	100,00%	29,44%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	216.000.000	-	-	6	47.811.057	2	15.784.520	4	-	12	63.595.577	100,00%	29,44%		Anggaran tidak terserap 100 % karena adanya kelebihan perhitungan kebutuhan listrik pada dinas DPUTR
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	34.000.000	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)	12	34.000.000	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	59,41%		
						Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Rendah		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	

		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Mantap (%)	69,4	16.090.145.188		176.340.000		4.053.580.712		2.875.608.893		-	69	7.105.529.605	100,00%	44,16%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Air (dok)	5	6.461.427.188	1	176.340.000	2	1.907.881.712	4	1.028.278.377	7	-	7	3.112.500.089	140,00%	48,17%		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	75	400.000.000	-	-	-	-	40	153.098.500	3	-	43	153.098.500	57,33%	38,27%		sub kegitan ini diperuntukkan untuk kegiatan Bina Konstruksi yang mendapatkan DAU PU untuk melaksanakan kegiatan Bina Konstruksi karena tidak mendapatkan DAU Bebas. Anggaran yang tidak terserap biaya penginapan pengawas LKKP karena biaya penginapan langsung ditanggung dari pusat.
		Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	3	1.393.200.000	-	-	-	-	-	-	13	-	13	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	6	4.668.227.188	1	176.340.000	2	1.907.881.712	4	875.179.877	6	-	6	2.959.401.589	100,00%	63,39%		Keuangan tidak terserap 100 % karena realisasi berdasarkan nilai kontrak penyusunan dokumen perencanaan. Untuk outpput yang dihasilkan terdapat 7 dokumen lebih besar dari target yang diperjanjikan . Dikarenakan adanya penambahan pembuatan dokumen perencanaan di anggraan perubahan yaitu perencanaan DI Wera dan DI Saluki
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (Meter)	1928	9.628.718.000	-	-	1.057	2.145.699.000	1.257	1.847.330.516	1.928	-	1.928	3.993.029.516	100,00%	41,47%		

		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang direhabilitasi (meter)	389	8.671.918.000	-	-	100	2.145.699.000	115	1.847.330.516	164	-	379	3.993.029.516	97,43%	46,05%		realisasi keuangan untuk rehabilitasi jaringan irigasi yaitu Rp. 8.582.796.000 sehingga silpa untuk kegiatan ini yaitu Rp. 89.122.000,-.Penyerapan tidak 100 %
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	10	956.800.000	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	97,55%	44,16%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak (%)	2,16	7.768.666.174		-		286.123.661		4.448.363.990		-	2	4.734.487.651	100,00%	60,94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kualitas Air Minum Sesuai Standar Kesehatan (%)	2	7.768.666.174	1	-	2	286.123.661	2	4.448.363.990	2	-	2	4.734.487.651	100,00%	60,94%		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	6	1.768.666.174	-	-	1	186.265.150	2	618.101.248	3	-	6	804.366.398	100,00%	45,48%		Tidak Ada
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	20	5.300.000.000	-	-	10	99.858.511	5	3.780.762.742	5	-	20	3.880.621.253	100,00%	73,22%		Tidak Ada
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	700.000.000	-	-	-	-	1	49.500.000	1	-	2	49.500.000	100,00%	7,07%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	60,94%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak (%)	1,52	1.200.000.000		-		-		299.302.462		-	2	299.302.462	100,00%	24,94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem pengelolaan air limbah dan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku (%)	20	1.200.000.000	-	-	10	-	15	299.302.462	20	-	20	299.302.462	100,00%	24,94%		
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	FALSE	550	1.200.000.000	-	-	-	-	150	299.302.462	400	-	550	299.302.462	100,00%	24,94%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	24,94%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pemenuhan Gedung Negara (%)	90	10.135.465.026		57.291.000		391.468.934		3.021.057.802		-	5	3.469.817.736	5,56%	34,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (%)	20	10.135.465.026	1	57.291.000	5	391.468.934	7	3.021.057.802	20	-	20	3.469.817.736	100,00%	34,23%		
		Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan (Bangunan Gedung Cagar Budaya)	4	9.800.000.000	-	-	1	342.268.934	2	2.865.444.302	4	-	4	3.207.713.236	100,00%	32,73%		Kegiatan penyusunan Ranperbup RDTR Binangga pada tahun 2024 tidak dilaksanakan karena data yang dibutuhkan dalam penyusunan ranperbup masih belum memadai dalam kurun waktu yang singkat olehnya kegiatan dinilai kurang maksimal jika dilaksanakan
		Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif (Orang)	20	335.465.026	20	57.291.000	20	49.200.000	20	155.613.500	20	-	20	262.104.500	100,00%	78,13%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	34,23%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (%)	6	33.250.000.000		-		139.077.971		11.032.034.126		-	6	11.171.112.097	100,00%	33,60%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, (%)	20	33.250.000.000	-	-	10	139.077.971	15	11.032.034.126	20	-	20	11.171.112.097	100,00%	33,60%		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	3	31.050.000.000	-	-	-	-	2	10.261.983.477	1	-	3	10.261.983.477	100,00%	33,05%		Tidak Ada
		Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan (Dokumen)	3	2.200.000.000	-	-	1	139.077.971	1	770.050.649	1	-	3	909.128.620	100,00%	41,32%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	33,60%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Strategis Dalam Kondisi Mantap (%)	1,96	86.776.881.986		521.748.240		19.679.200.228		3.287.355.234		-	2	23.488.303.702	80,61%	27,07%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penyelengaraan jalan kabupaten/kota (0.0157)	2,51	86.776.881.986	1	521.748.240	1	19.679.200.228	1	3.287.355.234	3	-	3	23.488.303.702	100,00%	27,07%		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	4	3.714.484.970	1	21.848.240	2	1.547.628.928	3	543.812.672	4	-	4	2.113.289.840	100,00%	56,89%		Tidak Ada

		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	*Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)	10	2.858.763.900	-	-	2	532.779.400	6	1.034.337.312	2	-	10	1.567.116.712	100,00%	54,82%		Tidak Ada
		Penggantian Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	14,53	3.190.179.550	-	-	5	794.868.750	10	-	15	-	15	794.868.750	100,00%	24,92%		Tidak Ada
		Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	38,5	71.267.305.300	-	-	15	15.703.923.150	25	1.061.947.250	39	-	39	16.765.870.400	100,00%	23,53%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	6	475.570.092	-	-	-	-	3	200.000.000	3	-	6	200.000.000	100,00%	42,05%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	1	2.423.320.174	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1168,2	800.000.000	-	-	-	-	-	-	1.168	-	1.168	-	100,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	6,18	2.047.258.000	2	499.900.000	4	1.100.000.000	6	447.258.000	8.917	-	8.917	2.047.158.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	27,07%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
					161.274.424.396	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,76%**	**33,40%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.992.305.427		827.318.710		199.279.184		998.121.907		898.555.247	100	2.923.275.048	100,00%	97,69%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	3.000.000	-	-	-	-	50	1.200.000	50	1.800.000	100	3.000.000	100,00%	100,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	300.000	-	-	-	-	2	300.000	-	-	2	300.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	30	450.000	-	-	-	-	-	-	30	450.000	30	450.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	30	450.000	-	-	-	-	-	-	30	450.000	30	450.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	15	900.000	-	-	-	-	15	900.000	-	-	15	900.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	15	900.000	-	-	-	-	-	-	15	900.000	15	900.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.834.868.727	25	580.011.910	25	141.569.184	25	626.961.587	25	434.837.187	100	1.783.379.868	100,00%	97,19%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	1.749.951.727	24	558.951.910	24	134.549.184	24	598.881.587	24	406.080.187	24	1.698.462.868	100,00%	97,06%		Selisih pembayar Gaji dan TP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	460	84.917.000	115	21.060.000	76	7.020.000	129	28.080.000	140	28.757.000	460	84.917.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	100	9.162.000	25	2.250.000	25	750.000	25	3.000.000	25	3.162.000	100	9.162.000	100,00%	100,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	9.162.000	3	2.250.000	3	750.000	3	3.000.000	3	3.162.000	12	9.162.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	350.324.700	25	50.756.800	25	400.000	25	92.636.620	25	197.311.210	100	341.104.630	100,00%	97,37%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	61.437.800	1	17.887.800	-	-	3	43.550.000	-	-	4	61.437.800	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.106.900	-	-	-	-	1	7.512.000	-	12.594.900	1	20.106.900	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	268.780.000	1	32.869.000	-	400.000	1	41.574.620	-	184.716.310	2	259.559.930	100,00%	96,57%		Sisa lebih perjalanan dinas luar daerah

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (%)	100	12.650.000	25	-	25	-	25	-	25	12.650.000	100	12.650.000	100,00%	100,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	2	12.650.000	-	-	-	-	-	-	2	12.650.000	2	12.650.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	637.420.000	21	158.580.000	25	56.560.000	25	209.640.000	29	205.140.000	100	629.920.000	99,87%	98,82%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.500.000	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	1	2.500.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	30.000.000	3	5.000.000	3	-	3	12.500.000	3	12.500.000	12	30.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	604.920.000	3	151.080.000	3	56.560.000	3	197.140.000	3	192.640.000	12	597.420.000	100,00%	98,76%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	144.880.000	26	35.720.000	25	-	25	64.683.700	24	43.654.850	100	144.058.550	99,72%	99,43%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	138.380.000	2	35.720.000	-	-	6	61.379.200	4	40.584.850	12	137.684.050	100,00%	99,50%		Sisa lebih pembayara pajak kendaraan operasional dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	6.500.000	-	-	-	-	5	3.304.500	5	3.070.000	10	6.374.500	100,00%	98,07%		Sisa lebih pembayaran pemeliharaan peralatan dan mesin
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,69%		

															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (%)	85,88	25.775.000		-		-		9.050.000		16.725.000	80	25.775.000	93,15%	100,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Perssentase Koperasi KSP/USP Aktif (0.3571)	35,71	25.775.000	-	-	-	-	15	9.050.000	15	16.725.000	30	25.775.000	84,01%	100,00%		
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	91	21.250.000	-	-	-	-	49	4.525.000	42	16.725.000	91	21.250.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	91	4.525.000	-	-	-	-	46	4.525.000	-	-	46	4.525.000	50,55%	100,00%		Dari target 91 Koperasi yang dilakukan pemeriksaan hanya 46 koperasi, ini disebabkan karena anggaran untuk pemeriksaan kurang
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	91,32%	100,00%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi KSP/USP RAT Melaksanakan RAT (%)	33,93	38.163.000		-		-		-		38.163.000	32	38.163.000	94,31%	100,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi KSP/USP Yang Melaksanakan RAT tepat waktu (%)	33,93	38.163.000	10	-	5	-	7	-	10	38.163.000	32	38.163.000	94,31%	100,00%		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	*Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	50	38.163.000	-	-	-	-	-	-	50	38.163.000	50	38.163.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	100,00%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Yang Memiliki Settifkat (%)	83,53	139.200.000		-		-		-		136.600.000	75	136.600.000	89,90%	98,13%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi Yang Memiliki Settifkat (%)	84,33	139.200.000	-	-	-	-	-	-	75	136.600.000	75	136.600.000	88,94%	98,13%		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	50	139.200.000	-	-	-	-	-	-	50	136.600.000	50	136.600.000	100,00%	98,13%		Sisa Lebh dari pembayaran narasumber yang berasal dari PD terkait (Sumber dana DAK Non Fisik PK2UKM)
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,13%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi (%)	50,59	111.894.050		900.000		-		3.993.800		107.000.000	39	111.893.800	76,73%	100,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi (%)	50,59	111.894.050	10	900.000	5	-	10	3.993.800	25	107.000.000	50	111.893.800	98,83%	100,00%		
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	30	111.894.050	2	900.000	4	-	2	3.993.800	22	107.000.000	30	111.893.800	100,00%	100,00%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Usaha Usaha Mikro (%)	17,9	1.216.478.150		112.090.000		-		579.030.150		519.778.000	17	1.210.898.150	94,97%	99,54%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha Mikro Yang Mendapat Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan usaha (%)	13,13	1.216.478.150	3	112.090.000	3	-	4	579.030.150	2	519.778.000	12	1.210.898.150	91,39%	99,54%		
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	150	16.840.200	-	-	-	-	20	750.000	80	15.910.200	100	16.660.200	66,67%	98,93%		Secara Kinerja kurang dari target 150 realisasi cuman100 ini disebabkan anggaran
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	311	463.268.000	25	25.000.000	25	-	25	50.000.000	200	388.168.000	275	463.168.000	88,42%	99,98%		Dari target 311 pelaku usaha realisi hanya 275 unit usaha disebabkan karena ada pelaku usaha yang tidak mememnuhi
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	75	736.369.950	25	87.090.000	-	-	50	528.280.150	-	115.699.800	75	731.069.950	100,00%	99,28%		Sisa lebih dari pembayaran Narasumber yang berasal dari Perangkat Derah terkait
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95,13%	99,54%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Usaha Mikro naik Kelas (Usaha Mikro)	3	652.381.000		-		-		270.000.000		381.380.900	1	651.380.900	33,33%	99,85%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Sarana dan Prasarananya (%)	8	652.381.000	-	-	-	-	3	270.000.000	4	381.380.900	7	651.380.900	87,50%	99,85%		
		Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	40	652.381.000	-	-	-	-	15	270.000.000	25	381.380.900	40	651.380.900	100,00%	99,85%		Sisa lebih dari pembayaran fasilitasi pengembangan usaha mikro
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,85%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

				5.176.196.627		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**98,81%**	**98,49%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

RSUD TORA BELO KABUPATEN SIGI

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	41.805.106.270		7.154.127.218		9.119.243.775		13.005.939.534		11.003.428.580	100	40.282.739.107	100,00%	96,36%	RSUD TORA BELO KABUPATEN SIGI	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	602.000.000	100	-	100	167.326.406	100	235.892.562	100	172.682.792	100	575.901.760	100,00%	95,66%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	602.000.000	3	-	3	167.326.406	3	235.892.562	3	172.682.792	12	575.901.760	100,00%	95,66%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	42.400.000	100	-	100	-	100	-	100	42.400.000	100	42.400.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	42.400.000	9	-	9	-	9	-	9	42.400.000	9	42.400.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan Pasien (%)	80	41.160.706.270	80	7.154.127.218	80	8.951.917.369	80	12.770.046.972	80	10.788.345.788	80	39.664.437.347	100,00%	96,36%		

		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	9	41.160.706.270	9	7.154.127.218	9	8.951.917.369	9	12.770.046.972	9	10.788.345.788	9	39.664.437.347	100,00%	96,36%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,36%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan jenis layanan kesehatan rujukan dan kesehatan masyarakat (%)	100	11.852.374.230		-		1.465.440.000		3.328.171.500		6.467.637.906	100	11.261.249.406	100,00%	95,01%	RSUD TORA BELO KABUPATEN SIGI	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase menurunnya Pasien yang dirujuk (%)	10	8.592.374.230	10	-	10	-	10	1.966.571.500	10	6.034.677.906	10	8.001.249.406	100,00%	93,12%		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	219	6.824.046.000	73	-	73	-	73	1.595.321.500	73	4.648.753.115	73	6.244.074.615	33,33%	91,50%		Tidak Ada
		Pengembangan Rumah Sakit			1.768.328.230		-		-		371.250.000		1.385.924.791		1.757.174.791		99,37%		Tidak Ada
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Komplain Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit (0.25)	25	3.260.000.000	25	-	25	1.465.440.000	25	1.361.600.000	25	432.960.000	25	3.260.000.000	100,00%	100,00%		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	12	3.260.000.000	3	-	3	1.465.440.000	3	1.361.600.000	3	432.960.000	12	3.260.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		46,70%	95,01%		
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
					53.657.480.500	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**88,23%**	**96,06%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dolo Barat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentse hasil perencanaan dan pengelolaan keuangan, untuk menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	2.349.132.648		424.923.779		589.350.851		562.335.688		688.764.531	100	2.265.374.849	100,00%	96,43%	Dolo Barat	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan adminstrasi keuangan perangkat daerah (1)	100	2.084.170.948	25	396.587.996	25	505.564.538	25	505.564.538	25	587.637.331	100	1.995.354.403	100,00%	95,74%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	2.043.850.948	24	389.867.996	24	488.764.538	24	488.764.538	24	577.557.331	24	1.944.954.403	100,00%	95,16%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	40.320.000	1	6.720.000	1	16.800.000	1	16.800.000	1	10.080.000	1	50.400.000	100,00%	125,00%		honorarium penatausahaandan pengujian / verifikasi keuangan skpd
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	7.800.000	25	1.300.000	25	3.250.000	25	3.250.000	25	1.950.000	100	9.750.000	100,00%	125,00%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	7.800.000	1	1.300.000	1	3.250.000	1	3.250.000	1	1.950.000	1	9.750.000	100,00%	125,00%		horarium penatausahaan barang milik daerah pada skpd
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	48.356.700	25	-	25	15.229.700	25	11.605.650	25	16.115.700	100	42.951.050	100,00%	88,82%	Ti Ada	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	27.235.600	1	-	1	4.973.600	1	6.433.600	1	10.510.750	1	21.917.950	100,00%	80,48%		belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor alat tulis dan belanja pemeliharaan komputer atau unit personal komputer

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2.561.100	1	-	1	1.064.100	1	532.050	1	964.950	1	2.561.100	100,00%	100,00%		belanja barang cetakan dan penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	18.560.000	1	-	1	9.192.000	1	4.640.000	1	4.640.000	1	18.472.000	100,00%	99,53%		belanja makan minum kegiatan musrembang,makan minum pkk, dan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	175.805.000	25	19.235.783	25	49.106.613	25	33.512.500	25	75.267.500	100	177.122.396	100,00%	100,75%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000	1	-	1	500.000	1	250.000	1	250.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%		belanja materai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	8.500.000	1	1.435.783	1	4.106.613	1	2.250.000	1	1.750.000	1	9.542.396	100,00%	112,26%		belanja tagihan listrik dan belanja kawat/faximile /internet
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	166.305.000	1	17.800.000	1	44.500.000	1	31.012.500	1	73.267.500	1	166.580.000	100,00%	100,17%		belanja horarium tenaga kontrak dan belanja makan minum kegiatan MTQ dan belanja pakean,tradisional,dan sewa kendaraan penumpang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	33.000.000	25	7.800.000	25	16.200.000	25	8.403.000	25	7.794.000	100	40.197.000	100,00%	121,81%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	33.000.000	1	7.800.000	2	16.200.000	5	8.403.000	1	7.794.000	9	40.197.000	100,00%	121,81%		belanja bahan bakar dan pelumas dan pembayaran pajak,bea, dan perizinan
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,43%		
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				2.349.132.648	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**96,43%**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Dolo Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	3	4	7		12		13=12/7x100%		16	17		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Semua Bidang											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.793.927.582	100	1.675.742.171	100,00%	93,41%	Dolo Selatan	Tidak tercapainya realisasi anggaran 100 % terhadap persentase Indeks Realisasi Birokrasi karena adanya sisa belanja gaji dan tambahan penghasilan pegawai pada sub kegiatan yang menunjang program urusan pemerintahan daerah yang tidak dapat direalisasikan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.535.367.782	50	1.422.302.768	50,00%	92,64%		Realisasi belanja kegiatan tidak tercapai 100% di karenakan adanya sisa belanja pada sub kegiatan yang menunjang pengelolaan administrasi perangkat daerah		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	41.280.000	12	41.280.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada	7933	1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	9.000.000	100	9.000.000	100,00%	100,00%				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	9.000.000	12	9.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada	7934	1
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	59.019.800	100	58.999.800	100,00%	99,97%				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	15.000.000	4	15.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada	7940	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)	100	7.500.000	100	7.500.000	100,00%	100,00%				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	7.500.000	1	7.500.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada	7941	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	132.000.000	100	127.939.603	100,00%	96,92%				

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	119.000.000	12	119.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada	7944	1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	51.040.000	100	50.000.000	100,00%	97,96%				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	12.500.000	2	12.500.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada	7947	1
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		97,40%	93,41%				
					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
				1.793.927.582	**KINERJA DAN ANGGAR**		**97,40%**	**93,41%**				
					INERJA DARI SELURU		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Gumbasa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	3	4	7		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.602.747.233	100	1.481.467.086	100,00%	92,43%	Gumbasa	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.407.787.433	100	1.294.135.674	100,00%	91,93%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	39.840.000	12	39.840.000	100,00%	100,00%	SPM/SP2D untuk belanja honor pengelolah keuangan setiap bulan.	Tidak Ada
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	15.000.000	100	12.600.000	100,00%	84,00%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	15.000.000	12	12.600.000	100,00%	84,00%	adanya pergantian pengurus BMD di pertengahan tahun.jelaskan isi dokumen	Tidak Ada
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	39.099.800	100	39.099.800	100,00%	100,00%		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	16	31.369.000	16	31.369.000	100,00%	100,00%	Rakor lintas sektor setiap bulan, rapat stunting.	Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	94.530.000	100	90.436.612	100,00%	95,67%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	88.300.000	12	85.300.000	100,00%	96,60%	ada kegiatan kejurda voli yang diundur kegiatannya ke awal tahun 2025.	Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	46.330.000	100	45.195.000	100,00%	97,55%		

8031 1

8032 1

8035 1

8038 1

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.770.000	1	5.770.000	100,00%	100,00%	I unit sarana yang direhabilitasi.	Tidak Ada
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,43%		
					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				1.602.747.233	**KINERJA DAN ANGGAR**		**100,00%**	**92,43%**		
					KINERJA DARI SELURU		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

8041 1

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Kulawi Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan
1	3	4	7		12		13=12/7x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.752.823.063	100	1.720.388.258	100,00%	98,15%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaan pelaporan keuangan yangmenjadi masukan dalam pengelolaan adminisstrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	1.459.123.163	57	1.397.475.958	57,00%	95,78%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	8.221.500	100	8.217.600	100,00%	99,95%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	262.978.400	75	292.194.700	75,00%	111,11%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	22.500.000	100	22.500.000	100,00%	100,00%	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,24%	98,15%	
					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
				1.752.823.063	**N KINERJA DAN ANGGARA**		**91,24%**	**98,15%**	
					KINERJA DARI SELURUH		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Marawola Barat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	3	4	7		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	2.055.157.273	94	1.940.576.985	94,00%	94,42%	Marawola Barat	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.754.057.473	75	1.641.851.985	75,00%	93,60%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	1.754.057.473	25	1.641.851.985	83,33%	93,60%	ada 1 orang pegawai kurang aktif berpengaruh pada realisasi	Tidak Ada
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	94.793.200	100	93.383.200	100,00%	98,51%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	75.710.000	2	74.300.000	100,00%	98,14%	Adanya Rapat koordinasi Lintas Sektor yang dilaksanakan setiap bulan, rapat PKK, Rapat Stanting dll	Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	152.506.600	100	152.506.000	100,00%	100,00%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	152.506.600	1	152.506.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	53.800.000	100	52.835.800	100,00%	98,21%		

					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	85,78%	94,42%		
					Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi		
				2.055.157.273	N KINERJA DAN ANGGARAN	85,78%	94,42%		
					T KINERJA DARI SELURUH P	Tinggi	Sangat Tinggi		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Palolo

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	3	4	7		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.168.741.243	100	2.101.461.904	100,00%	96,90%	Palolo	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.973.051.643	25	1.908.276.567	25,00%	96,72%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	65.003.000	100	65.003.000	100,00%	100,00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	130.686.600	100	128.182.337	100,00%	98,08%		
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	96,90%		
					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				2.168.741.243	**I KINERJA DAN ANGGARA**		**100,00%**	**96,90%**		
					KINERJA DARI SELURUH		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Pipikoro

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.702.811.478		245.063.252		493.024.193		427.617.515		503.760.201	100	1.669.465.161	100,00%	98,04%	Pipikoro	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.400.452.478	25	245.063.252	25	445.146.993	25	367.387.515	25	313.417.401	100	1.371.015.161	100,00%	97,90%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	1.400.452.478	18	245.063.252	18	445.146.993	18	367.387.515	18	313.417.401	18	1.371.015.161	100,00%	97,90%	Sisa anggaran gaji dan TPP	Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	300.759.000	25	-	25	47.877.200	25	60.230.000	25	188.742.800	100	296.850.000	100,00%	98,70%		

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	172.019.000	-	-	3	47.877.200	3	40.380.000	3	81.352.800	9	169.610.000	100,00%	98,60%	sisa anggaran pengadaan ATK dan barang habis pakai	Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	128.740.000	5	-	5	-	5	19.850.000	5	107.390.000	20	127.240.000	100,00%	98,83%	sisa anggaran makan minum	Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (Persen Persen)	100	1.600.000	25	-	25	-	25	-	25	1.600.000	100	1.600.000	100,00%	100,00%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,04%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					1.702.811.478	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**98,04%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Sigi Biromaru

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (persen)	100	1.921.981.840		322.564.290		641.748.579		399.915.998		524.203.547	100	1.888.432.414	100,00%	98,25%	Sigi Biromaru	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan (Tahun)	100	1.602.202.540	25	286.097.843	25	576.011.750	25	338.597.629	25	374.811.077	100	1.575.518.299	100,00%	98,33%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	1.564.282.540	21	276.617.843	21	566.531.750	21	329.117.629	21	365.331.077	21	1.537.598.299	100,00%	98,29%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	37.920.000	3	9.480.000	3	9.480.000	3	9.480.000	3	9.480.000	12	37.920.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dokumen)	100	7.800.000	25	1.950.000	25	1.950.000	25	1.950.000	25	1.950.000	100	7.800.000	100,00%	100,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	7.800.000	3	1.950.000	3	1.950.000	3	1.950.000	3	1.950.000	12	7.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (Paket)	100	122.189.300	25	-	50	16.673.900	75	33.381.400	100	72.134.000	100	122.189.300	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	52.348.000	-	-	2	14.459.000	1	2.895.200	3	34.993.800	6	52.348.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	9.795.300	-	-	1	2.214.900	1	2.215.200	1	5.365.200	1	9.795.300	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	60.046.000	-	-	-	-	8	28.271.000	4	31.775.000	12	60.046.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	100	70.640.000	25	14.047.500	50	25.535.000	75	-	100	29.538.700	100	69.121.200	100,00%	97,85%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	70.640.000	1	14.047.500	1	25.535.000	-	-	2	29.538.700	4	69.121.200	100,00%	97,85%		Tidak Teraliasasi Belanja Pajak Kendaraan Rp. 1.461.300
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (% Persen)	100	119.150.000	25	20.468.947	50	21.577.929	75	25.986.969	100	45.769.770	100	113.803.615	100,00%	95,51%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4.000.000	-	-	-	-	2	2.000.000	2	2.000.000	4	4.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	24.000.000	2	1.568.947	2	2.677.929	2	5.086.969	2	9.319.770	2	18.653.615	100,00%	77,72%		pembayaran listrik yang menganggarkan lebih dari pemakaian perbulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	91.150.000	1	18.900.000	1	18.900.000	2	18.900.000	2	34.450.000	6	91.150.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,25%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					1.921.981.840	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**98,25%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Tanambulava

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.998.808.690		335.444.946		637.500.233		780.054.269		150.467.024	100	1.903.466.472	100,00%	95,23%	Tanambulava	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.757.329.190	25	312.144.946	25	607.050.233	25	685.272.864	25	59.687.424	100	1.664.155.467	100,00%	94,70%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	1.717.009.190	20	305.424.946	20	596.970.233	20	668.472.864	20	56.327.424	20	1.627.195.467	100,00%	94,77%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	40.320.000	1	6.720.000	1	10.080.000	1	16.800.000	1	3.360.000	1	36.960.000	100,00%	91,67%		1 Dokumen Setiap Tw yaitu; Dokumen Belanja Honorarium PPTK,Honorarium Pengelola Keuangan,dan Honorarium penatausahaan Keuangan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	19.800.000	25	1.500.000	25	2.250.000	25	14.550.000	25	750.000	100	19.050.000	100,00%	96,21%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	19.800.000	1	1.500.000	1	2.250.000	1	14.550.000	1	750.000	1	19.050.000	100,00%	96,21%		1 Laporan di setiap TW berupa laporan,Honorarium Pengurus barang,Belanja Baju Batik Tradisional, dan Pembelajaan Pemeliharaan Peralatan Mesin
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luran hasil analisis Dokumen administrasi Umum pada perangkat daerah (1)	100	75.579.500	25	-	25	-	25	17.899.900	25	57.679.600	100	75.579.500	100,00%	100,00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6.414.800	3	-	3	-	3	6.264.000	3	150.800	12	6.414.800	100,00%	100,00%		tw 1 dan tw 2 belum terealisasi amggaran dan terealisasi di Tw 3 dan 4 yaitu, Belanja Alat/Bahan alat tulis kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	4.064.700	2	-	2	-	2	1.665.900	2	2.398.800	2	4.064.700	100,00%	100,00%		Tidak Ada

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	49.800.000	1	-	1	-	1	9.970.000	1	39.830.000	1	49.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	15.300.000	2	-	2	-	2	-	2	15.300.000	2	15.300.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	91.300.000	25	12.800.000	25	19.200.000	25	39.031.505	25	19.120.000	100	90.151.505	100,00%	98,74%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	1.000.000	30	-	20	-	20	1.000.000	30	-	100	1.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	13.500.000	3	-	3	-	3	6.031.505	3	6.320.000	12	12.351.505	100,00%	91,49%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	76.800.000	3	12.800.000	3	19.200.000	3	32.000.000	3	12.800.000	12	76.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	54.800.000	25	9.000.000	25	9.000.000	25	23.300.000	25	13.230.000	100	54.530.000	100,00%	99,51%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	54.800.000	7	9.000.000	7	9.000.000	7	23.300.000	7	13.230.000	7	54.530.000	100,00%	99,51%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,23%		
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				1.998.808.690	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**95,23%**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Dolo

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.455.998.670		576.365.720		636.537.832		492.437.475		648.701.647	100	2.354.042.674	100,00%	95,85%	Dolo	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.173.804.970	25	549.813.545	50	605.992.832	75	450.872.475	100	478.947.971	100	2.085.626.823	100,00%	95,94%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	2.090.568.770	27	525.237.345	27	593.872.832	27	438.752.475	27	445.527.971	27	2.003.390.623	100,00%	95,83%		Ada 1 Pegawai yang tidak aktif berpengaruh pada realisasi Gaji & TPP
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	83.236.200	3	24.576.200	3	12.120.000	3	12.120.000	3	33.420.000	12	82.236.200	100,00%	98,80%		Jumlah SPM untuk belanja honorarium pengelola keuangan setiap bulannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	43.653.700	25	-	50	4.995.000	75	9.745.000	100	26.913.700	100	41.653.700	100,00%	95,42%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2.508.700	-	-	-	-	-	-	4	2.508.700	4	2.508.700	100,00%	100,00%		Penyediaan Barang cetakan dilaksanakan di TW IV (Baliho, Jilid Buku,DPA Pergeseran & Perubahan)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	41.145.000	-	-	3	4.995.000	3	9.745.000	6	24.405.000	12	39.145.000	100,00%	95,14%		Belanja konsumsi kegiatan tingkat kecamatan & kabupaten
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	83.500.000	25	17.802.175	50	16.800.000	75	16.800.000	100	22.400.000	100	73.802.175	100,00%	88,39%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.500.000	1	1.002.175	-	-	-	-	-	-	1	1.002.175	100,00%	40,09%		Belanja biaya materai

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	18.000.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	4	18.000.000	100,00%	100,00%		Belanja rutin setiap bulan tagihan listrik & Internet
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	63.000.000	3	12.300.000	3	12.300.000	3	12.300.000	3	17.900.000	12	54.800.000	100,00%	86,98%		Belanja honorarium tenaga kontrak Non ASN setiap bulannya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	155.040.000	25	8.750.000	50	8.750.000	75	15.020.000	100	120.439.976	100	152.959.976	100,00%	98,66%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	35.040.000	7	8.750.000	7	8.750.000	7	8.750.000	7	8.790.000	7	35.040.000	100,00%	100,00%		Belanja rutin Bahan Bakar Minyak (BBM) 7 Unit kendaraan dinas disetiap Triwulan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	20.000.000	-	-	-	-	2	6.270.000	5	11.930.000	7	18.200.000	100,00%	91,00%		Jumlah biaya pemeliharan kendaraan dinas
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	99.719.976	1	99.719.976	100,00%	99,72%		1 Unit Rehabilitasi Gedung Kantor Sementara Kecamatan Dolo
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,85%		
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				2.455.998.670	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**95,85%**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Kinovaro

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	0	2.389.150.212		354.915.532		632.543.462		-		-	-	987.458.994	0,00%	41,33%	Kinovaro	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.174.257.712	25	341.815.532	25	604.811.182	-	-	-	-	50	946.626.714	50,00%	43,54%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	2.136.337.712	27	335.495.532	27	595.331.182	-	-	-	-	14	930.826.714	50,00%	43,57%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	37.920.000	3	6.320.000	2	9.480.000	-	-	-	-	5	15.800.000	100,00%	41,67%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	7.800.000	25	1.300.000	25	1.950.000	-	-	-	-	50	3.250.000	50,00%	41,67%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	7.800.000	-	1.300.000	-	1.950.000	-	-	-	-	-	3.250.000	0,00%	41,67%		Tidak Ada
			*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		3		2		-		-		5		41,67%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	52.142.500	25	-	25	5.608.800	-	-	-	-	50	5.608.800	50,00%	10,76%		

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.842.600	1	-	1	2.238.800	-	-	-	-	1	2.238.800	50,00%	28,55%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1.509.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	16.420.000	1	-	1	3.370.000	1	-	1	-	1	3.370.000	100,00%	20,52%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	137.250.000	25	11.800.000	25	20.173.480	-	-	-	-	50	31.973.480	50,00%	23,30%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.850.000	1	-	1	870.000	1	-	1	-	1	870.000	100,00%	47,03%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12.000.000	3	-	3	1.603.480	-	-	-	-	6	1.603.480	100,00%	13,36%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	123.400.000	3	11.800.000	2	17.700.000	-	-	-	-	5	29.500.000	100,00%	23,91%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	17.700.000	25	-	25	-	-	-	-	-	50	-	50,00%	0,00%		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	17.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	52,96%	41,33%		
															Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah		
					2.389.150.212	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										52,96%	41,33%		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah	Sangat Rendah		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Kulawi

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.966.615.945		386.863.980		623.312.447		481.384.606		389.246.289	100	1.880.807.322	100,00%	95,64%	Kulawi	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaan pelaporan keuangan yangmenjadi masukan dalam pengelolaan adminisstrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	1.725.771.245	25	351.923.780	50	587.420.447	75	442.158.453	100	259.648.827	100	1.641.151.507	100,00%	95,10%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	1.680.011.245	18	339.443.780	18	574.940.447	18	433.838.453	18	247.168.827	18	1.595.391.507	100,00%	94,96%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	45.760.000	3	12.480.000	3	12.480.000	3	8.320.000	3	12.480.000	12	45.760.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	66.789.600	25	-	50	12.792.000	75	14.680.000	100	39.280.000	100	66.752.000	100,00%	99,94%		

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2.904.600	-	-	2	2.867.000	-	-	-	-	2	2.867.000	100,00%	98,71%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	45.835.000	1	-	1	-	1	14.680.000	1	31.155.000	4	45.835.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	18.050.000	3	-	3	9.925.000	3	-	3	8.125.000	12	18.050.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	153.025.100	25	29.940.200	50	18.100.000	75	18.330.675	100	85.502.940	100	151.873.815	100,00%	99,25%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1.495.900	1	-	1	500.000	1	-	1	995.900	4	1.495.900	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1.500.000	3	-	3	-	3	330.675	3	18.040	12	348.715	100,00%	23,25%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	6.382.200	1	3.540.200	1	-	1	-	1	2.842.000	4	6.382.200	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	143.647.000	3	26.400.000	3	17.600.000	3	18.000.000	3	81.647.000	12	143.647.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	21.030.000	25	5.000.000	50	5.000.000	75	6.215.478	100	4.814.522	100	21.030.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	18.960.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.215.478	1	2.744.522	4	18.960.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2.070.000	-	-	-	-	-	-	2	2.070.000	2	2.070.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,64%		
						Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					1.966.615.945	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**100,00%**	**95,64%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Lindu

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	98	1.344.856.015		186.122.347		378.910.774		297.271.905		407.898.559	94	1.270.203.585	95,71%	94,45%	Lindu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.049.441.615	100	184.922.347	91	339.712.174	91	216.360.505	95	236.307.759	95	977.302.785	95,00%	93,13%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10	1.009.121.615	11	178.202.347	10	332.992.174	10	202.920.505	10	222.867.759	10	936.982.785	100,00%	92,85%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	40.320.000	2	6.720.000	2	6.720.000	4	13.440.000	4	13.440.000	12	40.320.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	100	7.200.000	20	1.200.000	40	1.200.000	80	2.400.000	100	2.400.000	100	7.200.000	100,00%	100,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	7.200.000	3	1.200.000	2	1.200.000	4	2.400.000	3	2.400.000	12	7.200.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	123.214.400	2	-	4	2.998.600	35	23.071.400	57	96.409.000	98	122.479.000	98,00%	99,40%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	37.622.400	3	-	7	2.998.600	14	4.831.400	18	29.321.000	18	37.151.000	100,00%	98,75%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	7.808.000	-	-	2	-	2	1.500.000	2	6.308.000	2	7.808.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	77.784.000	4	-	5	-	11	16.740.000	10	60.780.000	30	77.520.000	100,00%	99,66%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	101.600.000	-	-	19	23.400.000	54	40.840.000	19	36.770.000	92	101.010.000	92,00%	99,42%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.000.000	3	-	2	-	4	1.000.000	3	1.000.000	12	2.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	6.000.000	3	-	2	-	3	1.840.000	3	3.570.000	11	5.410.000	91,67%	90,17%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	93.600.000	-	-	3	23.400.000	6	38.000.000	3	32.200.000	12	93.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	63.400.000	-	-	25	11.600.000	56	14.600.000	17	36.011.800	98	62.211.800	98,00%	98,13%		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	63.400.000	13	-	13	11.600.000	13	14.600.000	13	36.011.800	13	62.211.800	100,00%	98,13%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,96%	94,45%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					1.344.856.015	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,96%**	**94,45%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Marawola

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (%)	100	2.044.276.180		384.115.625		621.535.415		728.285.738		310.054.902	100	2.043.991.680	100,00%	99,99%	Marawola	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Persentase pengelolaan adiministrasi sesuai standar teknis (% 100 Persentase)	100	1.838.916.480	96	373.515.625	96	593.992.780	96	690.118.208	96	181.289.867	96	1.838.916.480	96,00%	100,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	1.782.876.480	22	364.175.625	22	579.982.780	22	666.768.208	22	171.949.867	22	1.782.876.480	95,65%	100,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	56.040.000	3	9.340.000	3	14.010.000	3	23.350.000	3	9.340.000	12	56.040.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pengelolaan administrasi sesuai standar teknis (% 100 Persentase)	100	77.199.700	25	-	25	8.600.500	25	10.473.200	25	58.126.000	100	77.199.700	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	7.969.200	3	-	3	1.740.000	3	1.995.200	3	4.234.000	12	7.969.200	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	4.678.500	3	-	3	1.120.500	3	1.448.000	3	2.110.000	12	4.678.500	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	64.552.000	6	-	6	5.740.000	6	7.030.000	6	51.782.000	24	64.552.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan administrasi sesuai standar teknis Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100 %)	100	96.600.000	25	10.600.000	25	18.942.135	25	27.694.330	25	39.363.535	100	96.600.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12.000.000	3	-	3	3.042.135	3	1.194.330	3	7.763.535	12	12.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	84.600.000	3	10.600.000	3	15.900.000	3	26.500.000	3	31.600.000	12	84.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan administrasi sesuai standar keuangan (100 Persentase)	100	31.560.000	25	-	25	-	25	-	25	31.275.500	100	31.275.500	100,00%	99,10%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	31.560.000	-	-	-	-	-	-	2	31.275.500	2	31.275.500	100,00%	99,10%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,21%	99,99%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					2.044.276.180	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**96,21%**	**99,99%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Nokilalaki

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.760.044.740		392.879.085		595.085.802		263.014.602		-	100	1.250.979.489	100,00%	71,08%	Nokilalaki	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.504.762.740	25	361.379.085	25	570.185.802	-	203.563.602	-	-	13	1.135.128.489	12,50%	75,44%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	1.504.762.740	18	361.379.085	18	570.185.802	18	203.563.602	18	-	18	1.135.128.489	100,00%	75,44%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	62.368.000	25	-	25	-	-	25.162.950	-	-	13	25.162.950	12,50%	40,35%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	62.368.000	3	-	3	-	-	25.162.950	-	-	6	25.162.950	50,00%	40,35%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.674.000		-		-		-		-		-		0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			57.674.000		-		-		-		-		-		0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	82.200.000	25	19.800.000	25	13.200.000	-	19.000.000	-	-	50	52.000.000	50,00%	63,26%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	82.200.000	3	19.800.000	3	13.200.000	-	19.000.000	-	-	6	52.000.000	50,00%	63,26%		Tidak Ada

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	53.040.000	25	11.700.000	25	11.700.000	-	15.288.050	-	-	50	38.688.050	50,00%	72,94%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	53.040.000	1	11.700.000	1	11.700.000	-	15.288.050	-	-	1	38.688.050	6,25%	72,94%		Tidak Ada
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	89,79%	71,08%		
																Predikat Kinerja	Tinggi	Sedang		
					1.760.044.740	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**											**89,79%**	**71,08%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**Tinggi**	**Sedang**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Palolo

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	2.168.741.243		379.339.528		716.076.897		466.923.578		539.121.901	100	2.101.461.904	100,00%	96,90%	Palolo	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.973.051.643	25	359.439.528	25	674.866.897	25	418.439.944	25	455.530.198	100	1.908.276.567	100,00%	96,72%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	1.897.621.343	25	348.699.528	25	654.980.997	25	397.611.944	25	431.553.798	25	1.832.846.267	100,00%	96,59%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	75.430.300	3	10.740.000	3	19.885.900	3	20.828.000	3	23.976.400	12	75.430.300	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	65.003.000	25	-	25	5.740.000	25	15.150.000	25	44.113.000	100	65.003.000	100,00%	100,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	65.003.000	-	-	3	5.740.000	3	15.150.000	6	44.113.000	12	65.003.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	130.686.600	25	19.900.000	25	35.470.000	25	33.333.634	25	39.478.703	100	128.182.337	100,00%	98,08%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (%)	12	73.086.600	3	10.300.000	3	21.070.000	3	18.933.634	3	20.278.703	12	70.582.337	100,00%	96,57%		Tidak Ada

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	57.600.000	3	9.600.000	2	14.400.000	3	14.400.000	4	19.200.000	12	57.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,90%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					2.168.741.243	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**96,90%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Sigi Kota

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.650.335.426		305.308.629		531.714.504		315.162.103		424.597.069	80	1.576.782.305	80,00%	95,54%	Sigi Kota	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.433.435.676	25	273.858.629	25	486.947.704	25	286.762.103	25	317.481.269	100	1.365.049.705	100,00%	95,23%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	1.379.435.676	12	264.858.629	12	473.447.704	12	273.262.103	12	299.481.269	12	1.311.049.705	100,00%	95,04%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	54.000.000	3	9.000.000	3	13.500.000	3	13.500.000	3	18.000.000	12	54.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	7.200.000	25	1.200.000	25	1.800.000	25	1.800.000	25	2.400.000	100	7.200.000	100,00%	100,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	7.200.000	3	1.200.000	3	1.800.000	3	1.800.000	3	2.400.000	12	7.200.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luran hasil analisis Dokumen administrasi Umum pada perangkat daerah (1)	100	105.471.000	25	-	25	20.716.800	25	5.950.000	25	74.004.200	100	100.671.000	100,00%	95,45%		

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	49.171.000	-	-	3	13.386.800	6	-	3	35.784.200	12	49.171.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	56.300.000	-	-	2	7.330.000	12	5.950.000	10	38.220.000	24	51.500.000	100,00%	91,47%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	34.850.000	25	15.000.000	25	7.000.000	25	5.400.000	25	7.450.000	100	34.850.000	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.250.000	-	-	-	-	-	-	12	1.250.000	12	1.250.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	4.000.000	3	-	3	-	3	3.000.000	3	1.000.000	12	4.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	29.600.000	3	15.000.000	3	7.000.000	3	2.400.000	3	5.200.000	12	29.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	69.378.750	25	15.250.000	25	15.250.000	25	15.250.000	25	23.261.600	100	69.011.600	100,00%	99,47%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	1	6.500.000	-	-	-	-	-	-	1	6.500.000	1	6.500.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	62.878.750	1	15.250.000	1	15.250.000	1	15.250.000	1	16.761.600	4	62.511.600	100,00%	99,42%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100,00%	95,54%		
						Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

				1.650.335.426		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**100,00%**	**95,54%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Baluase

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.049.593.416		254.330.868		604.205.489		742.952.653		819.234.576		2.420.723.586		79,38%	Puskesmas Baluase	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.049.593.416		254.330.868		604.205.489		742.952.653		819.234.576		2.420.723.586		79,38%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	354	26.500.000	40	-	66	7.950.000	132	9.900.000	116	8.650.000	354	26.500.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	331	12.334.000	10	-	15	-	20	-	269	11.700.000	314	11.700.000	94,86%	94,86%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 4, Kegiatan transport calon pendonor darah untuk mendukung P4K tidak
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1522	80.400.000	178	-	200	20.000.000	217	11.400.000	927	33.525.000	1.522	64.925.000	100,00%	80,75%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2, Kegiatan anak usia sekolah dianggarkan 2 hari tetapi yang direalisasikan hanya 1 hari dan target terserap 100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	297	12.500.000	24	-	30	2.250.000	36	1.550.000	81	3.400.000	171	7.200.000	57,58%	57,60%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2, Kegiatan direalisasikan berdasarkan kasus yang ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	431	6.000.000	46	-	54	1.400.000	-	-	331	4.600.000	431	6.000.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	4	290.664.000	1	-	1	181.561.600	1	97.352.400	1	11.200.000	4	290.114.000	100,00%	99,81%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4	36.000.000	1	-	1	7.650.000	1	8.850.000	1	19.500.000	4	36.000.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	4	33.600.000	1	-	1	2.550.000	1	1.600.000	1	28.350.000	4	32.500.000	100,00%	96,73%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2, Dokumen kegiatannya berupa surat tugas, laporan kegiatan,
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	4	172.100.000	1	-	1	39.550.000	1	34.975.000	1	80.675.000	4	155.200.000	100,00%	90,18%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2, Kegiatan direalisasikan berdasarkan kasus yang ada, Dokumen kegiatannya berupa surat tugas,
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	15922	1.821.156.416	3.550	254.330.868	3.000	239.744.336	2.000	461.690.837	3.025	367.454.352	11.575	1.323.220.393	72,70%	72,66%		Anggaran di realisasikan berdasarkan dana yang ditransfer dari BPJS, Di DPA berisi indikator 15.922 dokumen, tetapi kegiatan yang ditransfer dari BPJS berdasarkan jumlah jiwa yang
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	4	289.839.000	1	-	1	55.449.553	1	58.084.416	1	92.005.224	4	205.539.193	100,00%	70,91%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2, Dana Kegiatan isentif tidak direalisasikan semua karna SPM rendah dan realisasi rendah
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	4	4.500.000	1	-	1	4.500.000	1	-	1	-	4	4.500.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	55	13.500.000	4	-	7	2.800.000	19	4.600.000	25	6.100.000	55	13.500.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	420	10.800.000	56	-	60	3.000.000	148	3.800.000	156	4.000.000	420	10.800.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	12.000.000	-	-	-	800.000	-	2.500.000	1	2.100.000	1	5.400.000	100,00%	45,00%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2, Dana Makan Minum tidak direalisasikan.
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	227.700.000	3	-	3	35.000.000	3	46.650.000	3	145.975.000	12	227.625.000	100,00%	99,97%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		83,50%	79,38%		
														Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			19.192.000		-		-		-		19.150.000		19.150.000		99,78%	Puskesmas Baluase	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			19.192.000		-		-		-		19.150.000		19.150.000		99,78%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	19.192.000	-	-	-	-	-	-	1	19.150.000	1	19.150.000	100,00%	99,78%		Kegiatan dilaksanakan di TW 1 tetapi pencairannya direalisasikan di TW 2
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,78%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					3.068.785.416	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**83,60%**	**79,51%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Tinggi**	**Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Puskesmas Banpres

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.440.323.171				349.907.256		341.558.165		525.983.394		1.276.717.710		88,64%	Puskesmas Banpres	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.440.323.171				349.907.256		341.558.165		525.983.394		1.276.717.710		88,64%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	237	30.840.000	59		59	13.810.000	47		25	12.540.000	190	26.350.000	80,17%	85,44%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober, sehingga realisasi tidak ada di TW I, akan tetapi kegiatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	226	17.144.000	33		32	9.554.000	26		55	6.240.000	146	15.794.000	64,60%	92,13%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober, sehingga realisasi tidak ada di TW I, akan tetapi kegiatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1060	30.360.000	265		265	19.670.000	181		190	10.690.000	901	30.360.000	85,00%	100,00%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober, sehingga realisasi tidak ada di TW I, akan tetapi kegiatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	179	65.182.000	41		41	31.100.000	40		42	31.510.000	164	62.610.000	91,62%	96,05%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober, sehingga realisasi tidak ada di TW I, akan tetapi kegiatan tetap berjalan sesuai

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	92	13.040.000	28		28	6.580.000	29		14	4.860.000	99	11.440.000	100,00%	87,73%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober, sehingga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	200	12.320.000	50		50	3.320.000	13		50	5.840.000	163	9.160.000	81,50%	74,35%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober,
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	244.367.000	3		3	18.396.000	3	169.854.000	3	38.850.000	12	227.100.000	100,00%	92,93%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	24.040.000	3		3	5.300.000	3		3	9.600.000	12	14.900.000	100,00%	61,98%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	29.888.000	3		3	11.794.000	3		3	12.220.000	12	24.014.000	100,00%	80,35%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	158.586.000	3		3	68.630.000	3		3	73.770.000	12	142.400.000	100,00%	89,79%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober,
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	432.158.171	3	59.268.895	3	75.193.256	3	142.178.406	3	139.083.892	12	415.724.449	100,00%	96,20%		**Realisasi :** Keterlambatan penyaluran dana dari BPSJ Yaitu tanggal 30 desember
	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	236.128.000	3		3	32.360.000	3	29.525.759	3	131.267.502	12	193.153.261	100,00%	81,80%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan

	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	15	12.390.000	4		4	5.200.000	3		4	5.300.000	15	10.500.000	100,00%	84,75%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober, sehingga
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0	800.000	2		3	400.000	3		3	400.000	11	800.000	100,00%	100,00%		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	700	4.320.000	175		175	3.000.000	175		175	1.320.000	700	4.320.000	100,00%	100,00%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	8.600.000	3		3	2.500.000	3		3	3.260.000	12	5.760.000	100,00%	66,98%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan Oktober
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	120.160.000	3		3	43.100.000	3		3	39.232.000	12	82.332.000	100,00%	68,52%		Dana di salurkan tahap I bulan Mei, Tahap II bulan Agustus, Tahap III bulan
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,30%	88,64%		
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		
				1.440.323.171				**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**							**98,30%**	**88,64%**		
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Biromaru

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.557.801.811		-		1.006.619.506		1.092.347.011		1.227.952.147		3.326.918.664		93,51%	Puskesmas Biromaru	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.557.801.811		-		1.006.619.506		1.092.347.011		1.227.952.147		3.326.918.664		93,51%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1023	208.280.000	246	-	166	26.840.000	343	110.140.000	248	62.530.000	1.003	199.510.000	98,04%	95,79%	Realisasi anggaran masih 95% karena Kegiatan transport calon pendonor dan penyuluhan kb belum	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1081	117.300.000	164	-	196	21.680.000	290	59.160.000	254	36.460.000	904	117.300.000	83,63%	100,00%	Dana Terealisasi 100 persen tetapi target indiaktor masih 83% dikarenakan ada beberapa siswa tidak	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	815	3.600.000	58	-	263	3.600.000	494	-	-	-	815	3.600.000	100,00%	100,00%	Kegiatan dilaksanakan dari tw 1 sampai tw 4 dan realisasi anggaran pada tw 2	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1014	5.800.000	98	-	104	-	145	-	234	5.800.000	581	5.800.000	57,30%	100,00%	Dana Terealisasi 100 persen tetapi target masih 57% kurangnya pemeriksaan HIV dan IMS pada bumil di	

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	327.842.000	3	-	3	8.400.000	3	259.642.000	3	54.940.000	12	322.982.000	100,00%	98,52%	Realisasi belum mencapai 100% karena kegiatan pendampingan rujukan balita stunting tidak dilaksanakan (tidak	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	45.600.000	3	-	3	6.480.000	3	20.060.000	3	19.060.000	12	45.600.000	100,00%	100,00%	Terealisasi 100 persen dan menghasilkan dokumen dalam bentuk laporan kegiatan, surat tugas dan dokumentasi	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	40.045.000	3	-	3	1.760.000	3	15.320.000	3	14.930.000	12	32.010.000	100,00%	79,94%	Realisasi anggaran masih 79% karena Pertemuan validasi dan evaluasi data usia produktif dan lansia tidak	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	197.900.000	3	-	3	37.620.000	3	110.340.000	3	31.920.000	12	179.880.000	100,00%	90,89%	Kegiatan PIN Polio belum terelisasi sepenuhnya dan dan menghasilkan dokumen dalam bentuk laporan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	2.318.850.811	3	-	3	892.139.506	3	469.846.680	3	819.788.104	12	2.181.774.290	100,00%	94,09%	Ada beberapa pembelanjaan yang belum terealisasi, dokumen dalam bentuk	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	292.184.000	3	-	3	8.100.000	3	47.838.331	3	182.524.043	12	238.462.374	100,00%	81,61%	Kegiatan lokmin triwulanan terakhir tidak terlaksana dan Insentif UKM tidak terealisasi	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak adanya kasus	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,26%	93,51%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			18.745.000		-		-		-		18.745.000		18.745.000		100,00%	Puskesmas Biromaru	

		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			18.745.000		-		-		-		18.745.000		18.745.000		100,00%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	18.745.000	3	-	3	-	3	-	3	18.745.000	12	18.745.000	100,00%	100,00%	Terealisasi 100 persen, dan menghasilkan dokumen dalam bentuk DAUN kegiatan pertemuan	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					3.576.546.811	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,27%**	**93,54%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Dolo

No	Program/Kegiatan	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				I		II		III		IV							
1	3	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2.663.413.883		-		679.235.592		473.994.612		686.427.349		1.839.657.553		69,07%	Puskesmas Dolo	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.663.413.883		-		679.235.592		473.994.612		686.427.349		1.839.657.553		69,07%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64	43.500.000	15	-	30	13.050.000	10	-	9	2.790.000	64	15.840.000	100,00%	36,41%		Tidak Ada
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90	33.317.000	20	-	23	-	25	-	22	15.510.000	90	15.510.000	100,00%	46,55%		Tidak Ada
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	559	51.000.000	90	-	199	12.750.000	169	-	105	4.000.000	563	16.750.000	100,00%	32,84%		Tidak Ada
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42	6.600.000	6	-	9	2.200.000	8	-	19	454.950	42	2.654.950	100,00%	40,23%		Tidak Ada
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	84	273.953.000	12	-	29	1.100.000	40	152.601.660	3	3.590.000	84	157.291.660	100,00%	57,42%		Tidak Ada
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	12.100.000	1	-	1	2.200.000	1	-	1	1.680.000	1	3.880.000	100,00%	32,07%		Tidak Ada
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42	135.900.000	8	-	14	26.435.000	17	-	3	9.850.000	42	36.285.000	100,00%	26,70%		Tidak Ada
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90	209.900.000	24	-	30	55.070.000	25	-	11	31.000.000	90	86.070.000	100,00%	41,01%		Tidak Ada
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1.460.089.883	1	-	1	512.830.592	1	308.547.952	1	522.650.189	1	1.344.028.733	100,00%	92,05%		semua dana yang diterima terialisasi semua
	Operasional Pelayanan Puskesmas	52	279.554.000	4	-	8	9.350.000	10	7.770.000	30	81.982.210	52	99.102.210	100,00%	35,45%		Tidak Ada

	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	2.200.000	2	-	6	1.100.000	-	-	-	-	8	1.100.000	66,67%	50,00%		Tidak Ada
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	68	17.600.000	12	-	19	5.500.000	12	-	25	560.000	68	6.060.000	100,00%	34,43%		Tidak Ada
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100	2.400.000	16	-	29	1.100.000	20	-	35	-	100	1.100.000	100,00%	45,83%		Tidak Ada
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10	26.400.000	3	-	3	5.500.000	2	3.500.000	2	1.680.000	3	10.680.000	25,00%	40,45%		Tidak Ada
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1	108.900.000	1	-	1	31.050.000	1	1.575.000	1	10.680.000	1	43.305.000	100,00%	39,77%		Tidak Ada
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,23%	69,07%		
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		35.000		-		-		-		-		-		0,00%	Puskesmas Dolo	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		35.000		-		-		-		-		-		0,00%		
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			2.663.448.883	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,23%**	**69,07%**		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sedang**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Puskesmas Kaleke

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.464.652.851		145.702.643		629.454.455		529.247.094		894.199.328		2.198.603.520		89,21%	Puskesmas Kaleke	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.464.652.851		145.702.643		629.454.455		529.247.094		894.199.328		2.198.603.520		89,21%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	303	36.000.000	68	-	128	14.400.000	68	-	39	19.040.000	303	33.440.000	100,00%	92,89%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2 dan Untuk dana kegiatan ini tidak terealisasi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	233	5.330.000	68	-	68	2.935.000	68	-	29	2.325.000	233	5.260.000	100,00%	98,69%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2 dan Untuk dana kegiatan ini tidak terealisasi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1320	56.350.000	330	-	330	18.600.000	330	-	330	37.640.000	1.320	56.240.000	100,00%	99,80%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2 dan Untuk dana kegiatan ini tidak terealisasi semua karna perubahan SBU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	324	22.600.000	81	-	81	6.000.000	81	-	81	16.560.000	324	22.560.000	100,00%	99,82%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2 dan Untuk dana kegiatan ini tidak terealisasi semua karna perubahan SBU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	320	2.400.000	80	-	80	1.200.000	80	-	80	1.200.000	320	2.400.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	324.258.000	3	-	3	35.125.000	3	194.041.000	3	92.216.000	12	321.382.000	100,00%	99,11%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Dokumen kegiatannya berupa Surat Tugas, Laporan, Dokumentasi dan untuk PMT berupa Nota Pesanan

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4	9.600.000	1	-	1	4.800.000	1	-	1	4.740.000	4	9.540.000	100,00%	99,38%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Dokumen kegiatannya berupa Surat Tugas, Laporan, Dokumentasi dan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	4	21.535.000	1	-	1	3.875.000	1	-	1	16.800.000	4	20.675.000	100,00%	96,01%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Dokumen kegiatannya berupa Surat
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	4	191.400.000	1	-	1	66.800.000	1	-	1	123.240.000	4	190.040.000	100,00%	99,29%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Dokumen kegiatannya berupa Surat Tugas, Laporan, Dokumentasi dan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	4	1.361.837.851	1	145.702.643	1	387.244.455	1	295.247.305	1	338.791.638	4	1.166.986.041	100,00%	85,69%		Dokumen kegiatannya berupa Nota Pesanan, Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Modal, Belanja Perjalanan Dinas
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	4	257.582.000	1	-	1	8.395.000	1	39.958.789	1	151.406.690	4	199.760.479	100,00%	77,55%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Dokumen kegiatannya berupa Surat Tugas, Laporan, Dokumentasi dan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	2.400.000	3	-	3	1.200.000	3	-	3	1.200.000	12	2.400.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Laporan kegiatannya berupa Surat Tugas, Laporan, Dokumentasi dan laporan Bulanan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	44	7.200.000	11	-	11	2.400.000	11	-	11	4.800.000	44	7.200.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, dan untuk kegiatan Tuberkolosis di DPA tidak ada target dan kami mengambil dari pengelola program sebanyak 44
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	12	1.800.000	3	-	6	600.000	3	-	-	1.200.000	12	1.800.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, dan untuk kegiatan Tuberkolosis di DPA tidak ada target dan kami mengambil dari
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	27.360.000	3	-	3	13.680.000	3	-	3	12.480.000	12	26.160.000	100,00%	95,61%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Dokumen kegiatannya berupa Surat Tugas, Laporan, Dokumentasi dan
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	137.000.000	-	-	-	62.200.000	-	-	1	70.560.000	1	132.760.000	100,00%	96,91%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Dokumen kegiatannya berupa Surat
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	89,21%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			5.965.000		-		5.965.000		-		-		5.965.000		100,00%	Puskesmas Kaleke	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.965.000		-		5.965.000		-		-		5.965.000		100,00%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	5.965.000	3	-	3	5.965.000	3	-	3	-	12	5.965.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti lakukan pada triwulan 2, untuk Dokumen kegiatannya berupa Surat Tugas, Laporan, Dokumentasi dan laporan Bulanan
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					2.470.617.851	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**89,23%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Kamaipura

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.489.728.982		-		361.931.622		-		759.856.302		1.121.787.924		75,30%	Puskesmas Kamaipura	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.489.728.982		-		361.931.622		-		759.856.302		1.121.787.924		75,30%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	217	21.000.000	48	-	97	5.400.000	110	-	139	9.480.000	139	14.880.000	64,06%	70,86%		Kegiatan dilaksanakan TW 1, TW 2, TW 3,TW 4, pembayaran transport pelaksna kegiatan di TW 2 dan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	208	12.500.000	20	-	48	-	76	-	109	6.250.000	109	6.250.000	52,40%	50,00%		Kegiatan dilaksanakan di TW 4, Realisasi dilakukan di TW 2 DAN TW 4 Bentuk kegiatan Rapat pertemuan P4K, jenis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1001	32.400.000	1.001	-	1.001	1.400.000	1.001	-	1.001	9.740.000	1.001	11.140.000	100,00%	34,38%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasidi tw 2 dan tw 4, target tercapai, tetapi realisasi anggaran sebesar 34% karena ada perubahan di SBU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	205	32.500.000	68	-	156	20.250.000	189	-	205	6.320.000	205	26.570.000	100,00%	81,75%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasidi tw 2 dan tw 4, target tercapai, tetapi realisasi anggaran sebesar 81% karena ada perubahan di SBU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	258	15.600.000	30	-	61	7.900.000	100	-	138	7.700.000	138	15.600.000	53,49%	100,00%		Kegiatan dilakukan setiap TW, Realisasi dilakukan di TW 2 dan TW 4, capaian kinerja sebesar 53,49% karena masih ada sasaran yang sulit di
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	47	285.117.000	10	-	10	10.500.000	13	-	13	232.842.000	46	243.342.000	97,87%	85,35%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi dilakukan diTW 2 dan Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan kegiatan, surat tugas

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	29	27.000.000	7	-	7	7.000.000	7	-	8	11.190.000	29	18.190.000	100,00%	67,37%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi dilakukan diTW 2,dan Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan kegiatan, surat tugas,
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	4	44.220.000	1	-	1	3.500.000	1	-	1	4.980.000	4	8.480.000	100,00%	19,18%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi dilakukan diTW 2,dan Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	53	90.350.000	13	-	13	27.950.000	13	-	12	44.750.000	51	72.700.000	96,23%	80,46%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi dilakukan diTW 2,dan Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan kegiatan, surat tugas
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	2	541.223.982	-	-	1	200.254.407	-	-	1	252.395.439	2	452.649.846	100,00%	83,63%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi dilakukan di TW 2, dan Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	5	225.794.000	1	-	1	29.777.215	1	-	2	95.988.863	5	125.766.078	100,00%	55,70%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi dilakukan di TW 2, dan Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	52	10.200.000	13	-	26	2.300.000	39	-	52	3.470.000	52	5.770.000	100,00%	56,57%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasidi tw 2 dan tw 4, target tercapai, tetapi realisasi anggaran sebesar 56,5% karena ada perubahan di SBU
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	205	2.000.000	52	-	156	2.000.000	189	-	205	-	205	2.000.000	100,00%	100,00%		Kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi anggaran pada TW 2 Dan Tw 4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	4	28.924.000	1	-	1	2.450.000	1	-	1	23.390.000	4	25.840.000	100,00%	89,34%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi dilakukan di TW 2 dan Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan kegiatan, surat tugas, dokumentasi, Nota Pesanan. Realisasi rendah dikarenakan
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	120.900.000	3	-	6	41.250.000	9	-	12	51.360.000	12	92.610.000	100,00%	76,60%		kegiatan dilaksanakan setiap TW, realisasi dilakukan di TW 2 dan Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan kegiatan, surat tugas, dokumentasi, . Realisasi rendah dikarenakan perubahan SBU
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,97%	75,30%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			23.440.000		-		-		-		11.700.000		11.700.000		49,91%	Puskesmas Kamaipura	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.440.000		-		-		-		11.700.000		11.700.000		49,91%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	3	23.440.000	-	-	1	-	1	-	1	11.700.000	3	11.700.000	100,00%	49,91%		kegiatan dilaksanakan TW 4, realisasi dilakukan di Tw 4. dokumen hasil kegiatan berupa, laporan kegiatan, surat tugas, dokumentasi,Nota pesanan . Realisasi rendah
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	49,91%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
					1.513.168.982	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**98,00%**	**74,91%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sedang**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Puskesmas Kantewu

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.523.563.647		206.033.230		220.566.093		503.054.767		352.157.785		1.281.811.875		84,13%	Puskesmas Kantewu	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.523.563.647		206.033.230		220.566.093		503.054.767		352.157.785		1.281.811.875		84,13%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	151	24.600.000	38	8.800.000	38	7.600.000	37	8.200.000	38	-	151	24.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1000	30.154.000	250	-	250	14.027.000	250	12.966.000	250	3.161.000	1.000	30.154.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16	32.800.000	4	3.800.000	4	-	4	17.000.000	4	12.000.000	16	32.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11	15.200.000	3	-	3	-	3	11.400.000	2	3.800.000	11	15.200.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	287.030.000	3	-	3	7.600.000	3	163.370.000	3	73.210.000	12	244.180.000	100,00%	85,07%	Kegiatan PMT Lokal Bumil KEK Sebagian Belum Terlaksana Dikarekan Jumlah Ibu Hamil Berkurang	Tidak Ada

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	13.180.000	3	-	3	-	3	9.380.000	3	3.800.000	12	13.180.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	112.806.000	3	24.775.000	3	5.725.000	3	50.757.000	3	26.941.000	12	108.198.000	100,00%	95,92%	Kegiatan Makan dan Minum Penurunan AKI AKB Hanya Terlaksana 1 Kali	Tidak Ada
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	148.800.000	3	35.400.000	3	3.800.000	3	57.000.000	3	52.600.000	12	148.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	481.187.647	3	61.728.731	3	135.494.220	3	52.024.000	3	102.124.594	12	351.371.545	100,00%	73,02%	Terjadi Pemotongan Dari BPJS dikarenakan Terdapat Temuan Di Tahun 2022	Tidak Ada
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	242.156.000	3	58.929.499	3	38.719.873	3	21.757.767	3	54.471.191	12	173.878.330	100,00%	71,80%	Masih Ada SPM yang Belum Capai Target	Tidak Ada
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	3.800.000	3	3.800.000	3	-	3	-	3	3.800.000	12	7.600.000	100,00%	200,00%	Ada Penambahan Dana Sebesar 3.800.000	Tidak Ada
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	11	15.450.000	3	-	3	3.800.000	3	7.600.000	2	4.050.000	11	15.450.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	100	15.200.000	25	-	25	3.800.000	25	7.600.000	25	3.800.000	100	15.200.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	14.800.000	3	-	3	-	3	14.800.000	3	-	12	14.800.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	86.400.000	3	8.800.000	3	-	3	69.200.000	3	8.400.000	12	86.400.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	84,13%		
						Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi		
					1.523.563.647	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**100,00%**	**84,13%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Puskesmas Kinovaro

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.683.775.671		-		419.887.161		519.117.156		385.804.112		1.324.808.429		78,68%	Puskesmas Kinovaro	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.683.775.671		-		419.887.161		519.117.156		385.804.112		1.324.808.429		78,68%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	232	151.432.000	30	-	55	67.425.000	77	30.975.000	70	46.000.000	232	144.400.000	100,00%	95,36%		dana yang tidak sempat direalisasikan adalah makan minum.karena volume kelas ibu
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	240	89.900.000	35	-	94	35.150.000	95	49.000.000	16	5.750.000	240	89.900.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	560	119.400.000	115	-	110	51.125.000	143	33.975.000	192	34.300.000	560	119.400.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	220	16.000.000	53	-	55	6.400.000	58	3.200.000	54	6.400.000	220	16.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	262	5.455.000	-	-	-	-	262	3.200.000	-	-	262	3.200.000	100,00%	58,66%		kegiatan dilaksanakan, tetapi tidak mengambil dana makan minum.
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2287	38.400.000	366	-	485	16.000.000	597	9.600.000	839	12.800.000	2.287	38.400.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	171	38.400.000	36	-	41	16.000.000	68	9.600.000	26	12.800.000	171	38.400.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	190	9.600.000	-	-	95	4.800.000	95	4.800.000	-	-	190	9.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	20	293.066.000	2	-	5	20.800.000	5	153.837.600	8	37.168.400	20	211.806.000	100,00%	72,27%		kegiatan selesai dilaksanakan, namun dikarenakan jumlah bumil KEK dan balita dengan masalah gizi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	20	19.200.000	3	-	5	5.200.000	8	4.200.000	4	9.000.000	20	18.400.000	100,00%	95,83%		ada makan minum yang tidak diambil, dikarenakan kegiatan kesling turun ke rumah rumah, tidak
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	14.726.000	3	-	3	3.200.000	3	1.600.000	3	-	12	4.800.000	100,00%	32,60%		kegiatan selesai dilaksanakan sesuai dengan DPA, namun di BOK Erenggar ada
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	50	24.000.000	13	-	13	9.600.000	12	4.800.000	12	9.600.000	50	24.000.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	50	599.818.671	13	-	13	168.187.161	12	145.239.556	12	93.844.003	50	407.270.720	100,00%	67,90%		pembiayaan pembelanjaan ada yang belum dibelanjakan.
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	254.778.000	2	-	2	8.000.000	3	63.490.000	5	118.141.709	12	189.631.709	100,00%	74,43%		pembiayaan insentif UKM semua dibayarkan, namun dana hanya bisa
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	3.200.000	3	-	3	1.600.000	6	1.600.000	-	-	12	3.200.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	100	6.400.000	50	-	50	6.400.000	-	-	-	-	100	6.400.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	78,68%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			12.749.000		-		-		-		-		-		0,00%	Puskesmas Kinovaro	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12.749.000		-		-		-		-		-		0,00%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	12.749.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%		kegiatan tidak dilaksanakan, karena jadwal bertepatan dengan kegiatan lainnya.
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%		
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
					1.696.524.671											**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**99,25%**	**78,09%**		
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Kulawi

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.122.063.753		115.846.809		638.525.256		499.722.493		732.054.205		1.986.148.763		93,60%	Puskesmas Kulawi	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.122.063.753		115.846.809		638.525.256		499.722.493		732.054.205		1.986.148.763		93,60%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	294	63.000.000	50	-	90	18.900.000	127	18.900.000	236	25.200.000	236	63.000.000	80,27%	100,00%		Jumlah Ibu Hamil Merupakan Jumlah Ibu Hamil Real di Lapangan dimana Target teralu Tinggi karena
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	282	4.400.000	52	-	56	-	67	-	31	3.870.000	206	3.870.000	73,05%	87,95%		Jumlah Ibu Bersalin Merupakan jumlah Real di lapangan dimana tidak tercapainya target di karenakan jumlah sasaran
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1173	42.600.000	1.173	-	1.173	15.060.000	1.173	21.300.000	1.173	6.240.000	1.173	42.600.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	65	11.280.000	18	-	17	5.640.000	27	3.120.000	3	2.520.000	65	11.280.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	214	10.080.000	44	-	94	2.520.000	65	2.520.000	6	5.040.000	209	10.080.000	97,66%	100,00%		Jumlah Terduga HIV yang Tidak Didapatkan Merupakan Pelaksana Prostitusi, yang belum teridentifikasi keberadaanya

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	322.115.000	3	-	3	99.210.000	3	134.930.000	3	87.075.000	12	321.215.000	100,00%	99,72%		Ada Kegiatan Yang Tidak Dapat Laksanakan Karena Tidak Adanya Kasus Atau Kejadian
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	11.040.000	3	-	3	5.540.000	3	700.000	3	3.200.000	12	9.440.000	100,00%	85,51%		Ada Kegiatan Yang Tidak Dapat Laksanakan Karena Tidak Adanya Kasus Atau Kejadian
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	21.615.000	3	-	3	-	3	-	3	15.440.000	12	15.440.000	100,00%	71,43%		Ada Kegiatan Yang Tidak Dapat Laksanakan Karena Tidak Adanya Kasus Atau Kejadian
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	211.920.000	3	-	3	72.500.000	3	40.380.000	3	98.920.000	12	211.800.000	100,00%	99,94%		Ada Kegiatan Yang Tidak Dapat Laksanakan Karena Tidak Adanya Kasus Atau Kejadian
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	1.006.447.753	3	115.846.809	3	302.399.920	3	237.002.493	3	244.909.653	12	900.158.875	100,00%	89,44%		Jumlah Transferan BPJS Berkurang Dikarenakan Jumlah Pengguna BPJS Berkurang Karena Masyarakat tidak
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	260.391.000	3	-	3	64.195.336	3	-	3	177.079.552	12	241.274.888	100,00%	92,66%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	14.465.000	3	-	3	4.560.000	3	1.720.000	3	7.000.000	12	13.280.000	100,00%	91,81%		
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	142.710.000	3	-	3	48.000.000	3	39.150.000	3	55.560.000	12	142.710.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,35%	93,60%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			5.240.000		-		-		1.700.000		3.540.000		5.240.000		100,00%	Puskesmas Kulawi	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.240.000		-		-		1.700.000		3.540.000		5.240.000		100,00%		

		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	5.240.000	3	-	3	-	3	1.700.000	3	3.540.000	12	5.240.000	100,00%	100,00%		Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	100,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
					2.127.303.753	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,35%**	**93,61%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Kulawi Selatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	1.752.823.063		236.186.724		625.042.017		355.289.689		503.869.828	100	1.720.388.258	100,00%	98,15%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaan pelaporan keuangan yangmenjadi masukan dalam pengelolaan adminisstrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	1.459.123.163	17	214.361.724	16	568.746.517	10	299.800.189	14	314.567.528	57	1.397.475.958	57,00%	95,78%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	1.459.123.163	17	214.361.724	17	568.746.517	17	299.800.189	17	314.567.528	17	1.397.475.958	89,47%	95,78%	pegawai dari tw 1 ada yang pindah dan pensiun, tw 2 ada yang pindah, tw 3 ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen adminitrasi umum perangkat daerah (%)	100	8.221.500	-	-	-	-	-	-	100	8.217.600	100	8.217.600	100,00%	99,95%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3.229.500	-	-	-	-	-	-	1	3.225.600	1	3.225.600	100,00%	99,88%	semua belanja terealisasi di tw 4
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4.992.000	-	-	-	-	-	-	1	4.992.000	1	4.992.000	100,00%	100,00%	semua belanja terealisasi di tw 4
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	262.978.400	25	16.200.000	25	50.670.000	25	44.240.000	-	181.084.700	75	292.194.700	75,00%	111,11%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.722.400	-	-	-	-	-	-	1	4.722.400	1	4.722.400	100,00%	100,00%	semua belanja terealisasi di tw 4

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	16.000.000	1	-	1	-	1	-	1	16.000.000	1	16.000.000	100,00%	100,00%	tw 1, tw 2, tw 3 sdh ada belanja pembayaran listrik tiap bulan tapi uangnya cair di tw 4
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	242.256.000	1	16.200.000	1	50.670.000	1	44.240.000	1	160.362.300	1	271.472.300	100,00%	112,06%	tw1 sampai tw 3 belanja makan minum rapat kegiatan sdh terlaksana, tpi dananya cair di tw 4 dan belnja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	22.500.000	25	5.625.000	25	5.625.500	25	11.249.500	25	-	100	22.500.000	100,00%	100,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	22.500.000	1	5.625.000	1	5.625.500	1	11.249.500	1	-	1	22.500.000	100,00%	100,00%	belanja BBM sdh terlaksana di tw 1, tw 2, tw 3 tetapi dananya cair di tw 1 dan tw 4
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91,24%	98,15%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
					1.752.823.063	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**91,24%**	**98,15%**	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Marawola

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.946.034.227		-		665.510.494		591.501.200		1.333.060.954		2.590.072.648		87,92%	Puskesmas Marawola	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.946.034.227		-		665.510.494		591.501.200		1.333.060.954		2.590.072.648		87,92%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	450	54.000.000	86	-	69	13.500.000	79	-	95	24.575.000	329	38.075.000	73,11%	70,51%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	350	35.245.000	74	-	74	-	81	-	81	10.540.000	81	10.540.000	23,14%	29,90%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	350	7.200.000	63	-	57	1.800.000	81	-	83	2.280.000	284	4.080.000	81,14%	56,67%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	450	43.600.000	222	-	365	9.200.000	423	-	342	19.200.000	1.352	28.400.000	100,00%	65,14%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	450	56.800.000	1.620	-	1.668	-	1.688	-	1.688	43.360.000	1.688	43.360.000	100,00%	76,34%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	100	10.400.000	48	-	55	-	68	-	68	1.360.000	68	1.360.000	68,00%	13,08%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	150	15.900.000	63	-	63	-	63	-	68	5.650.000	68	5.650.000	45,33%	35,53%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	246.336.000	3	-	3	20.700.000	3	-	3	207.826.000	12	228.526.000	100,00%	92,77%		Tidak Ada

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	25.800.000	3	-	3	-	3	-	3	15.000.000	12	15.000.000	100,00%	58,14%		Tidak Ada
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	63.177.000	3	-	3	4.850.000	3	-	3	29.815.000	12	34.665.000	100,00%	54,87%		Tidak Ada
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	114.277.000	3	-	3	29.100.000	3	-	3	63.150.000	12	92.250.000	100,00%	80,72%		Tidak Ada
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	2.064.334.227	3	-	3	576.810.494	3	535.750.400	3	828.601.282	12	1.941.162.176	100,00%	94,03%		Tidak Ada
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	208.965.000	3	-	3	9.550.000	3	55.750.800	3	81.703.672	12	147.004.472	100,00%	70,35%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,13%	87,92%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			17.800.000		-		-		-		13.250.000		13.250.000		74,44%	Puskesmas Marawola	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17.800.000		-		-		-		13.250.000		13.250.000		74,44%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	17.800.000	3	-	3	-	3	-	3	13.250.000	12	13.250.000	100,00%	74,44%		Tidak Ada
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	74,44%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang		
					2.963.834.227	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**98,14%**	**87,84%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Nokilalaki

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.452.456.777		-		377.372.619		366.481.792		344.604.359		1.088.458.770		74,94%	Puskesmas Nokilalaki	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.452.456.777		-		377.372.619		366.481.792		344.604.359		1.088.458.770		74,94%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	113	19.000.000	24	-	23	9.500.000	40	3.600.000	23	1.080.000	110	14.180.000	97,35%	74,63%		Indikator tidak capai target berdasarkan data Rill ibu hamil yang ada di desa selama satu tahun, Realisasi Keuangan Tidak
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	120	20.474.000	-	-	60	10.000.000	-	-	60	10.000.000	120	20.000.000	100,00%	97,68%		Kegiatan tidak dilaksanakan di TW I dan III karna kegiatan hanya dilakukan di TW II dan IV,
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	548	59.500.000	137	-	137	28.550.000	137	4.320.000	137	6.120.000	548	38.990.000	100,00%	65,53%		Kegiatan ada di TW I, namun realisasi ada nanti di TW II karna dana baru di cairkan di TW II.
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	134	9.600.000	40	-	54	3.200.000	30	2.160.000	-	-	124	5.360.000	92,54%	55,83%		Target terlalu tinggi tidak sesuai dengan data Rill yang ada di Puskesmas, Realisasi keuangan tidak capai target karna
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	120	265.860.000	30	-	30	14.200.000	30	155.080.000	30	11.260.000	120	180.540.000	100,00%	67,91%		Indikator yang ada di DPA berbunyi dokumen sedangkan kegiatan yang ada di puskesmas yaitu "Jiwa" . Dokumen yang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	125	37.600.000	30	-	30	4.800.000	35	1.720.000	30	5.320.000	125	11.840.000	100,00%	31,49%		Indikator Kegiatan yang ada di DPA berbunyi " Dokumen" Sedangkan kegiatan yang di puskesmas yaitu

		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	5	83.400.000	1	-	1	21.300.000	1	19.240.000	2	38.200.000	5	78.740.000	100,00%	94,41%		Dokuem yang di alporkan berisi kegiatan pertemuan yaitu undangan , dokumentasi .Absensi
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	3699	146.550.000	699	-	1.500	52.950.000	500	28.840.000	1.000	18.880.000	3.699	100.670.000	100,00%	68,69%		Indikator di DPA berbunyi "dokumen" sedangkan kegiatan di Puskesmas yaitu "Jiwa". Adapaun
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	4500	407.045.777	1.000	-	1.500	124.622.619	#####	118.021.792	1.000	119.774.450	4.500	362.418.861	100,00%	89,04%		Indikator di DPA berbunyi "Dokumen" Sedangkan kegiatan di puskesmas yang di biayai oleh BPJS
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	30	245.427.000	8	-	8	7.250.000	7	20.900.000	7	123.869.909	30	152.019.909	100,00%	61,94%		Indikator keuangan tidak capai target karna Realisasi Insentif yang berdasarkan Dengan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	112	4.800.000	30	-	25	2.000.000	35	720.000	30	1.080.000	120	3.800.000	100,00%	79,17%		Indikator Berbunyi " Dokumen " harusnya jiwa , indikator dokuemen juga terlalu tinggi tidak sesuai data RILL puskesmas , Capaian Realisasi tidak capai target karna adanya
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	108	14.800.000	30	-	25	7.400.000	20	2.520.000	33	2.000.000	108	11.920.000	100,00%	80,54%		Indikator telah sesuai , Realisasi keuangan tidak capai target karna adanya Perubahan Pebup
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	3	4.800.000	-	-	-	-	-	-	3	1.800.000	3	1.800.000	100,00%	37,50%		Indikator tidak ada di DPA , Jadi yang digunakan sesuai kasus yang ada di puskesmas yaitu jiwa dan kegiatan hanya
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	67.400.000	-	-	-	61.100.000	-	2.880.000	1	1.980.000	1	65.960.000	100,00%	97,86%		Indikator telah sesuai yaitu satu dokumen yang berisi laporan kegiatan , laporan bulanan , jumlah target kegiaatn yang telah
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	66.200.000	-	-	-	30.500.000	-	6.480.000	1	3.240.000	1	40.220.000	100,00%	60,76%		Indikator telah sesuai yaitu satu dokumen yang berisi laporan kegiatan , laporan bulanan .
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,92%	74,94%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			11.048.000		-		7.500.000		-		-		7.500.000		67,89%	Puskesmas Nokilalaki	

		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			11.048.000		-		7.500.000		-		-		7.500.000		67,89%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	5	11.048.000	-	-	5	7.500.000	-	-	-	-	5	7.500.000	100,00%	67,89%		Tidak Ada
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	67,89%		
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang		
					1.463.504.777										**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**99,92%**	**74,89%**		
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sedang**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

Puskesmas Palolo

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.716.781.516		-		543.055.629		669.221.100		-		1.212.276.729		44,62%	Puskesmas Palolo	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.716.781.516		-		543.055.629		669.221.100		-		1.212.276.729		44,62%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	45	24.000.000	15	-	15	9.000.000	15	2.760.000	15	-	15	11.760.000	33,33%	49,00%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU transport Lebih	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (Puskesmas)	364	54.825.000	-	-	-	-	176	15.750.000	121	-	297	15.750.000	81,59%	28,73%	pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tw 3 dan 4 .Anggaran tidak dapat direalisasikan	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	400	64.250.000	100	-	100	18.000.000	100	12.150.000	100	-	400	30.150.000	100,00%	46,93%	pelaksanaan kegiatan dilakukan Sesuai Target tahun 2024 .Namun Anggaran tidak	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	270	24.000.000	48	-	83	4.500.000	-	3.440.000	53	-	184	7.940.000	68,15%	33,08%	pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan,Tidak mancapai target oleh Karena	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	4	5.000.000	-	-	1	1.250.000	-	750.000	1	-	2	2.000.000	50,00%	40,00%	pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan, Tidak mancapai target oleh Karena Tidak	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	266.619.000	3	-	3	3.000.000	3	194.835.000	3	-	12	197.835.000	100,00%	74,20%	Realisasi belum mencapai 100% karena kegiatan pendampingan rujukan balita	Tidak Ada

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	15.900.000	3	-	3	2.000.000	3	-	3	-	12	2.000.000	100,00%	12,58%	pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan 100% dan untuk Anggaran tidak dapat	Tidak Ada
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	38.560.000	3	-	3	1.820.000	3	-	3	-	12	1.820.000	100,00%	4,72%	pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan dan untuk Anggaran	Tidak Ada
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	200.850.000	3	-	3	41.000.000	3	-	3	-	12	41.000.000	100,00%	20,41%	Realisasi belum mencapai 100% karena kegiatan Penemuan kasus campak(tidak ada	Tidak Ada
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1.564.342.516	1	-	1	391.085.629	1	394.304.100	1	-	1	785.389.729	100,00%	50,21%	Ada beberapa pembelanjaan yang belum terealisasi, dokumen dalam	Tidak Ada
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	268.335.000	3	-	3	6.300.000	3	44.532.000	3	-	12	50.832.000	100,00%	18,94%	pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan,Pembiyaan Insentif UKM	Tidak Ada
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	2	3.000.000	-	-	-	-	1	700.000	1	-	1	700.000	50,00%	23,33%	Pelaksanaan kegiatan dialaksanakan pada TW III dan IV.Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU	Tidak Ada
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	20	2.400.000	-	-	1	600.000	4	-	5	-	10	600.000	50,00%	25,00%	Pelaksanaan Kegiatan PMO ODHV sesuai Jumlah kasus yang ada,Anggaran tidak	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	37.700.000	1	-	1	10.500.000	1	-	1	-	1	10.500.000	100,00%	27,85%	Kegiatan terlaksana pada TW II,III,IV,Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU	Tidak Ada
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	147.000.000	1	-	1	54.000.000	1	-	1	-	1	54.000.000	100,00%	36,73%	Kegiatan terlaksana pada TW II,III,IV,Anggaran tidak terealisasi	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,57%	44,62%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			2.624.000		-		-		-		-		-		0,00%	Puskesmas Palolo	

		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.624.000		-		-		-		-		-		0,00%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	2.624.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan tidak dilaksanakan,waktu tidak cukup oleh PJ program di TW IV.	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%		
						Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
					2.719.405.516	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**98,47%**	**44,58%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Panderee

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.486.402.884		218.175.917		627.569.587		94.297.000		890.501.892		1.830.544.396		73,62%	Puskesmas Panderee	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.486.402.884		218.175.917		627.569.587		94.297.000		890.501.892		1.830.544.396		73,62%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	275	25.050.000	55	-	67	10.020.000	59	-	85	5.280.000	266	15.300.000	96,73%	61,08%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 Tetapi Untuk Pencairan dana nanti dilakukan pada
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	250	16.800.000	42	-	52	6.500.000	63	6.300.000	58	-	215	12.800.000	86,00%	76,19%		Kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 Tetapi Untuk Pencairan dana nanti dilakukan pada
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3500	188.760.000	875	-	875	28.845.000	875	-	875	6.830.000	3.500	35.675.000	100,00%	18,90%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2,3 dan 4 untuk
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	30	10.320.000	7	-	9	2.150.000	10	-	4	880.000	30	3.030.000	100,00%	29,36%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2,3 dan 4 untuk
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20	1.720.000	5	-	7	430.000	3	-	5	440.000	20	870.000	100,00%	50,58%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2,3 dan 4 untuk
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	259.878.000	3	-	3	164.994.000	5	79.307.000	1	3.560.000	12	247.861.000	100,00%	95,38%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2,3 dan 4 untuk

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	35.960.000	3	-	3	3.220.000	3	-	3	4.620.000	12	7.840.000	100,00%	21,80%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2,3 dan 4 untuk
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	25.395.000	3	-	3	3.010.000	1	-	5	14.175.000	12	17.185.000	100,00%	67,67%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	152.560.000	3	-	2	33.590.000	4	-	3	29.890.000	12	63.480.000	100,00%	41,61%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	1.391.647.884	3	218.175.917	3	295.210.062	3	-	3	728.136.765	12	1.241.522.744	100,00%	89,21%		Kegiatan dilaksanakan setiap bulan dan di laporkan setiap bulan berjalan dalam bentuk
	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	257.582.000	3	-	3	44.435.525	3	8.690.000	3	57.670.127	12	110.795.652	100,00%	43,01%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	20	10.320.000	5	-	5	3.440.000	5	-	5	1.760.000	20	5.200.000	100,00%	50,39%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2,3 dan 4 untuk Kegiatan Tuberkulosis di DPA 20 target ,Untuk
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	222	10.320.000	27	-	36	3.440.000	36	-	120	1.760.000	219	5.200.000	98,65%	50,39%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2 untuk Kegiatan Tuberkulosis di DPA
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	20	1.720.000	5	-	5	430.000	5	-	5	-	20	430.000	100,00%	25,00%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2 untuk Kegiatan ODHV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	27.780.000	3	-	3	5.160.000	3	-	3	22.300.000	12	27.460.000	100,00%	98,85%		kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan 2 untuk dokumen
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	70.590.000	3	-	3	22.695.000	3	-	3	13.200.000	12	35.895.000	100,00%	50,85%	dokumen Surat Tugas,Laporan,Dokumentasi	kegiatan dilaksanakan dari Triwulan 1 tetapi untuk pencairan dana nanti dilakukan Triwulan
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,87%	73,62%		
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang		

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			14.025.000		-		-		-		13.900.000		13.900.000		99,11%	Puskesmas Panderee	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14.025.000		-		-		-		13.900.000		13.900.000		99,11%		
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	14.025.000	-	-	-	-	-	-	4	13.900.000	4	13.900.000	100,00%	99,11%		Tidak Ada
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,11%		
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				2.500.427.884	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,87%**	**73,77%**		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sedang**		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Towulu

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.083.541.100		-		341.770.552		-		693.561.913		1.035.332.465		95,55%	Puskesmas Towulu	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.083.541.100		-		341.770.552		-		693.561.913		1.035.332.465		95,55%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	100	53.830.000	25	-	25	24.447.000	25	-	25	20.720.000	100	45.167.000	100,00%	83,91%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	87	20.720.000	22	-	22	10.360.000	22	-	21	16.240.000	87	26.600.000	100,00%	128,38%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	105	5.180.000	26	-	26	2.590.000	26	-	27	2.590.000	105	5.180.000	100,00%	100,00%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	5.180.000	25	-	25	2.590.000	25	-	25	-	100	2.590.000	100,00%	50,00%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	100	284.380.000	25	-	25	36.260.000	25	-	25	219.330.000	100	255.590.000	100,00%	89,88%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	100	7.770.000	25	-	25	5.180.000	25	-	25	2.550.000	100	7.730.000	100,00%	99,49%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	22.837.000	3	-	3	7.770.000	3	-	3	18.130.000	12	25.900.000	100,00%	113,41%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4

		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	100	160.580.000	25	-	25	72.090.000	25	-	25	92.421.200	100	164.511.200	100,00%	102,45%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	100	205.067.100	25	-	25	92.959.752	25	-	25	104.611.709	100	197.571.461	100,00%	96,34%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	100	206.627.000	25	-	25	43.493.800	25	-	25	172.939.004	100	216.432.804	100,00%	104,75%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	10	2.590.000	2	-	2	-	4	-	2	-	10	-	100,00%	0,00%		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0	5.180.000	12	-	12	2.590.000	13	-	13	2.590.000	50	5.180.000	100,00%	100,00%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	10.360.000	3	-	3	5.180.000	3	-	3	5.180.000	12	10.360.000	100,00%	100,00%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	93.240.000	3	-	3	36.260.000	3	-	3	36.260.000	12	72.520.000	100,00%	77,78%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	95,55%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			10.965.000		-		3.710.000		-		5.180.000		8.890.000		81,08%	Puskesmas Towulu	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.965.000		-		3.710.000		-		5.180.000		8.890.000		81,08%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	10.965.000	3	-	3	3.710.000	3	-	3	5.180.000	12	8.890.000	100,00%	81,08%		Kegiatan Sudah terealisasi di TW 3 Tapi realisasi dananya di TW 4
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	81,08%		
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		

				1.094.506.100		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**	**100,00%**	**95,41%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Puskesmas Tinggede

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.359.499.428		-		323.225.382		367.580.727		365.013.187		1.055.819.296		77,66%	Puskesmas Tinggede	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.359.499.428		-		323.225.382		367.580.727		365.013.187		1.055.819.296		77,66%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	188	39.000.000	25	-	35	19.500.000	96	-	195	10.400.000	195	29.900.000	100,00%	76,67%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	188	12.621.000	-	-	-	-	-	-	190	6.280.000	190	6.280.000	100,00%	49,76%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1163	24.800.000	153	-	583	8.500.000	1.083	-	1.126	8.280.000	1.126	16.780.000	96,82%	67,66%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2145	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Jadwal Kegiatan seharusnya dilaksanakan di TW III, namun Transport Peserta dalam kegiatan tersebut tidak tertuang dalam SBU, dan PKM Tinggede	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	32	13.200.000	7	-	11	7.200.000	20	-	29	4.360.000	29	11.560.000	90,63%	87,58%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	254	7.200.000	41	-	61	1.800.000	91	-	207	3.360.000	207	5.160.000	81,50%	71,67%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	773	251.524.000	773	-	773	20.746.000	773	154.496.000	733	50.990.000	3.052	226.232.000	100,00%	89,94%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12.000.000	3	-	3	2.000.000	3	-	3	6.560.000	12	8.560.000	100,00%	71,33%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	34.050.000	3	-	3	7.250.000	3	-	3	14.820.000	12	22.070.000	100,00%	64,82%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	6012	98.600.000	1.708	-	2.044	32.800.000	2.044	-	1.247	32.800.000	7.043	65.600.000	100,00%	66,53%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	465.003.428	3	-	3	143.779.382	3	150.560.015	3	159.594.419	12	453.933.816	100,00%	97,62%	Anggaran internet yang berlebih dianggarkan pada saat di perubahan anggaran	Tidak Ada
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	220.651.000	3	-	3	15.800.000	3	62.524.712	3	41.738.768	12	120.063.480	100,00%	54,41%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	9.600.000	3	-	3	1.500.000	3	-	3	4.920.000	12	6.420.000	100,00%	66,88%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	12	7.200.000	3	-	3	2.100.000	3	-	3	2.360.000	12	4.460.000	100,00%	61,94%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	156.250.000	3	-	3	60.250.000	3	-	3	18.550.000	12	78.800.000	100,00%	50,43%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,18%	77,66%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			55.312.000		-		16.150.000		3.500.000		11.360.000		31.010.000		56,06%	Puskesmas Tinggede	

		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			55.312.000		-		16.150.000		3.500.000		11.360.000		31.010.000		56,06%		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12	55.312.000	3	-	3	16.150.000	3	3.500.000	3	11.360.000	12	31.010.000	100,00%	56,06%	Anggaran tidak terealisasi semua karena SBU Transport lebih rendah dari yang direncanakan oleh Puskesmas	Tidak Ada
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	56,06%		
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Rendah		
					1.414.811.428	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,21%**	**76,82%**		
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam memuat kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah perlu melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang sudah dirancang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sigi Periode 2025-2029 dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sigi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional maupun regional, dimana harus saling sinergi untuk meningkatkan perekonomiannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan upaya untuk mencapai visi misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional dan Regional

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu

mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga kembali menguat dengan pertumbuhan 4,94 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,82 persen, dengan kontribusi mencapai 54 persen terhadap PDB nasional. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali dan peningkatan mobilitas masyarakat menopang capaian pertumbuhan tersebut. Peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 4,79 juta pada 2024 turut menjadi pendorong peningkatan konsumsi. Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, sebesar 6,06 persen pada kuartal IV 2024 dan mencapai 12,48 persen secara kumulatif sepanjang tahun. Kenaikan ini didorong oleh tingginya aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 serta berbagai ajang olahraga nasional yang turut mendorong aktivitas perekonomian.

Pada tahun 2024, kontribusi P-KP terhadap PDB mencapai 7,4 persen. Di tengah berbagai dinamika global dan tahun politik nasional, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh 4,61 persen sepanjang tahun 2024. Di tengah tantangan perdagangan global, ekspor barang dan jasa riil Indonesia mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, ekspor riil tumbuh sebesar 6,51 persen, jauh melampaui capaian tahun 2023 yang hanya sebesar 1,3 persen. Di sisi lain, kinerja impor barang dan jasa riil juga mengalami pertumbuhan positif. Impor barang dan jasa tahun 2024 tumbuh sebesar 7,95 persen, tumbuh signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang terkontraksi sebesar 1,60 persen. Dari sisi produksi, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2024 tumbuh positif di seluruh sektor.

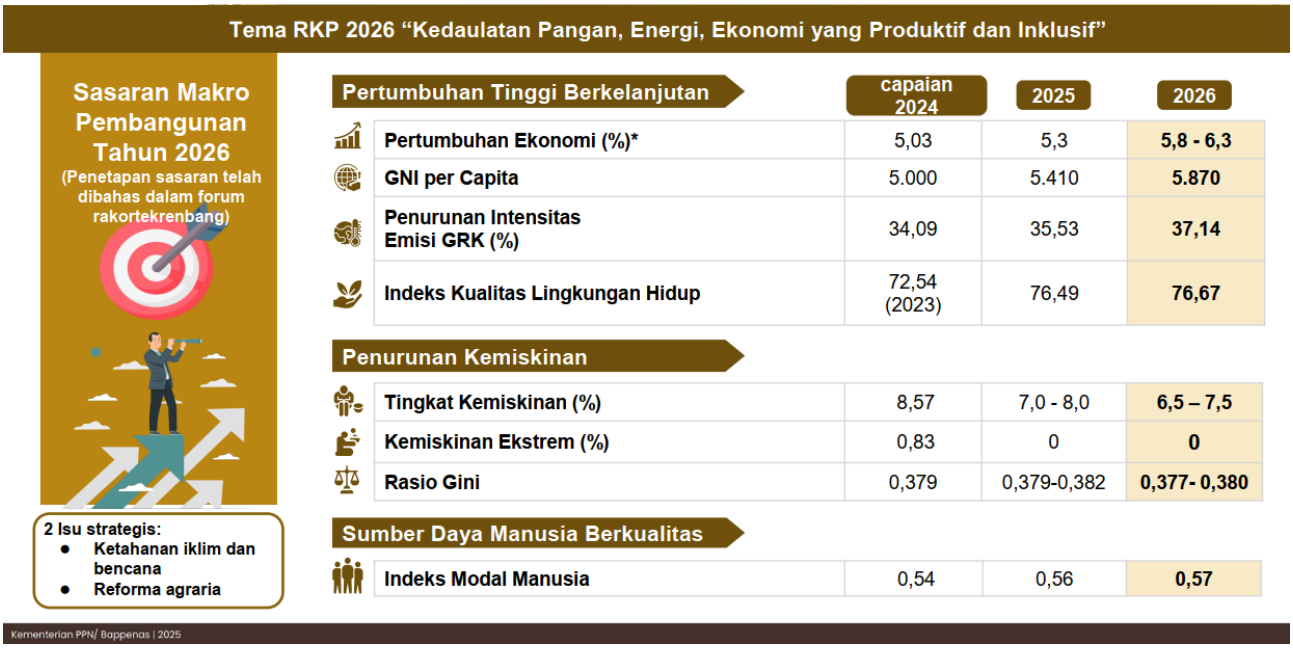
Di sisi lain, inflasi yang terkendali telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi tercatat dua kali berada di luar sasaran yakni pada tahun 2021 (1,9 persen yoy) akibat pandemi, serta pada tahun 2022 yaitu 5,5 persen, yang disebabkan oleh kebijakan penyesuaian harga

energi dan tekanan harga komoditas secara global. Seiring meredanya tekanan harga, inflasi dalam tren penurunan dan kembali berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan hingga mencapai 1,6 persen (yoy) di tahun 2024, atau terendah sepanjang sejarah

Adapun Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Adapun target Indikator Makro Nasional pada Tahun 2026 sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026



Sumber: Kementarian PPN/Bappenas 2025

3.1.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Sigi

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sigi adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Kerangka ekonomi makro Kabupaten Sigi merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Selain indikator tersebut juga akan

disertakan indikator – indikator lain sebagai penunjang dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Sigi terus bangkit pasca pandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini mulai terlihat pada tahun 2023 kondisi ekonomi telah pulih kembali dengan pertumbuhan sebesar 3,37%, dan dilanjutkan pada tahun 2024 sebesar 3,50%. Pada tahun 2025 diproyeksikan tetap tumbuh antara 5,10-5,15 %. Kondisi perekonomian tersebut tentunya juga berpengaruh pada indikator lainnya seperti inflasi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan IPM.

Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Beberapa indikator makro kabupaten sigi sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang ideal. Selama kurun waktu tahun 2023 s/d 2024, perkembangan IPM kabupaten Sigi selalu meningkat. Saat ini nilai IPM Kabupaten Sigi sudah berada pada kelas/kategori IPM tinggi (diatas 70), dengan nilai IPM sebesar 70,90 pada tahun 2024 dan meningkat dibandingkan tahun 2022 pada angka 70,28.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Nilai IPM Kabupaten Sigi sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, seluruh komponen IPM, baik komponen kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita mengalami kenaikan.

2. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah. Di Kabupaten Sigi, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga program-program

pembangunan yang dilaksanakan selalu menyertakan upaya pengentasan kemiskinan di dalamnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Secara umum, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di kabupaten sigi mencapai 12,83 persen namun pada tahun 2024 menurun 0,77 poin mencapai 12,06 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh ketimpangan akses antarwilayah sehingga Arah pembangunan diarahkan untuk penguatan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi) dengan prioritas wilayah rentan dan integrasi program pengurangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sigi. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi pada tahun 2024 mencapai 2,55% dimana Penduduk usia kerja pada Tahun 2024 sebanyak 201.052 jiwa, turun sebanyak 3.300 jiwa jika dibanding tahun 2023 . Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 152.638 jiwa, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 48.414 jiwa.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat

dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada tahun 2024, secara total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi mengalami pertumbuhan sebesar 3,50 persen, dengan pertumbuhan yang terjadi pada setiap lapangan usaha Tidak terdapat Lapangan usaha yang tumbuh diatas 10%; Terdapat 8 Lapangan usaha yang tumbuh dengan klasfikasi pertumbuhan ekonomi sedang, yaitu Pengadaan listrik dan gas; Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Komunikasi; Jasa Perusahaan; Real Estate dan Jasa Lainnya.

Sedangkan 9 lapangan usaha lainnya berada pada pertumbuhan dibawah 5%. Lapangan Usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang; Konstruksi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

5. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator Tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sigi atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 46,53 juta rupiah atau ratarata setiap bulannya masyarakat sigi akan memiliki penghasilan sekitar 3,7 juta rupiah. Namun sayangnya angka ini bukan berarti setiap masyarakat sigi memiliki penghasilan 3,7 juta rupiah setiap bulannya, karena terdapat ketimpangan antara

penduduk rural dan urban. Sehingga, penghasilan tersebut bisa jadi dikuasai oleh beberapa persen kelompok masyarakat saja.

6. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2024, nilai Gini Ratio sebesar 0,246 menempatkan Kabupaten Sigi pada urutan ke-6 terendah di Sulawesi Tengah. Dibanding dengan Gini Ratio Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 yang sebesar 0,281. Namun jika dilihat dari ketimpangan pendapatan (gini ratio), di Kabupaten Sigi ada peningkatan angka gini ratio turun sebesar 0,035 poin. Hal ini menunjukkan ada ketimpangan pendapatan antara kelompok desil atas dan desil bawah akan tetapi ketimpangan pendapatan di kabupaten sigi masih di kategorikan ketimpangan rendah. Perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menekan angka ketimpangan pendapatan, karena pada tahun dimana gini ratio naik sedikit saja, kemiskinan akan naik drastis.

Adapun kondisi ekonomi Kabupaten Sigi pada tahun 2024, 2025 dan 2026, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Sigi Tahun 2024,
Perkiraan Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

URAIAN	2024	2025	Target 2026
Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp.)	12.562.350	13.000.000 - 13.500.000	13.500.000 - 14.000.000
PDRB atas dasar harga Konstan (Juta Rp.)	7.146.190	7.500.000 - 8.000.000	8.000.000 - 8.500.000
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp.)	45.975.516	47.500.000	50,31 - 54,79
PDRB perkapita atas dasar harga konstan (Juta Rp.)	26.153.528	26.500.000 - 27.000.000	29,18
Pertumbuhan PDRB (%)	3,5	5,10 - 5,15	4,64 - 4,69
Laju inflasi, IHK Rata-rata*.	0,80-1,00	0,80 - 1,00	0,80 - 1,00
Target Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan (%)	12,06	11,00 - 11,50	10,47 - 10,97
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	29.800	28.500 - 29.500	28.000 - 28.500
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,52	2,45 - 2,50	2,40 - 2,45

URAIAN	2024	2025	Target 2026
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,7	0,60 - 0,70	0,60 - 0,70
Garis Kemisikinan (Rp)	463.011	475.000 - 500.000	500.000 - 525.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,55	2,50 - 2,60	2,37
Jumlah Penganggur	3.889	3.500 - 3.600	3.300 - 3.400
Gini Rasio	0,246	0,243	0,239 - 0,234
Indeks ketimpangan wilayah*	0,96-0,98	0,94 - 0,96	0,92 - 0,94
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,9	71,50	72,65-73,15
Angka harapan hidup.	70,48	71,69	72,05
Rata-rata lama sekolah.	9,04	9,05	9,05
Harapan lama sekolah.	13,13	13,21	13,29
Pengeluaran perkapita (Ribu Rp.)	9.254	9.500 - 9.750	9.750 – 10.000
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik (Rumah Sakit)	87	87,00 - 88,00	88,00 - 89,00

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu manajemen penerimaan daerah, dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Reformasi anggaran dengan pendekatan *New Publik Management* meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari anggaran tradisional (*traditional budget*) ke anggaran berbasis kinerja (*performance budget*).

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah secara lebih spesifik diarahkan, sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja *(performance oriented)* untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
2. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
3. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah *(work better and cost less)*;
4. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, serta pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian fungsi anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh penting dalam pelaporan keuangan antara lain:

1. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah;
2. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
3. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;
4. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah dan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diketahui bahwa struktur APBD menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang meliputi:

1) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2) Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;
3) Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sigi, selain berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, khusus mengenai pengelolaan pendapatan daerah juga mengacu pada :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Derah dan Retribusi Daerah;
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali berbagai potensi sumberdaya penerimaan secara optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bermakna bahwa Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan desentralisasi/penyerahan urusan pemerintah melalui otonomi daerah, maka

kebijakan umum pemerintah daerah berdasarkan undang-undang telah menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sigi adalah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan
Kabupaten Sigi
Tahun 2023 s.d Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TA.2023 (audited)	REALISASI TA.2024 (audited)	TAHUN 2025	Proyeksi/Target Pada Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.273.640.919.012,62**	**1.410.150.504.679,44**	**1.307.612.256.036,00**	**1.329.787.805.348,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**81.837.764.024,62**	**84.824.192.278,39**	**100.305.227.634,00**	**93.555.227.634,00**
4.1.01	Pajak Daerah	29.530.695.706,00	35.118.053.979,00	53.209.795.588,00	46.459.795.588,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.579.448.986,00	3.039.618.382,00	3.315.132.046,00	3.315.132.046,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.654.363.875,00	2.092.871.872,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.073.255.458	44.573.648.045,39	42.780.300.000,00	42.780.300.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.180.889.116.760,00**	**1.309.724.872.946,00**	**1.189.070.470.164,00**	**1.217.996.019.476,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.136.426.386.465,00	1.256.834.631.489,00	1.142.843.533.429,00	1.171.769.082.741,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.355.648.606,00	117.419.602.500,00	49.503.329.000,00	101.580.706.741,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	604.813.950.000,00	655.819.930.339,00	684.963.780.000,00	617.118.547.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	159.845.498.097,00	144.946.300.321,00	69.047.718.429,00	146.845.079.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	139.439.191.762,00	152.312.265.003,00	169.889.033.000,00	156.621.553.000,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	27.805.695.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.05	Dana Desa	152.166.403.000,00	154.494.636.326,00	147.925.538.000,00	149.603.197.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal		31.841.897.000,00	21.514.135.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.462.730.295,00	52.890.241.457,00	46.226.936.735,00	46.226.936.735,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.262.730.295,00	52.790.241.457,00	46.226.936.735,00	46.226.936.735,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**10.914.038.228,00**	**15.601.439.455,05**	**18.236.558.238,00**	**18.236.558.238,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.914.038.228,00	15.601.439.455,05	18.236.558.238,00	18.236.558.238,00

Sumber : BKAD Kab.Sigi

A. Pendapatan Daerah

Dengan melihat capaian realisasi target pendapatan pada tahun anggaran 2023,2024 dan tahun berjalan 2025, serta untuk proyeksi pada tahun 2026, maka target pendapatan daerah sebesar Rp.1.144.480.521.836,00. Sebagai Berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya untuk usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi sebagai salah satu sumber pembebanan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi, diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan PAD di Kabupaten Sigi antara lain adalah :

1) Mengoptimalkan pendataan objek-objek pajak dan retribusi baru.
2) Meningkatkan intensitas penagihan pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
3) Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian kepada Petugas pemungut dalam penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
4) Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Aparatur;
5) Pemberian penghargaan (reward) kepada petugas pemungut, pemerintah kecamatan dan desa yang target pajak dan retribusinya terpenuhi dan memberikan sanksi (Punishment) kepada petugas pemungut, pemerintah kecamatan dan desa yang tidak mencapai target;
6) Reformasi Pelayanan Publik dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Di sisi lain, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang :

1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan;
2) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa, antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.100.305.227.634,00 dan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.93.555.227.634,00.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari 2 (dua) komponen yang terdiri dari : 1) Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum: Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus: DAK Fisik dan DAK Non Fisik); Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa; 2) Dana Transfer Antar Daerah yang meliputi: Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer pada tahun berjalan 2025 sebesar Rp.1.189.070.470.164,00 dan pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.1.217.996.019.476,00.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Pendapatan lain-lain. Secara umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari 1). Dana Darurat; 2). Dana Hibah; 3). Lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari tabel diatas menunjukan bahwa proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.18.236.558.238,00 dan pada tahun 2026 direncanakan tetap sebesar Rp.18.236.558.238,00.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow program* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

memberikan warna baru sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada kedua Undang-Undang tersebut, lebih-lebih dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada prisipnya bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Aturan

pokok tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :

1. Asas Tahunan;
2. Asas universalitas;
3. Asas kesatuan;
4. Asas spesialitas;
5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
6. Profesionalitas;
7. Proporsionalitas;
8. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; dan
9. Pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi :

1. Penyusunan dan penetapan APBD

   Anggaran sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan daerah merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. APBD sebagai instrumen kebijakan ekonomi, berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan APBD

   Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari Rancangan APBD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat prognosis untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut :

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

   Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas, diaudit oleh lembaga independen (dalam hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi masih dijumpai kendala-kendala sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah belum seluruhnya diterbitkan;
2. Tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan;
3. Kurang tersedianya sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan;
4. Belum optimalnya sinkronisasi jadwal penyusunan antara APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten;
5. Adanya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi, sementara pemerintah Kabupaten tidak diberitahu berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya;
6. Keuangan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dengan prosentase PAD sangat kecil terhadap APBD.

Dengan melihat kendala di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan modifikasi dan penyesuaian dengan peraturan yang baru;
2. Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
3. Mengikuti pelatihan dan *workshop* mengenai perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis;
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi (OPD) untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebesar Rp.1.371.685.434.276,00, dan pada Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.1.326.787.805.348,00, dijabarkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Sigi
Tahun 2023 s.d Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TA.2023 (audited)	REALISASI TA.2024 (audited)	TAHUN 2025	Proyeksi/Target Pada Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**	**1.307.795.789.549,90**	**1.441.015.456.141,16**	**1.371.685.434.276,00**	**1.326.787.805.348,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**851.511.411.140,90**	**1.005.345.704.315,16**	**1.000.109.658.626,00**	**1.017.917.216.614,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	463.059.919.316,00	547.590.556.019,00	654.579.201.295,00	644.054.027.345,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.950.238.883,90	380.749.475.902,16	314.003.241.495,00	341.605.973.275,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.088.812.359,00	2.450.817.950,00	2.200.000.000,00	2.946.507.125,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.107.212.582,00	69.417.912.244,00	29.250.397.730,00	16.374.355.869,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.305.228.000,00	5.136.942.200,00	76.818.106,00	12.936.353.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**225.855.920.636,00**	**203.993.787.011,00**	**141.055.320.186,00**	**78.227.955.914,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	982.534.000,00	1.800.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.677.364.335,00	31.566.114.816,00	15.637.792.115,00	13.996.693.205,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.002.120.954,00	67.896.098.558,00	54.348.025.429,00	34.478.042.976,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.397.407.611,00	98.114.695.523,00	63.585.354.262,00	29.579.086.952,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.494.563.575,00	5.170.359.809,00	5.194.148.380,00	164.132.781,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	784.464.161,00	263.984.305,00	490.000.000,00	10.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**11.225.827.423,00**	**3.912.745.909,00**	**3.650.000.000,00**	**4.650.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.225.827.423,00	3.912.745.909,00	3.650.000.000,00	4.650.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**219.202.630.350,00**	**227.763.218.906,00**	**226.870.455.464,00**	**225.992.632.820,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.214.537.550,00	3.124.684.980,00	5.652.492.764,00	4.977.492.763,40
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	215.988.092.800,00	224.638.533.926,00	221.217.962.700,00	221.015.140.056,60

Sumber : BKAD Kab.Sigi

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi daerah), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan daerah lain yang diperlukan.

Adapun Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sigi
Tahun 2023 s.d Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TA.2023 (audited)	REALISASI TA.2024 (audited)	TAHUN 2025	Proyeksi/Target Pada Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**104.120.701.990,00**	**69.965.831.452,46**	**64.073.178.240,00**	**3.000.000.000,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**104.120.701.990,00**	**69.965.831.452,46**	**64.073.178.240,00**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	104.120.701.990,00	69.965.831.452,46	64.073.178.240,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00

Sumber : BKAD Kab.Sigi

A. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran berbasis kinerja memungkinkan penyusunan APBD defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja. Sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibanding dengan belanja. Untuk menutup defisit dan untuk menyalurkan surplus anggaran dibutuhkan pembiayaan. APBD Tahun Anggaran 2025-2029 diproyeksikan akan mengalami defisit kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang akibat adanya upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Sigi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi masih menempatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebagai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk belanja penyertaan modal dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan kepada masyarakat Kabupaten Sigi saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan strategi pembiayaan dimaksud, maka kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan untuk:

1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai indikator sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dalam kaitan ini penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah yang bersifat stimulan, dan untuk swasta/masyarakat didorong melalui kerangka regulasi yang kondusif;
2. Mengarahkan pembiayaan program kegiatan yang tidak tumpang tindih melalui pemilahan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan melaksanakan pendanaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta perkiraan kapasitas masing-masing instansi/OPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan untuk mencapai indikator – indikator yang

telah ditetapkan, dengan demikian pelaksanaan pembangunan dapat selesai sesuai rencana dengan meminimalkan dana yang tidak terserap.

3. Mengutamakan pembiayaan program, kegiatan yang strategis dan cepat tumbuh, berkembang sehingga dengan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sigi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Sigi. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu dan memperhatikan Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan provinsi sulawesi tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi periode Tahun 2025-2029. Pada masa periode ini telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 yaitu: Visi "Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata."

Adapun Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera
3. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial
5. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana

pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan sejalan dengan tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sigi, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2026 terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sigi yang merupakan transisi antara RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 seperti pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2026 yang terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Periode 2025 – 2029

VISI:		
"Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"		
MISI	**Tujuan Pembangunan Kabupaten**	**Sasaran Pembangunan Kabupaten**
(M.1) - Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas
		2. Meningkatkanya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

VISI:		
"Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"		
MISI	**Tujuan Pembangunan Kabupaten**	**Sasaran Pembangunan Kabupaten**
		3. Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
		4. Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
(M.2) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera	1. Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
		2. Meningkatnya literasi masyarakat
		3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2. Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
		2. Meningkatnya keluarga yang berkualitas
		3. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
		4. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
		2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
		3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
		4. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
		5. Meningkatnya kesejahteraan trasmigran

VISI:		
"Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"		
MISI	**Tujuan Pembangunan Kabupaten**	**Sasaran Pembangunan Kabupaten**
(M.3) - Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah	1. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah
		2. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian
		3. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif
		4. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah
		5. Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral
(M.4) - Mewujudkan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		2. Menurunya Intensitas GRK menuju Net Zero Emission
		3. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani
		4. Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan
		5. Meningkatnya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	2. Meningkatkan Keamanan Daerah dan ketahanan bencana serta perubahan Iklim	1. Meningktanya ketenteraman dan ketertiban umum
		2. Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana
	3. Meningkatkan harmoni sosial	1. Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif

VISI:		
"Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"		
MISI	**Tujuan Pembangunan Kabupaten**	**Sasaran Pembangunan Kabupaten**
		2. Meningkatnya berkebudayaan maju
(M.5) - Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif	1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
		2. Meningkatnya Tata Kelola Berbasis Elektronik
		3. Meningkatnya tata kelola arsip
		4. Meningkatnya profesionalitas ASN
		5. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		6. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
		7. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
		8. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
		9. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
		10. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan
		11. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, senantiasa diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut bila tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan terhadap permasalahan daerah tersebut adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa mendatang. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berasal dari faktor-faktor internal dan eksternal pemerintahan daerah.

4.2.1 Tema Prioritas Pembangunan Kabupaten Sigi, Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2026

Guna menselaraskan tema pembangunan Kabupaten Sigi dan mendukung tema RKP Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 sebagai berikut:

Tema RKP Nasional Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026	Tema RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2026
"KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI, SERTA EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN INKLUSIF"	**"BERANI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN INDUSTRI UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF"**	**"KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI SERTA EKONOMI BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA YANG PRODUKTIF DAN INKLUSIF"**

Sasaran dan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2026 selanjutnya diselaraskan dengan ASTA CITA / Prioritas Nasional untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Prioritas Nasional

❖ Prioritas Nasional 1 :	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
❖ Prioritas Nasional 2 :	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
❖ Prioritas Nasional 3 :	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
❖ Prioritas Nasional 4 :	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
❖ Prioritas Nasional 5 :	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
❖ Prioritas Nasional 6 :	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
❖ Prioritas Nasional 7 :	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
❖ Prioritas Nasional 8 :	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Mengacu kepada prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional yang akan dicapai pada tahun 2026, yang merupakan perwujudan prioritas nasional, dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sigi, maka program prioritas Kabupaten Sigi tahun 2026 yang mendukung terhadap program prioritas pada Prioritas Nasional dalam RKP 2026 dapat dikelompokan kedalam 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. **Prioritas Nasional 1 : (Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM))**

   Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.

   Berpedoman pada arah kebijakan Prioritas Nasional 1 dalam RKP 2026, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 1 Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia"
Tahun 2026

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2	Penguatan Demokrasi	1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
			PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

2. Prioritas Nasional 2 : (Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru)

Prioritas Nasional Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dengan arah kebijakannya.

Berpedoman pada arah kebijakan pada Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dalam RKP 2026, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 2 Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.4
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
Tahun 2026

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Penguatan Keamanan Negara	1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
2		1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
	Distribusi Pusat-Pusat Pertumbuhan (PKW) Ke Wilayah Belum Berkembang	2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3	Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4	Swasembada Pangan	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
		2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
		10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		11	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
5	Swasembada Air	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
6	Ekonomi Digital	1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
7	Ekonomi Hijau	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

3. Prioritas Nasional 3: (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi)

Prioritas Nasional (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi), dengan arah kebijakan yaitu :

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
2. Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya;
3. Penguatan koperasi;
4. Mengembangkan industri kreatif;
5. Pendalaman sektor keuangan.

Berpedoman pada arah kebijakan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi dalam RKP 2026, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 3 Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Tahun 2026

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		8	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2	Mendorong Kewirausahaan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Seluas-Luasnya	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
3	Penguatan Koperasi	1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
		2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
		4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
4	Mengembangkan Industri Kreatif	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		5	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

4. **Prioritas Nasional 4 : (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas)**

Prioritas Nasional Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan arah kebijakan yaitu :

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia;
2. sains;
3. teknologi;
4. pendidikan;
5. kesehatan;
6. prestasi olahraga;
7. kesetaraan gender;
8. serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Berpedoman pada arah kebijakan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam RKP 2026, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 4 Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Tahun 2026

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1		1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		4	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		5	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
		7	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
3	Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
4	Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
		8	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
5	Meningkatkan Prestasi Olahraga	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

5. Prioritas Nasional 5 : (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri)

Prioritas Nasional Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Pengembangan Hilirisasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru;
2. Penguatan Industri Padat Karya Berkelanjutan, Industri Dasar, Dan Industri Strategis Nasional;
3. Pengembangan Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global.

Berpedoman pada arah kebijakan Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dalam RKP 2026, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 5 Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.7. berikut :

Tabel 4.7
Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dalam RKP Tahun 2026

	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Pengembangan Hilirisasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		6	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		7	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		8	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6. Prioritas Nasional 6 : (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan)

Prioritas Nasional Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Membangun Desa dan Membangun Dari Desa;
2. Pemerataan Ekonomi
3. Memberantas Kemiskinan

Berpedoman pada arah kebijakan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dalam RKP 2026, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 6 Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.8. berikut :

Tabel 4.8
Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dalam RKP Tahun 2026

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Membangun Desa dan Membangun Dari Desa	1	PROGRAM PENATAAN DESA
		2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	Pemerataan Ekonomi	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

7. Prioritas Nasional 7 : (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan)

Prioritas Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan arah kebijakan yaitu:

1. reformasi politik;
2. reformasi hukum;
3. reformasi tata kelola pemerintahan
4. pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan;
5. penguatan tatakelola Badan Usaha Milik Negara.

Berpedoman pada arah kebijakan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dalam RKP 2026, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah

di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 7 Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.9. berikut :

Tabel 4.9
Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dalam RKP Tahun 2026

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Reformasi Politik	1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
3	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		4	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
		5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		6	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		9	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
		11	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

8. Prioritas Nasional 8 : (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur)

Prioritas Nasional Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis;
2. Melestarikan budaya;
3. Penanganan bencana.

Berpedoman pada arah kebijakan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dalam RKP 2026, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 8 Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.9. berikut :

Tabel 4.10
Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dalam RKP Tahun 2026

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Melestarikan budaya;	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
		4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	Penanganan Bencana	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Tabel. 4.11
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional,
Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan
Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2026

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.5) - Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif	1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat	2. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.4) - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	3. Meningkatkan harmoni sosial	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
	Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;	(M.2) - Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	(M.3) - Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah (basis alam)*	1. Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
					2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
					3. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	(M.3) - Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasipada konektivitas antar wilayah dan antarsektor	(M.1) - Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar masyarakat	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
					2. Meningkatkanya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
	Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;				3. Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
					4. Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	(M.1) - Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja	(M.2) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera	1. Meningkatkan kualitas masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
					2. Meningkatnya literasi masyarakat
					3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				2. Meningkatkan keluarga	1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
	Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;			berkualitas dan kesetaraan gender	2. Meningkatnya keluarga yang berkualitas
					3. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
					4. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
				3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
					2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
					3. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
					4. Mempertahankan Kestabilan Harga
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;	(M.2) - Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	(M.3) - Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah	1. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif
					2. Meningkatnya nilai tambah perdagangan
					3. Meningkatnya daya saing industri
					4. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	(M.2) - Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	(M.2) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
	Pemberantasan Kemiskinan;				
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.5) - Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif	1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
					2. Meningkatnya keamanan informasi
					3. Meningkatnya tata kelola arsip
					4. Meningkatnya profesionalitas ASN
					5. Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan ketrampilan ASN
					6. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
					7. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
					8. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
					9. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
					10. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
					11. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	**Tujuan Pembangunan Kabupaten**	**Sasaran Pembangunan Kabupaten**
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;	(M.3) - Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasipada konektivitas antar wilayah dan antarsektor	(M.4) - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
					2. Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan
					3. Meningkatnya keadlian dalam penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
				2. Meningkatkan ketahanan bencana	1. Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim
				3. Meningkatkan harmoni sosial	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat
					2. Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif
					3. Meningkatnya berkebudayaan maju

4.2.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Sinkronisasi Prioritas pembangunan daerah yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Sigi Periode 2025-2029 agar keselarasan dan konsistensi antara prioritas Pembangunan daerah (RPJMD) dan prioritas pembangunan daerah (RKPD), maka disusun prioritas pembangunan daerah tahun 2026 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Sinkronisasi Antara Misi, Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD

No.	Misi	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera
3	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata
4	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial
5	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif

4.2.3 Program Unggulan Kabupaten Sigi

Program Unggulan adalah program yang diprioritaskan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sigi, yang merupakan Janji Politik Kepala Daerah antara lain:

1. **Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas**

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, serta pembukaan akses jalan di daerah terisolir guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menggerakkan ekonomi lokal serta pembangunan infrastruktur perkantoran.

2. **Akses Air Bersih, Perumahan Layak dan Layanan Publik untuk Masyarakat Masyarakat kurang mampu.**

   Meningkatkan akses air bersih, sanitasi, perumahan layak, serta menyediakan layanan meteran air dan meteran listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

3. **Seragam Gratis Bagi Siswa Baru dari Masyarakat Kurang Mampu, Peningkatan Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang Terintegrasi.**

   Penyediaan Seragam Gratis Bagi Siswa Baru dari Masyarakat Kurang Mampu, membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang unggul di setiap kecamatan, melanjutkan program "1 (satu) kecamatan 1 (satu) dokter" dan menciptakan sekolah unggulan di setiap kecamatan guna meningkatkan kualitas SDM.

4. **Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM yang Berdaya Saing, Bantuan Permodalan dengan Hibah 1 (satu) Juta - 10 (sepuluh) Juta Rupiah dan KUR 0%.**

   Mengoptimalkan sektor pertanian melalui fasilitasi ketersediaan bibit, pupuk, alat mesin pertanian (ALSINTAN) dan subsidi bahan bakar bagi petani. Penyediaan Ternak dan Perikanan serta meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk UMKM guna mendorong produktivitas dan daya saing lokal, membentuk PERUSDA dan Koperasi berbasis pertanian, memfungsikan kembali Terminal serta pembangunan Pasar Induk Modern Tambuli dan Pembangunan Rumah Potong Hewan dan Pasar Ikan Air Tawar.

5. **Penerapan Infrastruktur Hijau dan Mitigasi Bencana.**

   Menerapkan praktik pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, sambil memperkuat mitigasi bencana di daerah rawan bencana.

6. **Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Pendidikan Formal serta Non Formal dan Layanan Beasiswa, Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Personil Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Beasiswa Siswa Berprestasi.**

   Meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat, memperkuat sekolah-sekolah swasta, serta memberikan layanan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan beasiswa siswa berprestasi.

7. **Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Sosial bagi Petani, Lembaga Adat, Majelis Adat, Dewan Adat dan Masyarakat Kurang Mampu.**

   Mengembangkan program asuransi pertanian, peternakan dan ketenagakerjaan bagi petani dan peternak kurang mampu. Penyediaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi lembaga adat, majelis adat dan dewan adat, serta melanjutkan perlindungan sosial untuk tenaga honor daerah dengan program seperti "Masagena Plus" untuk mendukung kesehatan dan pemberdayaan masyarakat rentan.

8. **Pengembangan Pariwisata dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).**

   Meningkatkan layanan pariwisata di Danau Lindu, Paralayang dan Air Panas Bora serta mendorong Desa Wisata, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Binangga, Kalukubula, Lolu, Kabobona, dan Kawasan lainya guna mendukung pariwisata lokal sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

9. **Penerapan Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan**

   Mendorong digitalisasi dalam UMKM dan sektor bisnis untuk meningkatkan efisiensi serta menerapkan sistem e-government guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan.

10. Peningkatan Harmoni Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Memperkuat harmoni sosial melalui program "Sigi Religi" melanjutkan Umroh Gratis bagi Imam Masjid dan Pegawai Syara serta Wisata Religi bagi Opsir/Pendeta, kegiatan Festival Maulid, Festival Rohani bagi umat Nasrani dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan.

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sigi merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD Kabupaten Sigi berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sigi memuat pandangan dan pertimbangan mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sigi sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam Menyusun rencana kerja dan pembangunan daerah implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Sigi Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pokok – pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) untuk disesuaikan dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sigi untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sigi dan dimasukkan kedalam e-planning (SIPD).

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD Tahun 2026. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Penentuan program dan kegiatan daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sigi pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sigi.

5.1. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun pagu pendanaan RKPD 2026 diberikan kepada perangkat daerah dalam rangka mendukung skala prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Sigi 2025-2029, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.5.1
Rekapitulasi Alokasi Pagu RKPD Tahun 2026

No.	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2026
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	336.261.218.000,00
2	Dinas Kesehatan	117.271.985.000,00
3	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	55.020.359.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	79.104.262.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.877.220.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.050.500.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.411.351.000,00
8	Dinas Sosial	5.457.818.182,00
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.361.117.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.413.250.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	9.238.829.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	7.474.623.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.873.079.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.264.926.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.400.906.000,00
16	Dinas Perhubungan	6.025.235.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.149.369.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5.130.883.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.365.337.000,00
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.831.560.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.946.888.000,00
22	Dinas Pariwisata	7.457.283.000,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.024.576.000,00
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	29.643.783.000,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.114.155.000,00
26	Sekretariat Daerah Kab. Sigi	50.749.976.000,00

No.	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2026
27	Sekretariat DPRD Kab. Sigi	25.948.199.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	10.869.836.000,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	412.893.932.166,00
30	Badan Pendapatan Daerah	9.444.063.000,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	7.291.947.000,00
32	Inspektorat Kab. Sigi	13.339.593.000,00
33	Kecamatan Dolo	2.154.931.000,00
34	Kecamatan Dolo Barat	2.110.509.000,00
35	Kecamatan Dolo Selatan	1.530.145.000,00
36	Kecamatan Kulawi Selatan	1.538.265.000,00
37	Kecamatan Kulawi	1.748.201.000,00
38	Kecamatan Lindu	1.120.366.000,00
39	Kecamatan Marawola	1.867.555.000,00
40	Kecamatan Marawola Barat	1.837.300.000,00
41	Kecamatan Kinovaro	2.166.791.000,00
42	Kecamatan Palolo	1.954.854.000,00
43	Kecamatan Nokilalaki	1.604.818.000,00
44	Kecamatan Tanambulava	1.771.630.000,00
45	Kecamatan Gumbasa	1.444.225.000,00
46	Kecamatan Pipikoro	1.505.489.000,00
47	Kecamatan Sigi Biromaru	1.657.545.000,00
48	Kecamatan Sigi Kota	1.478.291.000,00
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.588.832.000,00
JUMLAH		**1.326.787.805.348,00**

Dari hasil rumusan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam tabel 5.1 selanjutnya secara konsisten dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang secara rinci tertuang dalam tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang termuat dalam lampiran Buku II RKPD 2026.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk mewujudkan pencapaian target-target prioritas pembangunan Kabupaten Sigi, telah dirumuskan program prioritas pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta target pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Hal ini berdasarkan pada aspek dan fokus pada bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sigi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama selanjutnya disajikan dalam tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)
Pemerintahan Kabupaten Sigi
Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target 2026
1	*2*		*3*	*4*
I	**Peningkatan Pendapatan Perkapita**			
	1	PDRB Perkapita (ADHB)	*Rp. Juta*	50,31-54,79
	2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEB)	Angka	17,68
	3	Indeks Ekonomi Hijau (IEH)	Angka	73,89
II	**Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang**			
	4	Tingkat Kemiskinan	%	10,47-10,97

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target 2026
1	*2*		*3*	*4*
	5	Rasio Gini	Angka	0,239-0,234
	6	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	4,22
	7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,64-4,69
	8	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	61,20
*	9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,37
*	10	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	0,65
	11	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	2,01
III	**Kepemimpinan dan Pengaruh di provinsi Meningkat**			
	12	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	42,05
	13	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,59
	14	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	62,00
	15	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	74,07
IV	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**			
	16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,65-73,15
	17	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	75,38
	18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	80,50
V	**Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission**			
	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	82,75
	20	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	157,32

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Daerah selanjutnya disajikan dalam tabel 6.2 di bawah ini:

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
I	**Aspek Geografi dan Demografi**		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,99
2	Rasio Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)	%	105,21
3	Kepadatan Penduduk	Orang/km	53,05
4	Rasio ketaatan terhadap RTRW	Angka	0,08
5	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase	50,20
6	Angka Ketergantungan	%	51,29
7	Rasio Konektivitas	Angka	55,14
8	Indeks Desa	Persentase	16
9	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persentase	75,31
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,49
11	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	62,70
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**		
A.	**Kesejahteraan Kesehatan**		
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,22
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,05
3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	109
4	Prevalensi Stunting	%	27,00
5	Cakupan penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	%	52,00
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)	%	50,00
7	Prevalensi Schistosomiasis	%	≤ 0,60
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Angka	98,70
9	Kabupaten Sehat (KS)	Predikat	Swasti Saba Padapa 51-60
10	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	82,31

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
11	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	32,18-38,30
12	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Orang per 1000 Penduduk	5,3 : 1000
13	Persentase Posyandu Aktif	%	80
14	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	Persentase	68,20
15	Presentase tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	Persentase	82,00
16	Persentase Desa ODF (Stop BABS)	Persentase	78,00
17	Prevalensi Schistomiasis	Persentase	≤ 0,60
18	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	9,30
19	Persentase Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15-19 Tahun	Persentase	39,34
B.	**Kesejahteraan Pendidikan**		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,05
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,29
3	Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Angka	98,36
	Angka Partisipasi Sekolah (APS):		
4	- SD	Angka	99,03
5	- SMP	Angka	93,22
	Angka Literasi/Numerasi :		
6	-Skor Kemampuan Literasi	Skor	60,50
7	-Skor Kemampuan Numerasi	Skor	60,25
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	63,00
9	Angka Partisipasi Sekolah (7-18) kesetaraan (PAUD, SD, SMP)	Angka	46,66
10	Proporsi jumlah satuan PAUD Terakreditasi minimal B	Angka	66,14
11	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi s1/D4	Angka	35,03
12	Iklim inklusivitas	Angka	63,16

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
13	Iklim keamanan	Angka	71,00
14	Iklim kebinekaan	Angka	71,90
C.	**Kesejahteraan Sosial**		
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,43
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65,68
3	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Madya
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	62,35-62,45
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	83,83
6	-Nilai Kesetaraan	Angka	70,30
7	-Nilai Toleransi	Angka	70,50
8	-Nilai Kerjasama	Angka	70,30
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	50,45
10	Indeks Partisipasi Olahraga	Angka	0,51
11	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	71.71
12	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	21,00
13	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,40
D.	**Kesejahteraan Lingkungan dan Ekonomi**		
1	Kategori Penghargaan ADIPURA	Predikat/ Nilai	Setifikat 71
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	41,33
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	13,36
4	Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	%	29,05
5	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun (Ton CO2 eq)	Ton CO2 Eq	632.143,26
6	Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan	%	32,64
7	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,67
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,37
9	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	31,62
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	86,28

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,41
12	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	2,34
III	**Aspek Daya Saing Daerah**		
A.	**Ekonomi Makro**		
1	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp Juta	29,18
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	55
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,17
4	Tingkat Inflasi	%	4,90
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	7,49
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	150-200
7	Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	578
8	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	30000,00
B.	**Ketenagakerjaan dan Produktivitas**		
1	Rasio Penduduk Bekerja	Angka	0,74
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	80,51
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5,55
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	95,00
5	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal, diusulkan untuk menggunakan proksi:	%	0,70
6	a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	5
7	b) Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Angka	N/A
8	Proporsi Penciptaan Lapangan kerja Formal	Angka	3,71
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	Angka	0,027
10	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persentase	70,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
11	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	20,00
12	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	19,80
13	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	56,34
14	Jumlah Koperasi Aktif	Angka	100
15	Jumlah UMKM Yang Memiliki NIB	Angka	7068
16	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Angka	Rp.5.815.727
C.	**Inovasi dan Sektor Unggulan**		
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	0,27
2	Indeks Kemantapan Jalan	Angka	0,33
3	Indeks Kemantapan Irigasi	Angka	0,69
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	5,35
5	Indeks Akses Air Minum	Angka	0,75
6	Indeks Akses Sanitasi	Angka	0,82
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	5,84-9,37
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,67
9	PDRB Sektor Unggulan	%	71,50
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,32
11	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	**%**	4,00
12	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	%	0,49
13	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Milyar Rp)	Angka	37,65
14	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	40,35
15	1. NTP Pertanian	Angka	109,11
16	2. NTN Perikanan Tangkap	Angka	105,11
17	3. NTN Perikanan Budidaya	Angka	104,10
18	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	87,25
19	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	921,55
20	Angka Konsumsi Ikan	Ton	69,12
21	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	0,54

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,19
23	Return on Asset (ROA) BLUD/BUMD	%	2,00
IV	**Aspek Pelayanan Umum**		
A.	**Pelayanan Publik dan Elektronisasi**		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,50
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,63-3,69
3	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	40
4	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD*	Angka	95,95
5	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	Baik
6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	81,20
7	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	Angka	2,20
8	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP
9	Rasio PAD	Persentase	7,49
10	Persentase Kepemilikan NPWP	Persentase	100,00
B.	**Demokrasi, Hukum dan HAM**		
1	Persentase Penegakan Perda	%	63,00
2	Indeks Demokrasi Indonesia	%	86,50
3	Indeks Reformasi Hukum	Angka	88,71
4	Indeks Penyelengaraan Trantibumlinmas	Angka	80,56
5	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat	2,73 Baik
C.	**Reformasi Birokrasi & Pengawasan**		
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,36
2	Persentase MCP KPK	%	65,66
3	Kapabilitas APIP	Level	3,30
4	Nilai Sakip	Predikat	BB
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Daerah	Predikat	B

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
6	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	74,81
7	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	24,51
8	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,50
9	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Persentase	100
10	Persentase Rapat-Rapat yang Difasilitasi Tepat Waktu, Tepat Tindak Lanjut, dan Tepat Sasaran	Persentase	100
11	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Angka	3,4
12	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	80

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disajikan dalam tabel 6.3 di bawah ini:

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
I	**Pendidikan**		
1	Literasi Membaca	Angka	60,5
2	Numerasi	Angka	60,25
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	13,29
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	9,05
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	Angka	74,19
6	Angka Partisipasi Sekolah (7-15) (SD-SMP)	Angka	96,12
7	Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 tahun (Angka)	Angka	98,36

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
8	Persentase guru memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional	Persentase	66
II	**Kesehatan**		
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,05
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	109,00
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persentase	27,00
4	Insidensi TB	Per 100.000 penduduk	252,00
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	98,70
6	Persentase Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	Persentase	50,00
7	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persentase	7,70
8	Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar	Persentase	80,80
9	Kabupaten Sehat (KS)	Angka	51-60
III	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	26,94
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	70,66
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	76,32
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Angka	83,66
5	Rasio ketaatan terhadap RTRW	Angka	0,08

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Persentase	23,48
7	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	Hektar	154,04
8	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	71,06
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	6,89
10	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	100
11	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	100
12	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	100
13	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	100
14	Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang	Persentase	0,12
IV	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase	86,28
2	Persentase Pembangunan Baru dan atau Rehabilitasi serta Relokasi Program Pemerintah untuk Rumah Layak Huni Kabupaten Sigi	Persentase	10,25
3	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	20,51
V	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		
1	Indeks Penyelengaraan Trantibumlinmas	Angka	80,56
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapatdiselesaikan	Persentase	100,00

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	100,00
VI	**Sosial**		
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Angka	71,71
2	Persentase keluarga miskin yang meningkat ekonominya secara mandiri	Persentase	100
3	Persentase keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
4	Persentase Layanan Sosial bagi PPKS	Persentase	100
5	Persentase Peningkatan PSKS yang berperan Aktif dalam penanganan PPKS	Persentase	100
VII	**Tenaga Kerja**		
1	Rasio penduduk bekerja	Rasio	0,74
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	Angka	65,69
3	Persentase Pekerja Informal	Persentase	78,82
4	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persentase	2,11
5	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	1526
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	Persentase	0,56
VIII	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,43
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65,68
3	Persentase keluarga yang memahami dan mendukung kesetaraan gender	Persentase	0,005
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	Persentase	0,0004
IX	**Pangan**		

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	81,67
2	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianyacadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	Persentase	100,00
X	**Urusan Pertanahan**		
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	50,20
2	Persentase kualitas layanan Tertib Administrasi Pertanahan	persentase	24,30
XI	**Lingkungan Hidup**		
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Angka	0,41
2	Persentase Penurunan Emisi GRK: Kumulatif	%	29,05
3	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun (Ton CO2 eq)	Ton CO2 Eq	632.143,26
4	Persentase Penurunan Emisi GRK: Tahunan	%	32,64
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	41,33
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	13,36
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	40
8	Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi (km2)	Angka	0
9	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan *National Communications*	Angka	1
10	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	8100,00
11	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persentase	20,00

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
12	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	41,00
XII	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	83,83
2	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	96,50
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100,00
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/aktaperkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase	68,00
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100,00
6	Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase	83,83
XIII	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
1	Indeks Desa	Persentase	16
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	43
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	68
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	40
5	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	40
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	70
7	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	70
XIV	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	62,35-62,45
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	62,70

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Persentase	2,29
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Angka	42,10
5	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/ Cara KB Modern	Persentase	81,50
6	Indeks Lansia Berdaya	Angka	63,20
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Angka	86,50
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Per	14,20
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	6,40
10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	Persentase	63,67
XV	**Perhubungan**		
1	Rasio Konektivitas	Rasio	55,14
2	Konektivitas Darat	Persentase	55
3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	30
4	Konektivitas Sungai/Danau	Persentase	70
5	Jumlah retribusi sektor penyeberangan danau	Rupiah	100.000.000
XVI	**Komunikasi dan Informatika**		
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Angka	0,27
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,50
3	Persentase aplikasi umum SPBE digunakan Pemda	Persentase	55
4	Persentase Layanan Publik online dan terintegrasi	Persentase	55

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
XVII	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persentase	19,80
2	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persentase	2,73
3	Persentase Volume Usaha Koperasi (%)	Persentase	10,05
4	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha (%)	Persentase	22,44
XVIII	**Penanaman Modal**		
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persentase	55
2	Jumlah Investor Penanaman Modal Berskala Nasional (PMDM/PMA)	Angka	55
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	596.632.000.000,00
XIX	**Kepemudaan dan Olahraga**		
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	21,00
2	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Angka	0,51
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	15
4	Tingkat Pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	15
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase	3
6	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional/Internasional)	Persentase	6
7	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	3
XX	**Statistik**		
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,50
2	Persentase OPD menggunakan data statistik untuk perencanaan pembangunan	Persentase	50

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
3	Persentase OPD menggunakan data statistik untuk evaluasi pembangunan	Persentase	55
4	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persentase	30
XXI	**Persandian**		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Tingkat keamanan informasi pemerintah (%))	Angka	1,20
2	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	1
XXII	**Kebudayaan**		
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	50,45
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	84
3	Persentase Kebudayaan Lokal yang dikembangkan	Persentase	82
4	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	Persentase	89
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	Persentase	100
XXIII	**Perpustakaan**		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	63,00
2	Persentase perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (NSP)	Persentase	27,25
XXIV	**Kearsipan**		
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Daerah	Predikat	B

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase	61,00
XXV	**Kelautan dan Perikanan**		
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,11
2	Nilai Tukar Pembudidayaan Perikanan (NTPi)	Angka	104,10
XXVI	**Pariwisata**		
1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	%	0,49
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persentase	0,67
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	150-200
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	20
XXVII	**Pertanian,Peternakan, dan Perkebunan**		
1	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Peternakan, perkebunan, perikanan	Persentase	40,35
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	102,34
3	a. NTP Tanaman Pangan	Angka	102,22
4	b. NTP Tanaman Hortikultura	Angka	99,02
5	c. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	Angka	101,67
6	d. NTP Peternakan	Angka	106,44
7	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Angka	32.040
8	Jumlah Populasi Ternak Kambing	Angka	19.380
9	Jumlah Populasi Ternak Babi	Angka	17.496
10	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Angka	3.295.425
11	Jumlah Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	52,03
12	Jumlah Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	42,6

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
13	Jumlah Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	Ku/Ha	42,44
14	Jumlah Produktivitas Cabai (Ku/Ha)	Ku/Ha	62,95
15	Jumlah Produktivitas Durian (Kg/Pohon)	Kg/Pohon	123,01
16	Jumlah Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	Kg/Ha	968,57
17	Jumlah Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	Kg/Ha	716,71
18	Jumlah Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	Kg/Ha	445,25
XXVIII	**Perdagangan**		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	14,19
2	Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah	Persentase	100
3	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi (Unit)	Angka	3
XXIX	**Perindustrian**		
1	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	%	4,00
2	Persentase Produk IKM yang Tersertifikasi	Persentase	14,00
3	Jumlah Produk Industri Pengolahan yang dipromosikan	Angka	108
XXX	**Transmigrasi**		
1	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Angka	Rp 5.815.727
2	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	20
3	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembangan	Persentase	20
4	Persentase Transmigran yang Dibina dan diberdayakan	Persentase	20
XXXI	**Sekretariat Daerah**		
1	Nilai SAKIP	Nilai	BB
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,63-3,69
3	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Angka	88,71

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
4	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Angka	Baik
5	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Angka	3,4
6	Persentase peningkatan tata kelola di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase	100
7	Persentase peningkatan tata kelola di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	Persentase	100
XXXII	**Sekretariat DPRD**		
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	95,95
2	Persentase Penetapan PERDA	Persentase	85
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	Persentase	100
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD terhadap Eksekutif	Persentase	75
XXXIII	**Perencanaan**		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	Baik
2	Persentase Keselarasan RPJPD dengan RPJMD	Persentase	100
XXXIV	**Keuangan**		
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	2,34
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	81,2
3	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka	2,2
4	Penetapan APBD Tepat Waktu	Persentase	100
5	Persentase Dokumen dan Laporan penatausahaan administrasi keuangan daerah sesuai standar regulasi	Persentase	100
6	Persentase dokumen laporan dan pertanggungjawaban APBD tepat waktu sesuai regulasi	Persentase	100

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
7	Persentase Kepemilikan NPWP	Persentase	100
8	Persentase BMD yang termanfaatkan sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	Persentase	100
XXXV	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	74,81
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	24,51
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Angka	74,81
4	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Angka	4,99
5	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Angka	24,22
XXXVI	**Penelitian dan Pengembangan**		
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	80
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan Implementasi Pembangunan	Persentase	80
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	80
4	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	80
5	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	80
6	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	80

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1	*2*	*3*	*4*
7	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	80
XXXVII	**Pengawasan**		
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi
2	Persentase pengawasan secara berkala	Persentase	100,00
3	Penanganan Aduan Masyarakat	Persentase	100,00
4	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)
5	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP	Angka	65,66
XXXVIII	**Pemerintahan Umum**		
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	86,50
2	Persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Persentase	74,00
XXXIX	**Perizinan**		
1	Survey Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Perizinan	Persentase	93,00
2	Jumlah Penerbitan NIB	Angka	3942
XL	**Penanggulangan Bencana Daerah**		
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,49
2	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase	100,00
XLI	**Pendapatan Daerah**		
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,49
2	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persentase	100,00
3	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persentase	100,00
4	Persentase Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Persentase	80,00
5	Persentase Realisasi Penerimaan PAD Lain-lainyang Sah	Persentase	100,00

6.1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sigi, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten Sigi yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sigi berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial adapun target capaian disajikan dalam tabel 6.3 di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 6.4.
Target Indikator Kinerja Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Sigi Tahun 2026

1. Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
		Rata rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		Rata rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD)	100%

2. Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus), Yang Bersifat Peningkatan/Promotif Dan Pencegahan/ Preventif	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

3. Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
I	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	100%

4. Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
I	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

6. Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2026
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten /kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%

BAB VII
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah bagian penting dalam pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Periode 2025-2029 dan menjadi acuan dalam merumuskan pembangunan yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sigi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2026 memuat evaluasi capaian pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui rapat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda kabupaten.

Demi mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas dan melalui indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK, dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah: 1). Aspek perencanaan pembangunan daerah; 2). Pokok Pikiran DPRD; 3). Hibah, Batuan Sosial dan Bantuan Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sigi selain ditentukan oleh keseriusan dan kemauan Aparatur Pemerintah Daerah, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Sigi dapat segera terwujud.

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program–program RKPD tahun 2026 dengan sebaik–baiknya. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 menjadi acuan dan pedoman bagi OPD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaanya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sigi Tahun 2026.

BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2025